

Strategi Kebijakan Deradikalisasi Beragama di Kalangan Mahasiswa

Sudut Pandang Rektor UIN

Prof. M.Sirozi, MA, Ph.D

Dr. Yenrizal, M.Si

Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan Sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
Ketentuan Pidana Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Strategi Kebijakan Deradikalisasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Sudut Pandang Rektor UIN

Penulis : Prof. M. Sirozi, MA, Ph.D
Dr. Yenrizal, M.Si
Layout : Nyimas Amrina Rosyada
Desain Cover : Ismoko

Diterbitkan Oleh:
Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
UIN RF Palembang
Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI

Dicetak oleh:
CV.Amanah
Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142
Telp/Fax : 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: Januari 2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN : 978-602-0778-60-0

Link Cover: <https://suluhpergerakan.org/bangunlah-gerakan-mahasiswa/>
<https://hunjhukumpidanaislam.wordpress.com/2017/06/14/mengulang-demonstrasi/>

KATA PENGANTAR

Munculnya gagasan melakukan riset tentang radikalisme beragama di kalangan mahasiswa ini, tak lepas dari diskusi kami dalam tim, obrolan yang hanya sepintas lalu, kemudian berujung pada niatan untuk lebih mendalami. Mengapa harus bicara ini?

Tak bisa dipungkiri bahwa dalam beberapa waktu belakangan, fenomena kekerasan atas nama agama sudah begitu kuat. Peristiwa konflik antar umat beragama, umat berbeda agama, ataupun serangan bom dan berbagai bentuk tindak intimidasi lainnya begitu marak. Dari berbagai penelusuran, ternyata hal-hal tersebut ternyata juga melibatkan atau berpotensi melibatkan kalangan dunia pendidikan, terutama mahasiswa. Data BIN tahun 2017 menunjukkan bahwa 39% mahasiswa di Indonesia sudah terpapar paham radikal. Riset-riset lembaga lain juga menunjukkan hal yang sama.

Miris tentu saja, mengingat lembaga pendidikan khususnya pendidikan tinggi adalah pencetak generasi-generasi yang mampu berpikir cerdas dan kritis. Radikal dalam konteks berpikir tentu boleh saja, tapi radikal dalam arti kata menghalalkan kekerasan dalam segala persoalan, tentu harus dihindari. Kampus yang semestinya menjadi wadah berdialog, bercengkerama akademik, berdebat, diskusi, ternyata tidak imun terhadap kasus-kasus radikalisme. Setidaknya itulah kata Prof. Komarudin Hidayat, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Tetapi fakta tak bisa pula dipungkiri bahwa kampus yang rentan terpapar radikalisme justru adalah kampus PTN, sebaliknya PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) relatif lebih bisa menerima. Ini menarik karena mungkin disebabkan oleh dialektika beragama di PTKI sudah terbangun. Hanya saja, ada potensi baru yang muncul, semenjak peralihan status dari IAIN ke UIN sejak 2001 lalu, berbagai program studi umum mulai masuk ke UIN dan itu adalah konsekuensi logis. Artinya, input ke UIN sudah bervariasi. Di satu sisi ini adalah nilai tambah, karena perguruan tinggi agama tak lagi “sepi”. Tetapi di lain hal, ada kekhawatiran, akankah pemahaman agama akan terus membaik dan mampukah PTKI tersebut merespon ekspektasi terutama

dari para orang tua? Pertanyaan yang tentunya membutuhkan jawaban dari para petinggi kampus.

Buku ini adalah hasil riset yang mencoba memahami dan melihat sudut pandang para rektor UIN di Indonesia. Sengaja fokus ke Rektor, karena sosok itulah yang menjadi sentral pada perguruan tinggi. Pemangku kebijakan tertinggi ada di Rektor, karena itu masa depan generasi muda juga berada pada profesor-profesor tersebut, termasuk soal pemahaman tentang wawasan beragama. Bagaimana perlakuan diberikan, bagaimana metode pembelajaran diterapkan, bagaimana pembinaan ormawa dibentuk, semua adalah kewenangan para rektor. Riset ini berusaha menjabarkan semua itu.

Tentu saja riset ini, sebagai sebuah kajian akademik, tidak luput dari kekurangan. Dialektika intelektual tentu penting disini, kekurangan adalah bahan untuk perbaikan masa berikutnya. Oleh karena itu, terimakasih yang tak terhingga kepada narasumber yang sudah membahas penelitian ini yaitu, Prof. Suaidi Asyari, guru besar pemikiran politik Islam dari UIN Jambi dan Dr. Adiyanto Saptawan, M.Si, pakar kebijakan publik dari Universitas Sriwijaya. Terimakasih juga kepada pihak yang telah berpartisipasi, seperti LP2M UIN Raden Fatah dan jajarannya, atas dukungan kebijakan riset. Rasa terimakasih tentunya disampaikan kepada seluruh narasumber yaitu para rektor dan jajarannya yang telah berbagai informasi. Begitu juga dengan tim riset yaitu Dr. Tareh Rasyid, Hasandri Agustiawan, M.Si., dan Hefriady, MA. Tak lupa tentunya semua pihak, keluarga besar UIN Raden Fatah yang turut membantu.

Tak ada gading yang tak retak, kritik dan saran untuk perbaikan edisi berikutnya sangat dinantikan.

Palembang, November 2018

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Output Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Kerangka Teori.....	15
H. Metode Penelitian.....	19
BAB II Kajian tentang Radikalisme.....	25
A. Munculnya Radikalisme Beragama.....	25
B. Radikalisme di Kalangan Mahasiswa.....	30
C. Radikalisme di Kalangan Mahasiswa.....	36
BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
A. UIN Syarif Hidayatullah	42
B. UIN Sunan Kalijaga	59
C. UIN Alauddin	70
D. UIN Antasari	77
E. UIN Sultan Syarif Qasim	89
BAB IV Hasil dan Pembahasan	97
A. Radikalisme Beragama dalam Pandangan Para Rektor	97
B. Kecendrungan Timbulnya Radikalisme di Kalangan Mahasiswa.....	104
C. Upaya Strategis Deradikalisme Beragama di Kalangan Mahasiswa.....	131

D. Analisis Strategi Kebijakan Deradikalisasi Beragama di Kalangan Mahasiswa.....	163
BAB V Penutup	177
A. Kesimpulan.....	177
B. Rekomendasi dan Saran	178
Daftar Pustaka	181
Indeks	186
Glosarium.....	188
Daftar Narasumber Penelitian	191

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah riset dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) tahun 2017 lalu. Cukup mengejutkan, dimana hasilnya menunjukkan 39% mahasiswa di Indonesia sudah terpapar paham radikal atau radikalisme beragama. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala BIN, Budi Waseso dalam ceramah umum bersama seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Indonesia di kampus Universitas Wahid Hasyim Jakarta, April 2018 lalu¹.

Hampir senada dengan hasil riset dari BIN tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) juga mengatakan bahwa paham radikal sudah masuk ke kampus-kampus. Suhardi Alius, selaku Kepala BNPT mengatakan hal tersebut tidak hanya menyusupi mahasiswa tetapi juga kepada dosen-dosen. Semua ini sangat potensial terpapar paham radikal².

Sementara itu, riset dari LIPI juga menunjukkan bahwa paham radikalisme sudah memasuki berbagai unsur di lembaga pendidikan tinggi. Salah satu pintu masuknya adalah organisasi kemahasiswaan. Organisasi-organisasi ini sangat potensial dimasuki karena cenderung memiliki

¹<https://www.voaindonesia.com/a/temuan-bin-39-mahasiswa-terpapar-radikalisme-dinilai-harus-ditanggapi-serius-/4370366.html>

²<http://citraindonesia.com/kepala-bnpt-radikalisme-sudah-masuk-kampus/?print=pdf>

komunitas tertentu, tertutup, dan masih sangat labil dalam pemahaman nilai-nilai keagamaan³.

Masuknya paham radikalisme beragama di dunia kampus, tentu menjadi fakta-fakta yang membuat miris berbagai kalangan. Lembaga pendidikan yang semestinya menjadi institusi pencetak dan pemberi pencerahan yang positif kepada mahasiswa, justru menjadi “pabrik” munculnya gerakan-gerakan radikal. Tak heran ini kemudian menjadi pekerjaan rumah bersama para pengelola perguruan tinggi, terutama sekali perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI).

Radikalisme sendiri sebenarnya adalah sebuah konsep yang masih menjadi perdebatan. Tetapi, sudah menjadi opini bersama pula bahwa radikalisme, khususnya kaitan ke agama, dianggap sebagai sebuah gerakan atau paham yang menghalalkan perilaku kekerasan dengan segala cara, dengan mengatasnamakan agama. Aksi bom bunuh diri yang kemudian disebut sebagai tindakan terorisme, adalah salah satu bentuk radikalisme beragama yang terjadi. Peristiwa bom di WTC tahun 2001, Bali Blast 2002, bom di kereta bawah tanah London, bom Kuningan, bom Cirebon, dan berbagai lokasi lainnya adalah fakta-fakta yang kemudian melengkapi justifikasi adanya kekerasan atas nama agama.

BNPT mendefinisikan radikalisme ini sebagai embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan *suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem*. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat

³<http://lipi.go.id/berita/single/Gerakan-Radikal-dan-Terrorisme-Susupi-Organisasi-Kemahasiswaan/15087>

& keyakinan orang lain), 2) fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), 3) eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).⁴

Radikalisme mengatasnamakan agama kemudian merebak dan semakin lama semakin menguat. Paparannya kemudian bukan lagi masyarakat umum. Kecenderungan masuknya paham radikal ke dunia perguruan tinggi, sebagaimana penjelasan di atas tidak bisa dibantah lagi. Terjadinya kasus bom bunuh diri Surabaya yang tersangka pelakunya pernah kuliah di Unair, begitu juga pelaku bom bunuh diri di Univ. Riau, menjadi beberapa indikasi serius. Data yang lebih kuat dimunculkan oleh hasil riset PPIM UIN Syarif Hidayatullah yang mengatakan bahwa 58,5% mahasiswa memiliki pandangan keagamaan yang radikal. 51% memiliki opini intoleran terhadap aliran di dalam Islam. Tak jauh berbeda, survey Alvara Research Centre mengatakan bahwa 23,4% mahasiswa setuju melakukan jihad untuk tegaknya khilafah di Indonesia⁵. Terhadap indikasi ini, Komarudin Hidayat⁶, mantan Rektor UIN Jakarta sendiri mengatakan bahwa adanya keterlibatan mahasiswa dan alumnus UIN Jakarta dalam kasus terorisme menunjukkan bahwa pendidikan tinggi keagamaan tidak serta merta imun terhadap paham-paham radikal ini. Disinilah perlunya keseragaman dan kesepahaman sudut pandang. Kasus bom buku di tahun 2011 lalu, yang melibatkan pelaku Pepi Fernando, alumnus Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta, adalah bukti konkrit apa yang disampaikan oleh Komarudin Hidayat di atas.

⁴<http://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Strategi-Menghadapi-Paham-Radikalisme-Terorisme.pdf>

⁵ Harian Suara Pembaruan, 6 Juni 2018.

⁶ Harian Umum Seputar Indonesia, 6 Mei 2011

Saifudin (2011) dalam sebuah artikelnya berkata bahwa persentuhan kalangan mahasiswa dengan radikalisme Islam tentu bukan sesuatu yang muncul sendiri di tengah-tengah kampus. Radikalisme itu muncul karena adanya proses komunikasi dengan jaringan-jaringan radikal di luar kampus. Dengan demikian, gerakan-gerakan radikal yang selama ini telah ada mencoba membuat metamorfosa dengan merekrut mahasiswa, sebagai kalangan terdidik.

Tentu tidak bisa serta merta juga melakukan vonis bahwa kurikulum atau metode pembelajaran di PTKI mendukung terhadap munculnya sikap radikalisme. Bagaimanapun juga ini masih bisa dikatakan sebagai sebuah anomali, karena persentasenya sangat sedikit dibandingkan dengan yang tidak melakukan. Hal yang jelas dan harus dipastikan adalah pemahaman terhadap akar masalah munculnya gerakan radikalisme tersebut dan kemudian berpikir untuk mencari solusi apa yang bisa dilakukan.

PTKI di Indonesia punya peran dan tanggungjawab besar untuk menekan laju gerakan radikalisme ini, terutama di kalangan mahasiswa. Tidak mudah memang, karena sebagaimana disampaikan Saifuddin (2011), gerakan radikalisme ini berkaitan dengan aspek ideologi, ekonomi, kebencian, ketidaksenangan, yang pada beberapa hal sudah mendarah daging. Wilayah ideologi adalah salah satu yang sulit untuk dimasuki dan dirubah. Pada beberapa hal mungkin diperlukan perlakuan khusus, melakukan proses perubahan orientasi secara ideologis.

Pentingnya PTKI, khususnya lagi setelah terjadi fenomena perubahan status dari IAIN ke Universitas Islam Negeri (UIN), jelas sangat krusial. Komarudin Hidayat mengatakan bahwa transformasi IAIN ke UIN, tetap saja memunculkan kegamangan di kalangan kampus. Perlu diingat bahwa perubahan tersebut merupakan dimensi penting yang secara hipotesis

bisa berpengaruh pada pola pengajaran, iklim intelektual, dan atmosfer kegiatan mahasiswa di lembaga tinggi tersebut. Rasa gagap dan kaget atas perubahan, belum sepenuhnya bisa dihilangkan, terutama untuk kalangan beberapa dosen senior. Begitu juga ekspektasi masyarakat atau wali mahasiswa, masih agak sulit untuk melepaskan diri dari bendera IAIN sebagaimana yang selama ini dikenal. Ini yang kemudian berpengaruh pada sudut pandang mahasiswa, dimana masa orientasinya banyak dihabiskan melalui pendidikan khusus organisasi kemahasiswaan.

Saat ini sudah ada 17 UIN di Indonesia sejak diluncurkan pertama kali tahun 2001 silam. Kendati demikian, walau sudah lebih dari satu dasawarsa, lembaga ini ternyata mau tidak mau masih juga dihadapkan pada soal pemahaman keislaman yang dianggap fundamental, garis keras, radikal, dan sebagainya. Kasus pelarangan penggunaan cadar di UIN Sunan Kalijaga beberapa waktu lalu, adalah contoh bagaimana dinamika pemahaman beragama tersebut masih belum tuntas. Begitupun tanggal 31 Oktober 2017 lalu, segenap Dewan Eksekutif Mahasiswa PTKIN se Indonesia menyampaikan deklarasi menolak radikalisme agama. Ini menjadi salah satu lampu peringatan bahwa isu radikalisme, garis keras, militansi beragama, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kampus UIN menjadi sasaran strategis, karena fenomena perubahan dari IAIN sebelumnya cukup mendatangkan riak-riak yang kemudian memunculkan organisasi-organisasi yang mencoba tetap bertahan dengan tradisi sebelumnya. Proses transisi ini terus terjadi seiring dengan terus bertambahnya UIN-UIN lain.

Transisi yang berlangsung tentu tidak lepas dari aspek kepemimpinan di masing-masing lembaga. Peran rektor sebagai pemegang kebijakan tertinggi di masing-masing UIN menjadi penting, karena masing-

masing perguruan tinggi harus terus berinovasi menciptakan berbagai formula strategis, terutama di level kebijakan. Kebijakan yang dibuat haruslah kebijakan yang mengacu pada perkembangan dinamis di kalangan mahasiswa dan juga dinamika dalam hubungan beragama. Rektor yang visioner, memiliki prediksi masa depan yang mumpuni, dan terpenting mampu merumuskan menjadi kebijakan yang mengayomi seluruh sivitas akademika. Dalam konteks manajemen, peran *top management* ini menjadi krusial karena dari sinilah akan dilahirkan berbagai aturan-aturan turunan sebagai panduan dalam aktifitas kemahasiswaan. Rektor harus mampu melihat berbagai kekuatan dan kelemahan secara internal, sekaligus melihat peluang dan ancaman dari sisi eksternal.

Pada konteks inilah riset ini menjadi penting, terutama sekali menelusuri fenomena radikalisme di lingkungan UIN di Indonesia, dan kemudian memahami pula langkah-langkah strategis apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Sasaran akhir adalah bisa memberikan rekomendasi kebijakan strategis tentang upaya deradikalisasi agama di lingkungan UIN di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Transformasi IAIN ke UIN sebenarnya diharapkan bisa memberikan nuansa pemahaman baru mengenai tradisi keagamaan yang lebih moderat khususnya di kalangan generasi muda. Tetapi masih adanya kegamangan dalam proses transisi ini, tingginya persoalan-persoalan sosial politik, ketidakadilan secara ekonomi, dinamika politik di luar negeri, stigma negatif tentang Islam, serta kuatnya gempuran media massa, membuat harapan-harapan tersebut tidak tercapai secara maksimal. Kasus radikalisme, kekerasan atas nama agama, intoleran terhadap perbedaan,

masih kerap dimunculkan. Ini menjadi masalah karena kemudian punya korelasi utama pada munculnya sikap radikal.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian yang dibuat disini adalah :

1. Bagaimanakah fenomena kemunculan radikalisme beragama di kalangan mahasiswa, khususnya di lingkungan mahasiswa UIN?
2. Bagaimanakah upaya-upaya strategis yang sudah diterapkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk melakukan deradikalisasi agama di kalangan mahasiswa?
3. Strategi kebijakan apakah yang bisa dilakukan dalam upaya deradikalisasi agama, khususnya di lingkungan PTKI di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fenomena radikalisme beragama di kalangan mahasiswa.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya strategis yang sudah diterapkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk melakukan deradikalisasi agama di kalangan mahasiswa.
3. Untuk mendapatkan rekomendasi strategi kebijakan yang bisa dilakukan dalam upaya deradikalisasi agama, khususnya di lingkungan PTKI di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pemahaman mendalam mengenai kajian radikalisme beragama di lingkungan UIN. Adanya riset ini, bisa memberikan pengayaan tersendiri,

khususnya konsep tentang deradikalisasi di lingkungan UIN serta manajemen preventif yang bisa diterapkan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan kebijakan penting bagi pemerintah, khususnya Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis), dalam memahami dan melibatkan perguruan tinggi guna menangkal isu radikalisme. Kebijakan ini nantinya bisa diberlakukan di lingkungan PTKI, dan tidak menutup kemungkinan juga bisa dipakai di lingkungan Kemeristek Dikti. Secara praktis juga ini bisa memunculkan rekomendasi kebijakan yang bersumber dari para intelektual Islam, khususnya para Rektor UIN.

E. Output Penelitian

Sesuai kebijakan Kementerian Agama RI, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan output utama yaitu :

1. Rekomendasi kebijakan ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, melalui para rektor.
2. Publikasi hasil penelitian berupa Buku ber ISSN dan publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi dengan Sinta Indeks.

F. Tinjauan Pustaka

Riset mengenai radikalisme beragama diyakini sudah cukup banyak, apalagi isu ini semakin hari semakin banyak menemukan momentumnya. Kalangan ilmuwan dari PTKI termasuk yang paling banyak melakukan kajian terhadap hal ini.

Sahri (2016) dalam risetnya yang berjudul Radikalisme Islam, Perspektif Politik Islam mengatakan bahwa fenomena radikalisme sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Sejak fenomena paham Khawarij

hingga dinamika yang kemudian berlangsung menunjukkan bahwa semua itu sangat dimungkinkan untuk terus berkembang. Ini menunjukkan bahwa radikalisme bukanlah soal yang sederhana, tetapi ada aspek sejarah yang membentuknya, dan telah berkembang sejak zaman dahulu.

Saifudin (2011) melalui risetnya berjudul Radikalisme di Kalangan Mahasiswa, Sebuah Metamorfosa Baru, menyebutkan bahwa persoalan radikalisme di kalangan mahasiswa tidak lepas dari proses kaderisasi yang memang khusus dijalankan, terutama sekali kemunculan kelompok fundamentalis. Kaum fundamentalis sudah lama ada dan beraktifitas. Kelompok inilah yang melakukan proses kaderisasi. Umumnya pula kaum fundamentalis adalah bagian dari kalangan intelektual, sehingga proses masuk dan mempengaruhi berbagai pihak bisa berlangsung dengan cepat. Dalam prosesnya, seringkali dibentuk dengan melakukan aktifitas yang mengikat terhadap kelompok yang dipengaruhinya.

Gagasan yang dijelaskan oleh Saifudin di atas banyak berorientasi pada sisi penyebab terjadinya radikalisme beragama di kalangan mahasiswa. Dalam hal ini, Saifuddin mengatakan bahwa penyebab radikalisme sangat besar disebabkan oleh faktor eksternal, terutama indoktrinasi dari kalangan fundamentalis.

Sementara itu, riset dari Rindha Widyaningsih, Sumiyem, Kuntarto(2017) dengan judul Kerentanan Radikalisme di Kalangan Generasi Muda menyatakan bahwa rentannya generasi muda terhadap paham-paham radikal, disebabkan oleh berbagai faktor eksternal dan terpaan informasi yang diterima. Aspek sosial, politik, ekonomi, dan bahkan dinamika yang terjadi di negara lain, mempengaruhi besar terhadap munculnya gagasan yang bersifat radikal. Disebutkan juga bahwa pengaruh-pengaruh ini bisa masuk melalui berbagai cara, seperti pendanaan kegiatan, suplai narasumber

kegiatan dan sebagainya. Hal ini berkelindan pula dengan terpaan informasi yang sangat luar biasa kepada masing-masing pihak.

Beberapa kajian kepustakaan yang bisa dimasukkan disini, walaupun banyak pula yang lainnya belum termasuk, adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Tinjauan hasil riset sebelumnya

NO	Nama/Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Sahri/2016	Radikalisme Islam, Perspektif Politik Islam	Radikalisme Islam merupakan warisan dari jaman dulu yang selalu muncul. Munculnya radikalisme sangat terkait dengan fenomena politik yang berlangsung. Secara historis sudah ada garis yang menunjukkan munculnya aliran garis keras dalam Islam, seperti Khawarij.	Penelitian ini saya tidak membahas aspek politik, walaupun berkaitan. Fokus penelitian ini adalah pada perilaku keagamaan mahasiswa dan intervensi kebijakan yang bisa dilakukan.
2	Saifuddin/2011	Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa, Sebuah Metamorfosa Baru	Anggapan bahwa kelompok Islam militan diikuti oleh kalangan awam mulai disadari kalangan fundamentalis. Perubahan gerakan dilakukan kelompok ini, pilihan kelompok mahasiswa	Fokus penelitian saya adalah pada upaya mencegah deradikalisasi di mahasiswa, bukan pada

			<p>sebagai agen baru dianggap mampu merubah pola gerakan. Merembaknya kelompok radikal Islam di kalangan mahasiswa tidak terlepas dari upaya kaderisasi kelompok intelektual kalangan fundamentalis Islam. Strategi yang dilakukan adalah indokrinasi ideologis yang membuat mahasiswa sulit berpisah dari kelompok ini. Fenomena ini akhirnya membentuk metamorfosa baru gerakan Islam radikal di kampus</p>	<p>alasan mengapa radikalisasi terjadi.</p>
3	Rindha Widyaningsih, Sumiyem, Kuntarto, 2017	Kerentanan radikalisme di kalangan generasi muda	<p>Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang proses terjadinya radikalisme di kalangan kaum muda, mengetahui perilaku keberagamaan dan memberikan gambaran mengenai kerentanan kaum muda terhadap radikalisme agama. Hasil adalah kalangan kaum muda yang ada punya kerentanan yang</p>	<p>Penelitian saya tidak sekedar mengetahui faktor penyebab tetapi juga ingin melihat pada upaya yang bisa dilakukan dalam mencegah di masa datang.</p>

			tinggi terpapar dan terpengaruh paham-paham radikalisme yang dipengaruhi oleh sikap keberagamaan, kondisi psikologis, dan kondisi sosial politik. Paham-paham radikal menyusup melalui kegiatan-kegiatan keagamaan mahasiswa dengan memberikan bantuan dana kegiatan kemahasiswaan sehingga mendapatkan simpati di kalangan anak muda	
4	Masnun Tahir/2015	Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB	Penyebaran kelompok Islam radikal di wilayah mahasiswa tidak terlepas dari perjuangan untuk pengkaderan kelompok intelektual dalam lingkaran Islam fundamentalis. Strateginya adalah melakukan indoktrinasi ideologi yang menyebabkan mahasiswa merasa sulit untuk memotong hubungannya dari grup ini. Fenomena ini akhirnya membentuk metamorfosis baru untuk gerakan Islam radikal baru	Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada output yang diharapkan, yaitu tidak sekedar memahami masalah tapi juga sampai pada mencari solusi

			di kampus.	
5	Wahid Khozin/2013	Sikap Keagamaan dan Potensi Radikalisme Beragama di Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama	Studi pada 10 PTA di Indonesia ini menunjukkan bahwa : 1) adanya kecenderungan sikap keagamaan yang radikal mahasiswa PTA, tetapi masih taraf rendah; 2) adanya kecenderungan cara berpikir sektarian terutama berkaitan dengan positivisasi norma agama dalam kehidupan kenegaraan; 3) adanya kecenderungan orientasi politik keagamaan; dan 4) adanya kecenderungan dukungan terhadap penggunaan media kekerasan untuk mengaktualisasikan pesan-pesan agama.	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah orientasinya yang tidak sekedar melihat potensi tetapi sampai pada mencari solusi kebijakan
6	Akh Fauzi Aseri, Bayani Dahlan, Mariatul Asiah/2015	Radikalisme Islam di kalangan mahasiswa PTN di Banjarmasin	Penegakan syariat Islam bukanlah jawaban atas persoalan yang terjadi dinegeri ini. Menyikapi adanya aksi-aksi kelompok organisasi tertentu yang menyerukan penegakan syari'at Islam, mahasiswa di tiga perguruan tinggi negeri tersebut tidak	Perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokusnya bukan pada mahasiswa

			setuju. Tetapi sebagai negara demokrasi, maka pilihan untuk memperjuangkan hal tersebut adalah hak semua warga negara. Pandangan mahasiswa tersebut selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan pihak Rektorat untuk menjaga suasana kampus agar tetap kondusif. Namun sebagian mahasiswa juga ada yang mendukung penegakan syariat Islam untuk diformalkan dalam sistem bernegara. Walaupun demikian pemikiran radikalisme di kalangan mahasiswa pada tiga perguruan tinggi negeri Banjarmasin tersebut masih sebatas wacana, belum sampai pada tahapan aksi	PTN, tetapi UIN. Orientasi juga berbeda yaitu tidak hanya melihat masalah tapi juga mencari rekomendasi untuk kebijakan.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : penelusuran kepustakaan, 2018

Tampak dari penjelasan di atas bahwa riset yang banyak dilakukan adalah pada upaya memahami masalah, yaitu untuk mengetahui mengapa radikalisme terjadi. Riset yang fokus pada solusi belum banyak dilakukan, apalagi yang tertuju pada aktifitas UIN di Indonesia. Hal inilah yang menjadi pembenar dan ciri khas utama mengapa kajian ini penting untuk dilakukan. Solusi kebijakan yang

nantinya akan dilakukan, adalah nilai mendasar penelitian ini harus dilaksanakan.

G. Kerangka Teori

Istilah radikalisme memiliki banyak kemiripan dan sering diasosiasikan juga dengan istilah lain seperti revivalisme, ekstremisme, fundamentalisme, puritanisme, dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai neo-khawarij⁷. Pemakaian istilah seperti ini mengacu pada satu ketentuan bahwa adanya tindakan-tindakan kekerasan mengatasnamakan agama dengan alasan melakukan pemurnian ajaran agama dan kembali ke kaidah asal melalui segala cara, termasuk kekerasan.

John Esposito⁸ (1992) mengatakan bahwa istilah fundamentalisme adalah akar pemahaman yang kemudian bisa berkembang menjadi banyak hal. Fundamentalisme sendiri diarahkan pada tiga hal utama yaitu, *pertama*, kelompok yang menginginkan kembali pada ajaran semula atau hal mendasar dalam beragama. *Kedua*, mengacu pada kelompok Protestan Amerika abad 20 yang mengarah pada penafsiran injil secara literal. *Ketiga*, diarahkan pada aktivis politik yang tertuju pada sikap protes terhadap kelompok barat, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya. Dari hal ini sebenarnya Esposito lebih cenderung menggunakan istilah revivalisme Islam, karena fundamentalisme identik dengan sikap keagamaan kaum Protestan.

Radikalisme kemudian diidentikkan dengan fundamentalisme, terutama di kalangan agama Islam. Sebenarnya ini sangat dominan terjadi

⁷ MA Sya'ban, *Islamic History*, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, 56.

⁸ John Esposito, *The Islamic Threat, Myth or Reality*, Oxford University Press, New York, 1992

disebabkan konstruksi pers barat tentang sikap perlawanan dalam kelompok Islam terhadap berbagai dominasi kaum barat⁹. Oleh karena itu, istilah radikalisme tidak bisa serta merta diarahkan pada beberapa kelompok Islam yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama. Sayangnya istilah ini sudah terlanjur menjadi sebuah konsep yang diarahkan pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa kelompok dalam Islam. BNPT sendiri kemudian mengadopsi istilah radikalisme sebagai sikap yang menghalalkan kekerasan, dan ujungnya adalah terorisme. Dalam hal ini harus diakui terdapat pengaburan makna yang kemudian menjurus pada satu agama yaitu Islam.

Berdasarkan hal itu, maka radikalisme¹⁰ bisa diterjemahkan sebagai paham yang merujuk keyakinan kelompok agama tertentu, yang menginginkan atau melakukan perubahan secara total terhadap tata nilai agama yang dianggap bertentangan dengan paham mereka dengan menggunakan cara-cara yang ekstrem, intoleran, dan pada titik tertentu dengan jalan kekerasan secara fisik. Hal ini bahkan dilakukan dengan berniat melumpuhkan struktur besar yang ada sampai ke akar-akarnya dengan cepat dan berdasarkan pertimbangan subyektif¹¹.

Kemunculan paham radikal dan juga tindakan-tindakan kekerasan, termasuk pada kalangan mahasiswa, bisa dianalisis melalui Altman dan Taylor (1973)¹² tentang Penetrasi Sosial (*Social Penetration Theory*).

⁹ <http://digilib.uinsby.ac.id/4193/7/Bab%202.pdf> di akses tanggal 14 Agustus 2018

¹⁰ Konsep ini didasarkan dan dikembangkan sesuai definisi yang dibuat oleh BNPT, sebagaimana juga dikemukakan oleh Esposito (1992), Azra (2011), Bakri dan Saidi (tt), serta Abd A'la (2008).

¹¹ M Nur Syam, *Radikalisme dan Masa Depan Agama, Rekonstruksi Tafsir Sosial Agama*, dikutip dari <http://digilib.uinsby.ac.id/4193/7/Bab%202.pdf> di akses tanggal 14 Agustus 2018

¹² Richard West dan Lynn Turner, *Teori Komunikasi Suatu Pengantar*, Simbiosis Rekatama MEdia

Menurut Altman dan Taylor, hubungan sosial biasanya terjalin karena adanya interaksi. Masing-masing orang akan membuka diri pada tahapan-tahapan khusus, yang bermula dari hubungan yang tidak intim menjadi intim. Pembukaan diri adalah inti dari pola hubungan yang terjadi. Pada masanya bisa saja terjadi penarikan diri (*depenetration*) ketika terdapat kejanggalan-kejanggalan dan perbedaan dengan apa yang dipahami oleh para pelakunya. Terdapat dua dimensi penting dalam tahapan penetrasi ini yaitu, keluasan hubungan dan kedalaman hubungan. Tahapannya akan bermula dari tahapan orientasi, pertukaran penjajakan afektif, pertukaran afektif, dan pertukaran stabil. Seseorang bisa saja mengikuti paham yang lain karena memang mengalami masa orientasi dan pertukaran yang intens. Tetapi bisa juga tidak terjadi pertukaran stabil karena ada depenetrasi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kedekatan dan asupan informasi yang dimiliki oleh orang tersebut.

Teori Penetrasi Sosial bisa dipakai untuk memotret awal tentang kemunculan radikalisme di kalangan mahasiswa. Bahasan ini tidak terlalu dalam, karena ini hanya ingin melihat dari permukaan bagaimana paham radikal tersebut dipahami dan masuk ke dalam wacana berpikir mahasiswa.

Radikalisme yang selama ini terus menguat disebabkan banyaknya faktor berpengaruh, seperti dijelaskan oleh Azyumardi Azra¹³ bahwa radikalisme muncul disebabkan oleh beberapa hal yaitu: *pertama*, pemahaman keagamaan yang literal, *kedua*, bacaan yang salah tentang Islam dan dikombinasikan dengan idealisasi Islam masa lalu, *ketiga*, deprivasi politik, ekonomi dan sosial yang masih berlaku di masyarakat, *keempat*, masih berlanjutnya konflik bernunasa agama dan SARA di masyarakat

¹³ Dikutip dari <http://digilib.uinsby.ac.id/4193/7/Bab%202.pdf>, tanggal 14 Agustus 2018

hingga saat ini. Semua hal ini bisa berakumulasi menjadi satu sehingga muncullah gerakan tersendiri.

Pada kontes inilah sebenarnya diperlukan kebijakan khusus dari pemerintah, khususnya dari pimpinan instansi pendidikan tinggi keagamaan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Universitas Islam Negeri (UIN) yang ada di Indonesia saat ini seharusnya menjadi motor penggerak untuk melakukan upaya deradikalisasi. Keberhasilan pada tingkat UIN akan bisa menjadi pemicu keberhasilan di lembaga lainnya. Pada titik ini, fokusnya adalah masalah kebijakan, baik di tingkat Universitas maupun di kementerian. Kebijakan yang adaptif akan bisa menjembatani masalah ini dan aplikatif di semua instansi.

Guna memotret dan menemukan formula kebijakan yang tepat, aspek manajemen perencanaan strategis pada manajemen resiko menjadi pijakan penting. Manajemen resiko ini diadopsi dari Bryson¹⁴ yang mengatakan bahwa hal penting adalah pemahaman secara jelas aspek resiko yang akan terjadi, sehingga kemudian bisa dilakukan langkah-langkah antisipatif. Titik fokusnya adalah perencanaan strategis. Unsur *top leader* harus punya konsep tentang ini.

Rencana strategis berbasis manajemen resiko, kemudian menjadi alasan perlunya dilakukan Analisis SWOT, untuk melahirkan rekomendasi kebijakan yang sesuai. Dasarnya adalah pada apa yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan. SWOT Analisis diuraikan pada aspek *Strength* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan) secara internal. Selanjutnya diuraikan juga *Opportunity* (peluang) dan *Threats* (ancaman) dari sisi

¹⁴ Bryson, J.M. 2005. Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

ekternal¹⁵. SWOT Analisis yang dikemukakan pertama kali oleh Albert Humprey tahun 1970, diyakini masih relevan dan bisa membawa pada sebuah rekomendasi utama tentang kebijakan dalam deradikalisasi agama di kalangan mahasiswa.

Selain Analisis SWOT, berbagai riset pihak lain akan dipakai untuk mempertajam analisis. Konfirmasi pada hasil riset pihak lain akan membantu untuk menguatkan argumen-argumen yang dimunculkan sekaligus memperkaya temuan dengan gagasan pihak lain.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan karena merancang dan mencari sebuah desain upaya deradikalisasi agama memerlukan sikap-sikap subjektif dari peneliti. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti akan melakukan tafsiran-tafsiran terhadap kondisi kehidupan beragama di masing-masing perguruan tinggi. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan unsur pimpinan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih dalam mengenai solusi yang akan diterapkan. Penelusuran dan pencarian dokumen terkait juga dilakukan, baik dokumen kebijakan maupun dokumen lain yang mendukung. Secara ringkas, metode penelitian ini dilakukan dengan rangkaian kegiatan berikut.

- a. Penelusuran bahan-bahan dan dokumen terkait kebijakan PT tentang upaya deradikalisasi.

Hal ini dilakukan dengan mencari dokumen di semua level, baik di pusat maupun daerah yang berhubungan dengan kebijakan PT, khususnya

¹⁵ Analisis SWOT diambil dari pendapat yang diuraikan oleh Lynn Kime dan Minifreed Mc Gee, dikutip dari https://www.rma.usda.gov/pubs/2011/swot_brochure.pdf, diakses tanggal 14 Agustus 2018

- PTKIN dan UIN. Kebijakan dan program kerja serta renstra setiap UIN yang menjadi objek penelitian akan menjadi patokan penting. Termasuk disini adalah program strategis dan hasil riset internal terkait radikalisisasi.
- b. Wawancara dengan *stakeholder* terkait kegiatan keagamaan dan kemahasiswaan di UIN yang ada. Wawancara utama dilakukan dengan Rektor masing-masing UIN, Pembina Kemahasiswaan, dan jika diperlukan dengan tokoh mahasiswa dan organisasi intrakampus.
 - c. Melakukan analisa tentang fokus utama kebijakan yang sudah dilakukan terhadap upaya deradikalisasi, kasus yang pernah terjadi, upaya persuasif, dan pengaruh dari pihak luar.
 - d. Melakukan analisa lingkungan fisik, sosial, agama, ekonomi terhadap semua objek yang ditelusuri, sehingga bisa diperoleh pemahaman komprehensif. Tujuannya agar ada semua kerangkap kebijakan deradikalisasi yang lengkap dan utuh. Analisis lingkungan ini dengan melibatkan pihak lain yang memiliki keahlian tersendiri, seperti pakar keagamaan, pendidikan dan pakar budaya.
 - e. Penulisan laporan awal penelitian. Tahapan ini untuk mendapatkan kerangka laporan yang jelas sebagai dasar dalam melakukan analisis berikutnya.
 - f. Melaksanakan seminar hasil dengan stakeholder terkait, sesuai dengan naskah laporan awal yang sudah dibuat. Berbagai masukan dan kritikan dari para pihak akan menjadi pertimbangan utama dalam penyempurnaan laporan, sehingga bisa dibuat sebuah strategi kebijakan yang komprehensif.

Data-data yang sudah didapatkan, baik dari hasil wawancara, pengamatan, penelusuran dokumen, dianalisis sesuai dengan mekanisme analisis kualitatif sebagaimana Miles dan Huberman. Pada dasarnya analisis

berlangsung selama penelitian dilakukan, mulai dari saat penelusuran dokumen hingga tahap hasil. Semua aktifitas tersebut berhubungan dengan kegiatan analisis kualitatif. Analisis utama akan dilakukan dengan SWOT, sehingga bisa memunculkan strategi kebijakan yang bisa diambil.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya meliputi semua UIN yang ada di Indonesia, saat ini berjumlah 17 UIN. Tetapi berdasarkan pertimbangan keterbatasan peneliti, serta mengadopsi metode yang digunakan, maka secara random dan purposive dipilih sebanyak 5 UIN. Pertimbangannya adalah :

- a. Lokasi tersebar di masing-masing pulau/provinsi secara proporsional
- b. Dilihat dari kesejarahan bisa dibedakan antara yang awal menjadi UIN dengan yang berada dalam rentang lima tahun terakhir.
- c. Dalam beberapa hal, pernah terjadi kasus yang punya relevansi dengan paham-paham perbedaan sudut pandang dalam memahami isu keagamaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipilihlah beberapa UIN yaitu :

1) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Pertama kali bertransformasi dari IAIN ke UIN di Indonesia yaitu tahun 2002, merupakan PTKIN yang pertama berubah ke UIN. Dianggap sebagai barometer UIN di Indonesia dan banyak melahirkan berbagai alumnus yang memiliki pemikiran-pemikiran kritis. Salah satu alumnusnya pernah dianggap terlibat aksi radikalisme.

2) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Pertama kali bertransformasi ke UIN tahun 2004. Menjadi salah satu PTKIN terbesar di pulau Jawa, dan berbagai pemikiran kritis banyak

dimunculkan dari kampus ini. Kasus pelarangan pemakaian cadar sempat menjadi topik nasional yang berawal dari kampus ini. UIN ini bisa mewakili dinamika pemikiran keislaman di kalangan mahasiswa untuk daerah Jawa.

3) UIN Alaudin, Makassar

Bertransformasi menjadi UIN tahun 2005, merupakan PTKIN terbesar serta menjadi barometer pemikiran dan kajian Islam untuk wilayah Indonesia Timur. UIN Alaudin saat ini berkembang pesat dan menjadi wadah pendidikan Islam di Timur yang banyak melahirkan alumnus yang berkiprah diberbagai wilayah.

4) UIN Sultan Syarif Kasim, Riau

Sama dengan UIN Alaudin, kampus ini bertransformasi ke UIN tahun 2005. Untuk wiayah Sumatera, UIN ini merupakan yang pertama bertransformasi. Kampus ini banyak melahirkan pemikiran kritis. Saat terjadi kasus terorisme awal tahun 2018, Riau sempat menjadi sorotan. Pilihan terhadap kampus ini bisa menunjukkan dinamika pendidikan Islam di wilayah Sumatera.

5) UIN Sultan Antasari, Banjarmasin

Pertama kali bertransformasi tahun 2017, merupakan PTKIN yang termuda menjadi UIN dan berada di wilayah Kalimantan. Riak-riak pada PTKIN ini belum terlalu menonjol, tetapi dinamika pada kerukunan beragama di Kalimantan, bisa ditunjukan pada kampus ini. Oleh karena itu, representasi Kalimantan bisa dilakukan pada UIN Antasari.

Pilihan terhadap masing-masing UIN ini sudah mencakup provinsi dan pulau yang ada, serta dinamika pemikiran yang muncul. Diharapkan

akan ada nuansa tersendiri dalam melihat bagaimana kebijakan yang dibuat ternyata berimplikasi pada gerakan keagamaan dan kemahasiswaan.

Selain lokasi penelitian berdasarkan lokasi masing-masing UIN, penelitian ini juga dilakukan berdasarkan lokasi masing-masing narasumber. Dalam hal ini narasumber bisa saja bukan hanya para rektor, tapi meliputi juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, serta beberapa lembaga lain yang terkait seperti FPI, Muhammadiyah, NU, dan organisasi lainnya.

Data dan Sumber Data

Data dan sumber data dalam penelitian ini akan dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Pertanyaan Penelitian	Data	Sumber Data	Metode Pengumpulan
Kemunculan Gerakan Radikalisme di Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Data organisasi kemahasiswaan • Jaringan organisasi • Struktur dan pengurus organisasi • Sejarah keberadaan organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi mahasiswa • Rektor • Wakil Rektor III • Dokumentasi • Media massa 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelusuran dokumen • Observasi • Wawancara
Sudut pandang rektor tentang radikalisme di kalangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pandangan rektor tentang radikalisme • Kemunculan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara

mahasiswa	radikalisme di kalangan mahasiswa		
Upaya yang sudah dilakukan dalam deradikalisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang pernah dibuat • Strategi yang sudah ada • Pola pembinaan kemahasiswaan • Aturan dan pedoman akademik • Aturan dari kementerian 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor III • Direktur Diktis • Tokoh pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelusuran dokumen • Wawancara • FGD • Pengamatan
Strategi-strategi yang harus dilakukan dalam melaksanakan kebijakan yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan kebijakan selama ini • Kekuatan yang dimiliki • Tantangan kebijakan • Peluang pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Diktis • Rektor • Wakil Rektor III • Ormawa • Tokoh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelusuran dokumen • Wawancara • FGD

Semua data di atas dan teknik pengumpulannya dilakukan secara baik dan profesional. Fokusnya adalah agar semua data terkumpul dan nantinya bisa diolah serta dianalisis pada saat penulisan laporan penelitian. Dalam prakteknya di lapangan ternyata metode pengumpulan data bisa berkembang semakin banyak dan disesuaikan dengan kebutuhan riil.

BAB II

KAJIAN TENTANG RADIKALISME

A. Munculnya Radikalisme Beragama

Istilah radikalisme, khususnya dalam konteks beragama, akhir-akhir ini cenderung dilekatkan pada umat Islam, yang hal ini disinyalir dipicu oleh kemunculan beberapa gerakan garis keras yang melakukan serangkaian bom bunuh diri, penyerangan, *sweeping*, dan perilaku kekerasan lainnya.

Dilihat dari sejarahnya, istilah radikalisme sebenarnya tidak memiliki akar historis dengan Islam, bahkan dalam khazanah bahasa Arab sendiri tidak ditemukan adanya istilah radikal. Justru sebenarnya ini ada dalam literatur barat yang sering memutarbalikkan antara istilah *fundamentalism*, *ekstrimisme*, *aktifisme*, dan *revivalisme Islam*. Dalam hal ini, istilah radikalisme sangat kental bermuatan politis, sebuah istilah yang kemudian berpotensi untuk mengklaim dan bahkan menyudutkan kelompok tertentu¹⁶. Pandangan ini bisa dilihat dari berbagai referensi lain, yang semuanya menyatakan bahwa radikalisme bukan produk dari kalangan muslim.

Kemunculan paham radikal, jika diartikan sebagai sebuah paham garis keras dalam memperjuangkan keyakinan tertentu yang dianutnya, memiliki sejarah panjang dalam masyarakat. Fenomena kemunculan kelompok Wahabiah di awal abad 19 di Semenanjung Arab yang

¹⁶ Anzar Abdullah, *Gerakan Radikalisme dalam Islam, Perspektif Historis*, Jurnal Addin Volume 10 Nomor 1, Februari 2016.

berkeinginan untuk membersihkan ajaran Islam dari hal-hal yang dianggap menyimpang serta dikatakan bid'ah, adalah salah satu titik munculnya paham-paham yang berhaluan keras ini¹⁷. Hal ini yang kemudian berkembang terus dengan munculnya berbagai gerakan lainnya.

Di sisi lain, terdapat pula gerakan-gerakan dalam kelompok Kristen yang melakukan protes terhadap penafsiran injil selama ini dan menginginkan agar pemaknaan secara literal harus dilakukan. Gerakan yang melahirkan kelompok Protestan ini yang meluas dan berkembang ke berbagai belahan dunia lainnya. Gerakan ini lebih banyak disebut sebagai paham yang mengedepankan fundamentalis, atau kembali ke ajaran teks secara literal¹⁸. Radikalisme dan fundamentalisme memang dua konsep yang sering diputarbalikkan dan dianggap saling berkaitan.

Ciri khas kedua konsep ini terletak pada keinginan untuk kembali melihat teks agama itu secara literal, kembali pada gagasan teks itu sendiri tanpa harus diterjemahkan atau ditafsirkan. Penafsiran akan menimbulkan bid'ah di kalangan masyarakat, oleh karena itu harus kembali ke awal. Kedua paham ini punya fokus yang sama. Perbedaan mungkin terlihat pada aspek metode dalam mencapai tujuan tersebut. Radikalisme berarti membolehkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan secara fisik dengan alasan melakukan *nahi munkar*. Artinya terdapat pula perbedaan mendasar antara paham fundamentalis dengan radikal, walaupun memiliki akar kelahiran yang sama.

¹⁷ Azyumardi Azra, *Akar Radikalisme Keagamaan, Peran Aparat Negara, Pemimpin Agama dan Guru untuk Kerukunan Umat Beragama*, Makalah disampaikan pada Diskusi 'Memperkuat Toleransi Melalui Sekolah' The Habibie Center, Hotel Aston, BogorBogor, 14 Mei 2011

¹⁸ Anzar Abdulah, *ibid.*

Sebuah pendapat disampaikan oleh Asrori¹⁹, radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham/aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa. Pendapat Asrori ini mengacu pada realitas banyaknya terjadi sikap-sikap kekerasan, terutama dari kelompok yang dikategorikan termasuk kaum fundamentalis.

Konsep fundamentalisme memang sangat problematik. Para teoretisi banyak berdebat tentang istilah ini. William Montgomery Watt menyatakan bahwa istilah fundamentalisme berasal dari kata di dalam Inggris kuno yang dikaitkan dengan orang-orang yang berpandangan bahwa al-Kitab harus diterima dan ditafsirkan secara harfiah. James Barr, menyatakan kaum fundamentalis adalah kelompok yang: 1) menekankan pada ketidaksalahan al-Kitab. Al-Kitab tidak mengandung kesalahan sedikitpun. 2) membenci secara mendalam terhadap teologi modern serta metode dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. 3) menganggap bahwa siapapun yang terlibat dengan gerakan teologi modern adalah bukan Kristen sejati. Robert N. Bellah dan William Liddle lebih suka menggunakan istilah *skripturalisme* untuk menunjuk kepada gerakan keagamaan yang bercorak literalis atau tekstual. Ketika melihat Islam, maka Islam fundamentalis hakikatnya adalah

¹⁹ Ahmad, Asrori, *Radikalisme di Indonesia, Antara Historiositas dan Antropositas*, Jurnal Kalam, Volume 9, Nomor 2, Desember 2015.

kelompok yang melihat al-Qur'an dan al-Hadits sebagai entitas teks yang tidak ada kesalahannya sama sekali, yang sempurna, yang datang dari Tuhan dan terhindar dari kemungkinan kritik.²⁰

Oleh karena itu, sebenarnya kajian tentang radikalisme maupun fundamentalisme tidak bisa ditekankan hanya pada satu jenis agama semata. Hampir semua agama di dunia ini memiliki sejarah radikalisme yang memang berakar pada aspek pemahaman teks yang bersifat literal semata. Penganut agama lain seperti Kristen, Yahudi, Hindu dan Budha juga punya fenomena yang sama baik yang dapat menimbulkan kekerasan agama ataukah tidak. Kekerasan di dalam agama Hindu dapat dijumpai dalam kasus kekerasan agama di India Selatan, yaitu antara kaum Sikh haluan keras dengan Islam. Di Israel juga dijumpai kekerasan agama antara Kaum Yahudi Ultra dengan umat Islam. Di Jepang juga dijumpai kekerasan agama Shinto dalam bentuk penyimpangan agama yang mencederai lainnya. Demikian pula di agama Kristen seperti halnya yang terjadi di Amerika Serikat dan juga belahan Eropa lainnya. Di dalam Islam juga dijumpai kekerasan agama seperti terjadinya berbagai terror baik yang langsung maupun tidak langsung mencelakai orang lain²¹.

Melihat pada aspek tersebut, maka menjadi pertanyaan penting pula yaitu mengapa sebenarnya radikalisme bisa terjadi, atau mengapa begitu mudahnya banyak pihak melakukan aksi-aksi radikal. Terhadap hal ini, Azyumardi Azraberpendapat bahwa peningkatan radikalisme keagamaan banyak berakar pada kenyataan kian merebaknya berbagai penafsiran, pemahaman, aliran, denominasi, bahkan sekte di dalam (intra) satu agama

²⁰ Nur Syam, *Radikalisme dan Masa Depan Hubungan Agama-Agama, Rekonstruksi Tafsir Sosial Agama*, naskah orasi pengukuhan Guru Besar pada IAIN Sunan Ampel, tanggal 10 Oktober 2005.

²¹ *Ibid.*

tertentu. Hal selanjutnya adalah bacaan yang salah terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap Islam pada masa tertentu. Azra juga menyebutkan bahwa Radikalisme keagamaan juga dapatmendapat tambahan alasan dari deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Pada saat yang sama. Disorientasi dan dislokasi sosial budaya, dan ekses globalisasi, dan semacamnya sekaligus merupakan tambahan faktor-faktor penting bagi kemunculan kelompok-kelompok radikal²².

Tampak bahwa persoalan radikalisme bukanlah hal yang sederhana. Munculnya prilaku radikal, selain karena pemahaman terhadap internal teks agama itu sendiri, juga disebabkan adanya jalinan kelindan dengan berbagai isu-isu eksternal lainnya. Semua tidak bisa berdiri sendiri. Munculnya pemahaman literal dikarenakan memang gelombang pemahaman secara kontekstual sudah dipandang berlebihan. Begitu juga realitas sosial dan politik di negara ini memang menuntut munculnya pemahaman sebagian pihak untuk bersikap kritis dan kemudian menyandarkan pada beberapa ideologi yang dianggap berpengaruh. Belum lagi terpaan gelombang informasi yang luar biasa dan bersifat sangat terbuka, menimbulkan ragam informasi yang sangat sulit menentukan kebenarannya. Dinamika masalah sebagaimana disebutkan Azra di atas, bertemu dengan kemudahan dalam memproduksi informasi ke berbagai pihak tanpa harus terikat dengan berbagai mekanisme sensor. Propaganda untuk memunculkan sikap radikal itupun terus berkembang dan sangat memungkinkan lahirnya generasi-generasi radikal berikutnya. Disini bisa dikatakan bahwa kemunculan paham radikal bukanlah serta merta begitu saja atau karena satu faktor

²² Azyumardi Azra, *ibid.*

semata. Paham ini bisa muncul menjadi perilaku sekelompok orang karena memang banyaknya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi.

B. Radikalisme Beragama di Indonesia

Untuk Indonesia sendiri, gerakan radikalisme sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pertikaian kelompok Paderi dengan kaum adat di Minangkabau, yang dipicu dengan dibawanya paham Wahabi ke Minangkabau oleh tokoh-tokoh seperti Haji Miskin, Haji Mohammad Arief dan Haji Abdulrahman, bisa dikatakan adalah salah satu momen awal pertikaian berbau agama, dengan alasan ingin memurnikan kembali ajaran Islam di masyarakat. Paham Wahabi sangat kental dalam gerakan ini, karena memang para pemimpinnya adalah kelompok yang baru pulang dari Mekkah, yang saat itu dikuasai Wahabi. Ciri khas gerakan ini adalah melakukan tindakan kekerasan untuk memaksa masyarakat agar kembali pada ajaran sesuai pemahaman mereka. Jika diperlukan, untuk melakukan perjuangannya, siapapun bisa dilawan. Tak heran, jika Tuanku nan Renceh harus menentang Tuanku Nan Tuo, gurunya sendiri karena berbeda pandangan dalam melakukan gerakan. Tuanku nan Tuo cenderung lebih moderat²³.

Gerakan Paderi yang berlangsung sejak awal tahun 1800-an, bisa dikatakan sudah memperlihatkan munculnya radikalisme beragama di Indonesia. Wahabi adalah paham yang memberikan pengaruh paling besar kala itu. Hal ini juga dijelaskan oleh Asrori²⁴ bahwa pesatnya pengaruh kaum Wahabi di Hadramayn yang kemudian para pengikutnya banyak yang

²³ Abd A'la, *Genealogi Radikalisme Muslim Nusantara Akar dan Karakteristik Pemikiran dan Gerakan Kaum Padri dalam Perspektif Hubungan Agama dan Politik Kekuasaan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada IAIN Sunan Ampel, tanggal 17 Mei 2008.

²⁴ Ahmad Asrori, *ibid*.

datang ke Indonesia, memberikan pengaruh signifikan. Kelompok yang dipengaruhi oleh Imam Maliki dan meneruskan gagasan yang dikembangkan oleh Muhammad Abdul Wahab, lebih dikenal sebagai gagasan Wahabi, memang sempat menjadi rujukan di nusantara. Tak heran banyak pengaruh kemudian hidup dan berakar, bahkan sampai sekarang.

Paham radikal di Indonesia, juga berlangsung dalam beberapa periode berikutnya, khususnya berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Gerakan DI/TII tahun 1950-an yang dipimpin oleh Kartosuwiryo bisa dikatakan adalah gerakan lanjutan yang juga mengatasnamakan agama²⁵. Peristiwa di masa pasca kemerdekaan yang kemudian berhasil ditumpas menyisakan banyak masalah dan juga benih-benih kekerasan berikutnya. Beberapa peristiwa lainnya, kendati tidak murni membawa agama, tetapi simbol-simbol beragama tetap mencuat. Peristiwa-peristiwa kekerasan semasa orde lama, terutama di tahun 1950-an hingga peristiwa G30S/PKI 1965, mau tidak mau juga masuk dalam ranah ini. Penganut paham komunis yang juga melakukan kekerasan pada dasarnya adalah sikap yang radikal mengatasnamakan ideologi. Begitu juga perlawanan kaum muslim yang juga dengan kekerasan tidak lepas dari ketersinggungan terhadap identitas keislaman.

Semasa orde baru, gelombang kekerasan dengan membawa nama agama juga tampak menguat, kendati kemudian banyak diselubungi dengan bungkus persoalan sosial politik dan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Perlawanan dilakukan terhadap pemerintah, tetapi muatan keagamaan tetap menonjol. Munculnya gerakan Komando Jihad tahun 1976, Front Pembebasan Muslim tahun 1977, dan Pola Perjuangan Revolusioner Islam di tahun 1978, adalah bentuk gerakan radikal dalam menentang pemerintah.

²⁵ Ibid.

Dalam beberapa kasus ada yang menyebutkan bahwa ini sebenarnya hanya rekayasa pihak intelijen untuk memojokkan Islam²⁶. Tetapi apapun itu, benih-benih sikap radikalisme beragama tetap muncul dan tidak pernah selesai di masyarakat.

Menguatnya kembali radikalisme di Indonesia justru muncul setelah era reformasi hadir. Agaknya, kekuatan pemerintahan orde baru mampu membendung dan meredam kehadiran ide-ide sempalan yang berhaluan keras ini. Tindakan pemerintah orde baru yang saat itu menekankan pada stabilitas dan menganggap tindakan yang melawan pemerintah sebagai sikap subversif, cukup ampuh untuk menahan kemunculan paham-paham yang radikal. Sebaliknya di euforia reformasi ternyata justru melahirkan kembali paham tersebut.

Gerakan Negara Islam Indonesia (NII), bisa dikatakan adalah bentuk gerakan yang tidak pernah surut. Kelompok ini sedikit memiliki kemiripan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yaitu memperjuangkan sebuah bentuk pemerintahan baru tetapi dengan cara-cara yang cenderung damai. Secara genealogis, gerakan ini tetap dikategorikan radikal yaitu punya keinginan untuk mengganti bentuk kenegaraan. HTI misalnya melakukan tiga tahapan dalam penyebaran ajarannya, yaitu²⁷ :

- 1) Tahap Tatsqif (pembinaan dan pengkaderan). Tahap ini untuk melahirkan orang-orang yang meyakini fikrah Hizbut Tahrir dan untuk membentuk kerangka sebuah partai.
- 2) Tahap Tafa'ul (interaksi), yaitu berinteraksi dengan umat agar mampu mengemban dakwah Islam, sehingga umat akan menjadikannya sebagai

²⁶ Ibid.

²⁷ Anzar Abdullah, *ibid*.

masalah utama dalam kehidupannya, serta berusaha menerapkannya dalam realitas kehidupan.

- 3) Tahap Istilamul Hukmi (pengambil alihan kekuasaan). Tahap ini berfungsi untuk menerapkan hukum Islam secara praktis dan totalitas, sekaligus untuk menyebar luaskan ke seluruh dunia.

Pada akhirnya pemerintah kemudian mengambil sikap tegas dan secara resmi kemudian melarang aktifitas HTI di Indonesia.

Paham radikal yang menonjol di Indonesia, terutama setelah era reformasi adalah kekerasan secara fisik dengan mengatanasnamakan agama. Kasus Bom Bali tahun 2002, adalah peristiwa perdana yang muncul ke publik, sekaligus “mengesyahkan” bahwa di Indonesia ada gerakan teroris berdasarkan agama. Memang ini tidak lepas dari bagaimana gerakan di tingkat yang lebih luas, terutama setelah peristiwa World Trade Centre di AS tahun 2001, sekaligus kemudian dicanangkannya perang melawan teroris di seluruh dunia oleh George W Bush, presiden AS kala itu.

Selepas peristiwa Bom Bali I, muncul lagi Bom Bali II. Menyusul kemudian bom Kuningan, JW Mariot, Cirebon, Surabaya, Bom Buku, Tangerang, Mako Brimob, dan berbagai peristiwa lainnya. Indonesia kemudian semakin “mengukuhkan” diri bahwa radikalisme itu tumbuh dan berkembang dengan subur.

Radikalisme keagamaan di Indonesia, ternyata tidak hanya berhubungan dengan aksi bom bunuh diri dan cap terorisme. Gesekan-gesekan antar umat beragama, ataupun tindakan-tindakan kekerasan berdasarkan agama juga banyak terjadi. Aktifitas FPI yang banyak melakukan *sweeping* terhadap tempat-tempat yang dikatakan lokasi perbuatan maksiat di berbagai daerah adalah salah satu bentuk kegiatan yang kental dengan aspek radikal. Begitu juga dengan munculnya gerakan

Majelis Mujahidin Indonesia atau Anshorud Tauhid pimpinan Abu Bakar Baasyir. Sebelumnya juga muncul aksi kekerasan yang dilakukan oleh Noodin M Top, yang mengawali semua rentetan perilaku kekerasan di Indonesia.²⁸

Selain gerakan-gerakan terstruktur yang muncul di permukaan, banyak pula kasus-kasus di masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap umat beragama. Kasus penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di beberapa daerah adalah bukti konkrit kekerasan itu sudah berlangsung di masyarakat. Penyerangan terhadap kelompok Syi'ah yang juga banyak terjadi, mengindikasikan hal yang sama. Begitu pula hubungan dengan agama lain, yang dalam beberapa hal menunjukkan eskalasi kekerasan luar biasa. Meruaknya kasus konflik beragama di Ambon, Poso, Sampit, walaupun bukan dalam bingkai paham fundamentalisme, tetapi kekerasan atas nama agama adalah bahan bakar yang meletupkannya.

Semua itu menunjukkan bahwa potensi radikalisme beragama di Indonesia sangat besar. Beberapa kasus bisa memicu dan memunculkan konflik dalam skala yang lebih luas. Heboh soal larangan azan dengan alat penguat suara, adalah salah satu bentuknya belakangan ini. Hal-hal kecil seperti ini bisa dengan mudah menjadi problem yang lebih besar.

Dalam hal ini, mengutip dari Djahary Ma'ruf²⁹ dikatakan bahwa kemunculan dan perkembangan gerakan radikal di Indonesia tidak terlepas dari pasca pergantian Orde Baru berganti menjadi Orde Reformasi, di mana masa itu terdapat banyak paham, pemikiran dan gerakan yang diekspresikan oleh organisasi keagamaan yang menunjukkan semangat keberagaman umat sebagai cerminan aktualisasi dan sekaligus keinginan kuat untuk

²⁸ Anzar Abdullah, *ibid*.

²⁹ Muhammad Harfin Zuhdi, *Radikalisme Agama dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan*, Jurnal Akademika, Volume 22, Nomor 1, Januari-Juni 2017

memperbaiki keadaan umat. Sekedar menyebut contoh beberapa ormas yang secara lantang menyuarakan ide-ide tersebut, seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Jihad. Mereka menyuarakan isu-isu agama yang cenderung keras sebagai bagian dari upaya negosiasi dalam merumuskan tatanan sosial yang baru.

Sementara analisis dari Azra³⁰ mengatakan bahwa masih berlanjutnya konflik sosial bernuansa intra dan antar agama dalam masa reformasi ini, sekali lagi, disebabkan berbagai faktor amat kompleks. Pertama-tama, berkaitan dengan euforia kebebasan, di mana setiap orang atau kelompok merasa dapat mengekspresikan kebebasan dan kemauannya, tanpa peduli dengan pihak-pihak lain. Dengan demikian terdapat gejala menurunnya toleransi. Kedua, masih berlanjutnya fragmentasi politik dan sosial di khususnya di kalangan elit politik, sosial, militer, yang terus mengimbas ke lapisan bawah (grassroot) dan menimbulkan konflik horizontal yang laten dan luas.

Dalam hal ini tampak bahwa radikalisme ataupun kekerasan atas nama agama bukanlah masalah yang sederhana, bukan hanya individu-individu semata, tetapi terkait dengan sistem sosial, politik, hukum dan kebijakan pemerintah. Tak terlepas pula disini adalah isu-isu internasional yang begitu mudahnya diakses dan cenderung menunjukkan sisi ketidakadilan. Hal-hal seperti ini menjadi masalah ketika dimaknai dan masuk dalam konteks masyarakat Indonesia, yang secara historis juga memiliki basis literal dalam pemahaman beragama³¹.

³⁰ Azyumardi Azra, *ibid*.

³¹ Mengenai hal ini bisa diperdalam dalam laporannya Sidney Jones, "Indeks Nama-nama Tertuduh Pelaku Terorisme di Asia Tenggara", Internastional Crisis Group: Working To Prevent Conflict Worldwide, Februari tahun 2005

C. Radikalisme di Kalangan Mahasiswa

Masalah radikalisme dan kekerasan atas nama agama tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum ataupun kelompok-kelompok yang memang sudah memutuskan diri untuk mengambil strategi perjuangan pada garis tersebut. Kelompok mahasiswa juga tidak luput dari paparan paham-paham tersebut. Hasil riset dari PPIM UIN Jakarta dan juga dari BNPT, sebagaimana dikutip di awal tulisan ini, menunjukkan kondisi tersebut.

Sementara itu, membahas realitas yang terjadi di kalangan mahasiswa, tentu tidak akan lepas dari bagaimana dinamika dan pergerakan organisasi kemahasiswaan itu sendiri. Aktifitas mahasiswa dalam memahami hubungan antar umat beragama, biasanya terpusat pada organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia), KAHMI, KAMMI, adalah beberapa organisasi ekstra yang memiliki basis dalam kampus. Sementara di dalam kampus sendiri terdapat Lembaga Dakwah Kampus (LDK), dan berbagai UKM-UKM. Tidak semuanya memiliki haluan radikal atau tidak semuanya yang dalam aktifitasnya membolehkan perilaku kekerasan, tetapi terdapat pula yang memang tidak melarang perilaku radikal secara fisik dalam perjuangannya. Yang menonjol sebenarnya adalah radikal dalam berpikir tetapi *soft* dalam gerakan.

Syaifuddin³² mengatakan bahwa munculnya radikalisme di kalangan mahasiswa tidak lepas dari masalah ideologi. Faktor ideologi merupakan penyebab terjadinya perkembangan radikalisme di kalangan mahasiswa. Secara teoretis, orang yang sudah memiliki bekal pengetahuan setingkat mahasiswa apabila memegang keyakinan yang radikal pasti sudah melalui

³² Syaifuddin, *Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa, Sebuah Metamorfosa Baru*, Jurnal Analisis, Volume XI, No.1, Juni 2011

proses *mujadalah* atau tukar pendapat yang cukup lama dan intens sehingga pada akhirnya mahasiswa tersebut dapat menerima paham radikal. Pendapat Syaifuddin ini jelas berdasarkan asumsi bahwa kalangan mahasiswa semestinya adalah kelompok yang sudah memiliki tingkat kecerdasan tinggi dan terbiasa dengan tukar pendapat dalam memahami sesuatu. Syaifuddin juga menegaskan bahwa radikalisme di kalangan mahasiswa tidak lepas dari hubungan mereka dengan pihak luar kampus yang kemudian mampu menanamkan ideologi tersebut.

Beberapa hasil riset sebelum ini menunjukkan bawa radikalisme di kalangan mahasiswa sebenarnya lebih rentan terjadi kampus perguruan tinggi umum (PTU) ketimbang perguruan tinggi yang berbasis agama seperti STAIN, IAIN, dan UIN. Riset dari Litbang Departemen Agama tahun 1996 pada empat perguruan tinggi sekuler yakni UI, UGM, Unair dan Unhas terjadi peningkatan aktivitas keagamaan di sejumlah kampus-kampus tersebut, bahkan disebutkan bahwa kampus-kampus tersebut menjadi tempat yang paling potensial berkembangnya aktivitas keislaman (religius) yang cenderung eksklusif dan radikal. Disebutkan juga bahwa jika kemudian terjadi pergeseran kampus-kampus berbasis keagamaan, maka ini dapat membuktikan dua hal. *Pertama*, telah terjadi perubahan di dalam perguruan tinggi berbasis keagamaan itu sendiri. *Kedua*, telah terjadi metamorfosa bentuk dan strategi gerakan di internal gerakan-gerakan radikal.³³

Secara umum radikalisme beragama di kalangan mahasiswa selalu terikat dengan berbagai paham di luar. Dalam analisisnya, Nurudin³⁴ mengatakan bahwa kampus telah menjadi target khusus untuk operasi rekrutmen simpatisan berbagai gerakan. Banyak mahasiswa, tiba-tiba,

³³ Ibid.

³⁴ Nurudin, Basis Nilai-Nilai Perdamaian: Sebuah Antitesis Radikalisme Agama di Kalangan Mahasiswa, Jurnal Harmoni, September-Desember 2013.

menghilang dengan membawa sejumlah aset keluarga, untuk kemudian terjebak dalam lingkaran aksi paham keagamaan radikal dan eksklusif. Ringkasnya, kampus dan civitas akademika, terutama mahasiswa, baik kampus perguruan tinggi yang berlabel agama, atau kampuskampus umum, sungguh tidak steril, dan kebal dari jangkauan paham keagamaan fundamentalis dan radikal. Gerakan yang dimaksudkan oleh Nurudin disini adalah NII (Negara Islam Indonesia). Fenomena NII memang menjadi sebuah mata rantai lain dalam melihat aktifitas gerakan kemahasiswaan.

Nurudin juga mensinyalir dari beberapa lembaga survey yang melakukan riset tentang paham radikal di kalangan mahasiswa. Hasil survei Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Muhammadiyah Dr Hamka (Uhamka) Jakarta, menunjukkan bahwa sebagian besar (77 %) responden muslim di Jakarta ternyata mengidealisasikan hukum syariah sebagai hukum positif bagi umat Islam (*Laporan Penelitian, Ancaman bagi Ideologi Negara melalui Radikalisme Agama, 2011*). 76 persen responden merindukan kehadiran negara Islam yang menerapkan hukum Islam. Gejala ini bisa saja berujung pada aksi radikal sebagai manivestasi kesadaran dan harapan ideologis di ranah politik. Selanjutnya Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga menemukan fakta yang tidak jauh berbeda dengan temuan survei Lemlit Uhamka. Survei LSI 2011 dengan sampel nasional yang representatif (dengan kesalahan pencuplikan ≤ 3 persen) menemukan fakta bahwa lebih dari separo (56 %) responden remaja muslim (pelajar SMU) setuju dengan gagasan penerapan hukuman *qishosh* mati bagi pembunuh; 69 persen setuju hukuman cambuk diterapkan untuk pemabuk, dan 49 persen menyatakan setuju terhadap gagasan penerapan hukuman potong tangan bagi pencuri. Begitu juga hasil penelitian Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP), tahun 2011 lebih jauh menemukan fenomena lain dari radikalisasi

cara beragama. Penelitian ini melibatkan 590 responden dari total 2.639 guru pendidikan agama Islam (PAI) di SMA dan 993 siswa muslim dari total 611.678 murid SMU se-Jabodetabek. Terkait dengan kasus toleransi, penelitian ini menemukan fakta bahwa 63 persen responden guru PAI, dan 49 persen siswanya keberatan jika rumah ibadat umat beragama lain didirikan di wilayah tempat tinggal mereka³⁵.

Sementara itu, data dari BIN menyebutkan bahwa 39% mahasiswa di Indonesia telah terpapar radikalisme. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala BIN, Budi Gunawan, yang mengatakan bahwa radikalisme itu setidaknya tampak pada 15 kampus di Indonesia. Data ini berdasarkan kajian BIN di tahun 2017³⁶. Hal yang juga menarik adalah survey dari PPIM UIN Jakarta tahun 2017, yang menunjukkan data bahwa sebanyak 51,1% mahasiswa memiliki opini intoleran terhadap minoritas muslim, sebanyak 34,3% memiliki opini intoleran terhadap agama lain. Lebih parah lagi, 58,5% responden mengaku memiliki opini keagamaan yang radikal³⁷.

Data-data di atas cukup untuk menunjukkan bahwa radikalisme di kalangan mahasiswa memang sudah terjadi dan banyak mahasiswa yang sudah terpapar. Justifikasi bisa diberikan bahwa wilayah kemahasiswaan bukanlah ruang yang kebal atau imun terhadap paham-paham radikal dalam segala bentuknya. Radikal yang dimaksud disini bukan semata-mata punya keinginan untuk melakukan aksi bom bunuh diri, tetapi juga berhubungan dengan pandangan tentang NKRI, khilafah, demokrasi, dan penghargaan terhadap

³⁵ Ibid.

³⁶<https://news.okezone.com/read/2018/04/28/337/1892469/bin-39-persen-mahasiswa-terpapar-paham-radikal>

³⁷<https://tirto.id/survei-uin-jakarta-intoleransi-tumbuh-di-banyak-sekolah-dan-kampus-czQL>

kelompok lain yang berbeda. Dalam bahasa Ghifarie³⁸, radikalisme disebutkan sebagai sikap jiwa yang membawa kepada tindakan-tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan politik mapan dan biasanya dengan cara-cara kekerasan dan menggantinya dengan sistem baru. Lebih terinci lagi, istilah radikal mengacu pada gagasan dan tindakan kelompok yang bergerak untuk menumbangkan tatanan politik mapan; negara-negara atau rezim-rezim yang bertujuan melemahkan otoritas dan legitimasi negara-negara dan rezim-rezim lain; dan negara yang berusaha menyesuaikan atau mengubah hubungan-hubungan kekuasaan yang ada dalam sistem internasional.

Pada konteks ini bisa dikatakan bahwa radikalisme di kalangan mahasiswa tidaklah sebatas pada pemahaman sempit semata, namun terpaut dengan berbagai perkembangan lainnya di luar kampus ataupun di luar negeri. Sikap peka mereka terhadap berbagai masalah nasional maupun internasional, menjadi salah satu pemicu munculnya gerakan ini.

Dalam bahasa lain, sebenarnya cukup banyak pintu masuk paham radikal ke mahasiswa. Radikalisme agama juga masuk melalui deprivasi politik, sosial dan ekonomi. Pada saat bersamaan, disorientasi dan dislokasi sosial budaya, ekses globalisasi, dan semacamnya menjadi tambahan faktor penting bagi kemunculan kelompok „fundamentalis radikal“. Kelompok ini tidak jarang mengambil bentuk kultus (cult), yang sangat eksklusif, tertutup dan berpusat pada seseorang yang dipandang kharismatik. Kelompok-kelompok ini dengan dogma eskatologis tertentu bahkan memandang dunia sudah menjelang akhir zaman dan kiamat; sehingga waktunya bertobat melalui pemimpin dan kelompok mereka³⁹.

³⁸ Imam Fauzi Ghifarie, Teologi Hakimiyah, Benih Radikalisme Islam, Jurnal Islam Realitas Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2016

³⁹ Ibid.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI

PENELITIAN

Dipilihnya objek penelitian pada lima UIN yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Antasari Banjarmasin, UIN Alauddin Makassar, dan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, didasarkan pada beberapa alasan utama. *Pertama*, dari aspek perubahan IAIN ke UIN, khususnya yang pertama menjadi UIN. *Kedua*, perkembangan masing-masing UIN, dimana terdapat UIN yang secara tidak tertulis sudah menjadi barometer perkembangan UIN lain di Indonesia. Setidaknya ini terlihat dari banyak alumnus UIN tersebut menjadi dosen atau karyawan di berbagai UIN lain. *Ketiga*, dari sisi kasus radikalisme sendiri yang memang beberapa UIN terlihat ada riak-riak. *Keempat*, dari sisi lokasi dimana masing-masing UIN bisa merepresentasikan karakteristik daerahnya, kendati tentu tidak bisa menggeneralisir secara metodologis keseluruhan UIN di lokasi tersebut. Misalnya, dipilihnya UIN Riau, bukan dalam arti mewakili seluruh UIN di Sumatera, tetapi karena memang di Riau pernah terjadi kasus-kasus terindikasi kekerasan beragama oleh mahasiswanya. Begitu juga, dipilihnya UIN Antasari Banjarmasin bukan karena ingin menggenerasilir PTAI di Kalimantan, tetapi memang untuk wilayah Kalimantan, baru Banjarmasin yang sudah bertransformasi menjadi UIN. Hal yang sama juga berlaku untuk UIN Alaudin Makassar. Pilihan ini

lebih karena memang UIN Alaudin kerap dijadikan sebagai acuan bagi pendidikan tinggi keagamaan khususnya di wilayah Indonesia Timur. Sementara UIN Jakarta sudah bisa dikatakan sebagai barometer UIN lain, disamping karena posisinya di ibukota negara, juga karena banyak intelektual yang memberikan pengaruh besar bagi paham keagamaan di Indonesia, lahir dari UIN Jakarta. Sementara UIN Yogyakarta, dipilih karena karakteristik kejawaan dan kultur masyarakat Jawa, serta dalam beberapa hal, banyak kasus mencuat di wilayah ini.

Pembahasan berikut ini akan menggambarkan apa dan bagaimana masing-masing lembaga pendidikan tinggi tersebut. Data-data yang dijelaskan pada bagian ini, sebagian besar bersumber dari data primer yang diproduksi oleh masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu, sumber data banyak berasal dari website masing-masing UIN.

A. UIN Syarif Hidayatullah (website : www.uinjkt.ac.id)



Di tingkat nasional, kiranya sudah ada pengakuan secara tidak tertulis pada PTAI ini, bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah barometer jika ingin melihat bagaimana perkembangan UIN di Indonesia. Ini tidak bisa dipungkiri karena memang banyak alumnus UIN ini yang kemudian berkiprah di PTAI lainnya di Indonesia. Selain itu, PTAI ini banyak melahirkan berbagai cendekiawan muslim besar yang sudah berkiprah baik di tingkat nasional hingga internasional. Nama Prof. H. Mahmud Yunus, Prof. Harun Nasution, Prof. Azyumardi Azra dan Prof. Komaruddin Hidayat (mantan Rektor UIN Jakarta), bisa dikatakan sudah menjadi salah satu ikon pandangan keagamaan di Indonesia dan dunia. Selain itu, intelektual-intelektual muda terus diproduksi dan lahir dari kampus yang beralamat di kawasan Ciputat, Banten ini.

Sejarah Singkat

Pengambilan nama Syarif Hidayatullah bagi UIN ini memiliki alasan historis tersendiri. Dikutip dari situs PTAI ini, dipilihnya nama tersebut karena ia merupakan nama asli dari salah satu Walisongo, sembilan penyiar Islam di Pulau Jawa, yakni Sunan Gunung Jati yang berperananan besar dalam pengembangan Islam di Sunda Kelapa.

Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) lahir di negeri Arab pada 1448 M dan wafat di Cirebon pada 1568 M. Ia adalah putra Nyai Rara Santang (putri Prabu Siliwangi dari Pajajaran) dengan Syarif Abdullah. Gelar-gelar yang diberikan kepadanya adalah Muhammad Nuruddin, Syekh Nurullah, Sayyid Kamil, Maulana Syekh Makhdum Rahmatullah, dan Makhdum Jati. Setelah mangkat ia diberi gelar Sunan Gunung Jati.

Setelah menginjak dewasa, Syarif Hidayatullah pulang ke Padjadjaran dan menjadi penguasa Cirebon. Sejak itu ia berperan dalam

menyiarkan Islam di Jawa, terutama bagian barat. Belakangan ia menempatkan putranya, Maulana Hasanuddin, menjadi dai sekaligus penguasa di Banten. Pada 1527 M, atas bantuan Falatehan (Fatahillah), dia berhasil menguasai Sunda Kelapa setelah mengusir pasukan Portugis yang dipimpin oleh Fransisco de Sa.

Syarif Hidayatullah melakukan dakwah langsung kepada pemimpin masyarakat dan bangsawan setempat dengan cara yang bijaksana. Ia mulai dengan memberikan pengetahuan ajaran Islam atau tazkirah tentang Islam dan peringatan yang lemah lembut. Ia bertukar pikiran dari hati ke hati dengan penuh toleransi. Apabila cara ini tidak berhasil, maka ia menempuh cara berdebat atau mujadalah. Cara terakhir ini diterapkan terutama kepada orang-orang yang secara terang-terangan menunjukkan sikap kurang setuju terhadap Islam. Metode dakwah yang dipergunakan oleh Syarif Hidayatullah telah berhasil menarik simpati masyarakat.

Ia juga sering membantu rakyat miskin dan menderita, baik secara moril maupun materil. Ia bergaul dengan bahasa rakyat, sehingga ajarannya dapat dengan mudah diterima. Syarif Hidayatullah tidak menentang secara tajam agama, kepercayaan, dan adat istiadat penduduk setempat. Sebaliknya ia memperlihatkan keindahan dan kesederhanaan Islam. Yang dilakukannya adalah menunjukkan kelebihan Islam dan persamaan derajat di antara sesama manusia.

Tampak bahwa dari sisi riwayatnya, Syarif Hidayatullah adalah sosok yang moderat dan selalu mampu beradaptasi dengan komunitas setempat. Pendekatan budaya dan menyesuaikan dengan tradisi yang berkembang adalah ciri khasnya. Hal ini jugalah yang menjadi alasan filosofis mengangkat nama Syarif Hidayatullah sebagai nama UIN.

Pada pendiriannya, keberadaan UIN ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana dinamika dan pertumbuhan pendidikan keagamaan lainnya di Indonesia. Embrio UIN Jakarta dapat ditelusuri dari pendirian Pesantren Luhur (pada masa menjelang kemerdekaan), Sekolah Tinggi Islam di Padang dan di Jakarta Tahun 1946, Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta, serta pendirian Akademi Dinas Departemen Agama (ADIA) tahun 1957 di Jakarta hingga menjadi UIN Syarif Hidayatullah sekarang.

Pendirian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berawal dari dibentuknya Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) sebagai Akademi Dinas Departemen Agama pada tanggal 1 Juni 1957, sesuai Ketetapan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1957. Pendirian ADIA ini dimaksudkan untuk mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri guna mencapai ijazah pendidikan akademi dan semi akademi agar menjadi ahli didik agama pada Sekolah Menengah Umum, Sekolah Kejuruan dan Sekolah Agama. Pada awal berdirinya, ADIA menempati kampus Universitas Islam Jakarta (UIJ) di Jalan Madura dan tahun kedua di Jalan Limau Kampus UHAMKA sekarang. Pada tahun ketiga baru menempati kampus di Ciputat yang disebut Kultur Sentrum (KS); kampus UIN sekarang. Pada saat itu ADIA mempunyai 43 orang mahasiswa yang terbagi ke dalam dua jurusan, yakni: Jurusan *Syariat* (Pendidikan Agama), dan Jurusan *Lughat al Arabiyah* (Jurusan Bahasa Arab) dan satu Jurusan Khusus untuk Imam Tentara dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, ditambah dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai pengantar mata kuliah Umum

Sesuai dengan fungsinya sebagai akademi dinas maka mahasiswa yang mengikuti kuliah pada ADIA itu terbatas pada mahasiswa yang memperoleh tugas belajar yang terdiri dari: Pegawai/Guru Agama di

lingkungan Departemen Agama dari berbagai daerah seluruh Indonesia yang masuk berdasarkan seleksi. Pimpinan ADIA pada saat itu adalah Prof.Dr.H.Mahmud Yunus sebagai Dekan dan Prof. H. Bustami A.Gani sebagai Wakil Dekan. Hari jadi ADIA ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi atau Dies Natalis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam perkembangan selanjutnya, Tahun 1960 berdasarkan PP No II Tahun 1960 tanggal 24 Agustus 1960 ADIA bergabung dengan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam) yang berada di Yogyakarta menjadi IAIN *al Jamiah al Hukumiyah*. Diresmikan oleh Menteri Agama dalam suatu upacara di Gedung Kepatihan Yogyakarta pada tanggal 24 Agustus 1960 (2 *Rabiul Awwal 1380 H*).

ADIA menjadi IAIN cabang Jakarta dengan dua fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Adab dengan Prof.Dr.H. Mahmud Yunus sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Prof.H.Bustami A.Gani sebagai Dekan Fakultas Adab.

Setelah menjadi IAIN cabang Jakarta, mahasiswanya tidak lagi terdiri dari mahasiswa ikatan dinas (Pegawai tugas belajar) saja tetapi juga menerima mahasiswa bebas. Sehingga jumlah mahasiswa meningkat menjadi 282 orang.

Pada tahun 1962 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No 66 Tahun 1962 Tanggal 15 Nopember 1962 dibuka Fakultas Ushuluddin yang merupakan metamorfosis dari Jurusan Da'wah wal Irsyad (Jurusan Imam Tentara) dengan Dekannya Prof.HM.Toha Yahya Umar dan diresmikan oleh Menag RI KH. Syaifuddin Zuhri dengan kuliah pertama berlangsung di Masjid Al Azhar.Seiring dengan dibukanya Fakultas Ushuluddin IAIN Cabang Jakarta kemudian berdiri sendiri menjadi IAIN *al Jamiah al Hukumiyah* Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam Putusan Pemerintah No II Tahun 1960 disebutkan bahwa tujuan pembentukan IAIN adalah memberikan pengajaran tinggi dan menjadi pusat untuk mengembangkan dan memperdalam Ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Diharapkan dengan mempertinggi taraf pendidikan dalam lapangan agama dan ilmu pengetahuan Islam berarti mempertinggi pula tarap kehidupan bangsa Indonesia dalam lapangan kerohanian dan intelektualisme. IAIN diharapkan menjadi lembaga *social* dan *academic expertation*.

Mengingat perkembangannya yang pesat dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1963 bahwa IAIN yang telah mempunyai tiga fakultas maka dianggap telah mampu untuk berdiri sendiri, maka dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1963 tanggal 25 Februari 1963 IAIN cabang Jakarta menjadi IAIN al Jamiah al Hukumiyah Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pelantikan Prof.Drs.H. Sunardjo sebagai Rektor IAIN Jakarta pada tahun 1963 juga mengukuhkan IAIN Jakarta menjadi Koordinator Fakultas di Jakarta Raya, Jawa Barat dan Sumatera (Dalam perkembangannya, cabang-cabang IAIN Jakarta ini kemudian satu persatu berdiri sendiri menjadi IAIN maupun STAIN).

Pada Tahun 1988, dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama RI No. 15 Tahun 1988, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdiri dari fakultas-fakultas: Tarbiyah, Adab, Ushuluddin, Syariah, Dakwah di Jakarta dan Fakultas Tarbiyah di Pontianak.

Dalam perkembangan Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden RI No.11 tahun 1997 tentang Perubahan Status Fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka Fakultas Tarbiyah

Pontianak berdiri sendiri sebagai STAIN Pontianak dan IAIN Jakarta tidak lagi mempunyai kelas jauh diluar kampus Ciputat.

Pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Harun Nasution (1973-1984) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dikenal sebagai Kampus Pembaharuan, karena beliau banyak mengadakan pembaharuan-pembaharuan dalam Pemikiran Islam dengan pemikiran-pemikirannya yang rasional, bahkan cenderung controversial (pada saat itu mengundang reaksi masyarakat). Seperti masuknya mata kuliah filsafat dalam kurikulum IAIN Jakarta dan pengiriman dosen-doden IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke Barat. Pada masa ini juga IAIN Jakarta menyelenggarakan Program Pascasarjana (PPs) pertama di lingkungan IAIN seluruh Indonesia.

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai salah satu IAIN tertua di Indonesia, dan bertempat di Ibu kota Jakarta, juga menempati posisi unik dan strategis, tidak hanya sebagai Jendela Islam di Indonesia, tetapi juga simbol bagi kemajuan pembangunan nasional khususnya di bidang pembangunan keagamaan oleh karena itu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak pernah berhenti berkembang untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang terkemuka.

Langkah pengembangan ini mulai diintensifkan pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Azyumardi Azra MA. Tahun 1988 dengan konsep IAIN *with wider mandate* atau IAIN dengan mandat yang lebih luas menjadi dasar menuju terbentuknya Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .

Pada tahun akademik 1998/1999. dibuka jurusan Psikologi dan Matematika pada Fakultas Tarbiyah serta jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam pada Fakultas Syariah. Tahun akademik 2000/2001 dibuka Program Studi Konversi IAIN menjadi UIN yang terdiri dari Program Studi

Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian), Sistem Informasi, Teknik Informatika, Manajemen dan Akuntansi.

Tahun Akademik 2001/2002 jumlah Fakultas bertambah dengan dibukanya Fakultas Psikologi (metamorfosis dari jurusan Psikologi pada Fakultas Tarbiyah) dan Fakultas Dirasah Islamiyah (kelas khusus dengan sistem Al Azhar) . Pembukaan program studi baru tersebut, terutama program studi ilmu-ilmu umum merupakan langkah yang signifikan dan merupakan salah satu upaya menuju perubahan IAIN Jakarta menjadi universitas.

Upaya ini mendapat rekomendasi pada tahun 2001 dengan ditandatanganinya Surat Keputusan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 4/U/KB/2001 dan Menteri Agama RI Nomor 500/2001 tanggal 21 Nopember 2001 tentang perubahan IAIN menuju UIN.

Pada tahun itu juga 12 Program Studi Sosial dan Eksakta (Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi, Manajemen, Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian) Psikologi, Bahasa dan Sastra Inggris, Ilmu Perpustakaan, Matematika, Kimia, Fisika dan Biologi mendapat Rekomendasi/Izin Operasional dari Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Nomor : 088796/MPN/2001 tanggal 22 Nopember 2001.

Pada tahun selanjutnya Rancangan Keppres tentang Perubahan Bentuk IAIN menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mendapat Rekomendasi dan Pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI dan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor 02/M-PAN/I/2002 tanggal 9 Januari 2002 dan Nomor S-490/MK-2/2002 tanggal 14 Februari 2002, dan ini menjadi dasar bagi perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta resmi menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan terbitnya Keputusan Presiden RI No. 031 Tanggal 20 Mei 2002. Keppres itu menjadi landasan legalitas formal perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Syahid).

UIN Syahid pada saat itu terdiri dari 9 fakultas yaitu: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Ushuludin dan Filsafat, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Dirasat Islamiyah, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan jumlah jurusan/prodi sebanyak 41 dengan bidang studi ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama.

Dengan perubahan ini UIN Syahid diharapkan dapat mendorong terjadinya integrasi keilmuan baik dalam bidang agama, kemanusiaan, keindonesiaan dengan tujuan menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan integratif, adaptif, responsif dan inovatif terhadap pemikiran modern dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi dengan landasan iman, ilmu dan amal yang menjadi dasar pijakan dalam pengembangan ilmu-ilmu Islam, baik ilmu-ilmu Quraniyah maupun ilmu-ilmu Kauniyah.

Kerangka itu pula yang mendasari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pemberian gelar kesarjanaan sesuai dengan Keputusan Rektor No. 16 Tahun 2002. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studinya di Program S1, S2, S3 berhak mendapat gelar sesuai dengan program studinya. Dengan demikian lulusan UIN Syahid berada pada posisi yang sama dengan lulusan universitas-universitas negeri yang lain di Indonesia.

Sebagai Universitas Islam Negeri yang sejajar dengan Universitas Negeri lainnya di Indonesia, mulai Tahun akademik 2003/2004 dalam penerimaan mahasiswa baru disamping penerimaan secara lokal, UIN Syarif Hidayatullah juga masuk dalam SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) yang bertarap Nasional. Dengan demikian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara tidak langsung sudah mendapat pengakuan secara nasional dan internasional. Pengakuan ini menjadi modal dasar membangun menuju internasionalisasi dan globalisasi dalam kerangka universitas riset yang unggul dan kompetitif (*Leading Towards Research University*).

Langkah untuk mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum juga mendasari pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) pada tahun akademik 2004/2005. Pendirian FKIK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama SK No.MA/25/2004 dan surat Dirjen Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional No. 995/D/6/2004.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pada Tahun akademik 2004/2005 UIN Jakarta membuka Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat berdasarkan izin operasional Dirjen Dikti No. 1338/D/P/2004 tanggal 12 April 2004 dan Program Studi Farmasi dengan izin operasional No 138/D2.2/2004 tanggal 6 Agustus 2004 dan Surat Keputusan Dirjen Bagais Depag No. Dj.11/274/2004 tanggal 8 Agustus 2004.

Sedangkan untuk program studi Pendidikan Dokter dan Program Studi Keperawatan dibuka pada tahun akademik 2005/2006 berdasarkan izin operasional Dirjrn Dikti no.1356/D/T/2005 tanggal 10 Mei 2005 dan Surat Keputusan Dirjen Bagais Nomor:Dj.II/123/2005 tanggal 17 Mei 2005.

Pendirian FKIK ini bekerjasama dengan FK UI sebagai Fakultas Pembina. Sebelumnya juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah

mengadakan kerjasama untuk mendukung pendirian FKIK dengan berbagai pihak, di antaranya dengan sejumlah rumah sakit di wilayah Jakarta dan Tangerang sebagai tempat praktek bagi mahasiswa.

Komitmen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi universitas riset ini adalah untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, baik dalam ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum, dengan menempatkan kemampuan meneliti sebagai kualifikasi utama dalam setiap kinerja ilmiah akademis. Karena sebagai Universitas Riset, kemampuan penelitian menjadi kualifikasi utama dalam setiap penampilan.

Dengan berbasis riset, diharapkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat memiliki daya tarik bagi mahasiswa terutama bagi mahasiswa tingkat magister dan doktor dari berbagai penjuru dunia sehingga tercipta *academic, social cultural exchange* yang pada gilirannya membentuk *intellectual community dan learning society* dengan berkemampuan riset dan analisis yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang profesional dalam *spectrum* yang lebih luas dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta siap go internasional dan menjadi Universitas International. dan menjadi Jendela Keunggulan Akademis Islam Indonesia (*Window of Academic Excellence of Islam in Indonesia*) seperti yang diharapkan oleh tokoh-tokoh pejuang pendidikan Islam.

Visi Misi dan Tujuan

Sebagai sebuah PTAI yang menjadi barometer bagi perkembangan pendidikan tinggi agama di Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah dituntut untuk mampu bersaing pada tataran dunia internasional. Oleh karena itu, capaian atau mimpi besar PT ini juga harus melangkah jauh ke depan,

bersaing ke kancah global. Hal ini kemudian tergambar dalam visi misi dan tujuan yang ditetapkan.

Visi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi universitas kelas dunia dengan keunggulan integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan.

Misi

1. Melakukan reintegrasi keilmuan pada tingkat ontologi, epistemologi dan aksiologi sehingga tidak ada lagi dikhotomi anatar ilmu umum dan ilmu agama;
2. Memberikan landasan moral terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan melakukan pencerahan dalam pembinaan iman dan taqwa (Imtaq) sehingga Iptek dan Imtaq dapat sejalan;
3. Mengartikulasikan ajaran Islam secara ilmiah akademis kedalam konteks kehidupan masyarakat, sehingga tidak ada lagi jarak antara nilai dan perspektif agama dengan sofisme masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan mengembangkan aspek keislaman, keilmuan, kemanusiaan, kemoderenan, dan keindonesiaan;
5. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian yang bermanfaat untuk kepentingan ilmu dan masyarakat;
6. Membangun tata kelola Universitas yang baik dan manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya perguruan tinggi sehingga menghasilkan pelayanan prima kepada sivitas akademika dan masyarakat;
7. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan lembaga regional, nasional, dan internasional;

8. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktifitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Tujuan

1. Menghasilkan sarjana (lulusan) yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global;
2. Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara dan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, profesi, dan atau vokasi yang kompetitif serta dapat mengembangkan ilmu agama Islam, sains dan teknologi, serta seni;
3. Menyebarkan ilmu agama Islam, sains dan teknologi, serta seni yang dijiwai oleh nilai keislaman, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya budaya nasional.

Tampak bahwa dari visi, misi, dan tujuan, ada unsur moderat dan penghargaan terhadap keragaman di masyarakat. UIN Jakarta seakan ingin menasbihkan diri sebagai PT yang mengusung keislaman sebagai sesuatu yang berguna bagi semua makhluk, dan itu harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Ia bukan lagi slogan, tapi betul-betul sudah terapkan ke dalam kurikulum dan seluruh aspek kegiatan yang dilakukan. Visi misi dan tujuan menggambarkan secara konkrit capaian-capaian yang dimaksud.

Fakultas, Jurusan, Dosen dan Jumlah Mahasiswa

UIN Syarif Hidayatullah memiliki 11 fakultas untuk program sarjana dengan 59 jurusan. Kesebelas fakultas ini adalah:

1. Tarbiyah dan Keguruan
2. Adab dan Humaniora
3. Syariah dan Hukum
4. Sains dan Teknologi
5. Ushuludin
6. Ilmu Dakwah dan Komunikasi
7. Dirasat Islamiyah
8. Psikologi
9. Ekonomi dan Bisnis Islam
10. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
11. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Selain itu juga memiliki Program Doktor dan Program Magister dengan fokus pada Program Studi Pengkajian Islam yang memiliki 26 peminatan, baik untuk katagori kosentrasi khusus ataupun lintas disiplin. Program ini berada di bawah naungan Sekolah Pascasarjana. UIN ini juga memiliki program pendidikan profesi yang dikhususkan bagi lulusan S1 untuk memperoleh keahlian tertentu dibidang profesinya. Program unggulan lainnya adalah Program Internasional.

Pada saat ini (2018), total jumlah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah adalah 28.391 orang yang tersebar di semua jurusan yang ada. Melihat angka ini, tampak bahwa peminat untuk melanjutkan studi di universitas ini sangat tinggi. Hal ini kemudian berbanding pula dengan daya tampung yang sangat terbatas. Bisa dilihat bawa daya tampung tahun 2018 hanya 5.268 orang, sementara peminat yang ikut seleksi mencapai 33.835 orang. Sebuah angka yang sangat tinggi jika dilihat dari persaingan untuk masuk ke perguruan tinggi ini. Sebaran mahasiswa juga berasal dari berbagai latar belakang bervariasi, baik asal daerah maupun latar belakang

pendidikan. Untuk asal daerah, mahasiswa di UIN Jakarta berasal dari hampir semua wilayah Indonesia, dan bahkan dari luar negeri. Begitupun latar belakang pendidikan, berasal dari pendidikan keagamaan maupun pendidikan umum.

Sementara untuk dosen sendiri, UIN Jakarta memiliki klasifikasi dosen yaitu dosen tetap institusi dan dosen tidak tetap institusi. Total jumlah dosen tetap institusi berjumlah 955 orang yang terbagi atas 67 orang bergelar Guru Besar, 220 lektor kepala dan sisanya Lektor serta Asisten Ahli. Sementara untuk dosen tidak tetap institusi berjumlah 19 orang.

Organisasi Kemahasiswaan

Aktifitas kemahasiswaan di kampus yang berlokasi di kawasan Ciputat, Tangerang ini cukup dinamis. Kegiatan mahasiswa biasanya terpusat pada UKM-UKM yang dalam pengelolaannya berada di bawah pembinaan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, serta di tingkat fakultas berada di bawah binaan Wakil Dekan bidang kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan ini terbagi atas organisasi di level universitas, fakultas, serta tingkat jurusan atau program studi. Berikut adalah organisasi kemahasiswaan tingkat universitas yaitu :

1. Senat Mahasiswa Universitas (SEMA)
2. Dewan Mahasiswa Universitas (DEMA)
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), terdiri dari:
 - a. Lembaga Dakwah Kampus (LDK)
 - b. Himpunan Qari-Qari'ah Mahasiswa (HIQMA)
 - c. Lembaga Pers Mahasiswa (INSTITUT)
 - d. TEATER SYAHID
 - e. Paduan Suara Mahasiswa (PSM)

- f. Federasi Olah raga Mahasiswa (FORSA)
- g. Kelompok Pencinta Alam-Arti Keagungan dan Keindahan Alam (KPA-ARKADIA)
- h. PRAMUKA
- i. Resimen Mahasiswa (MENWA)
- j. Komunitas Musik Mahasiswa-Ruang Inspirasi Atas Kegelisahan (KMM-RIAK)
- k. Korps Suka Rela – Palang Merah Indonesia (KSR-PMI)
- l. Koperasi Mahasiswa (KOPMA)
- m. Kelompok Mahasiswa Lingkungan Hidup Kemahasiswaan (KMPLHK)/Kembara Insani Ibnu Battutah (RANITA)
- n. Bahasa Foreign Languages Association (BAHASA FLAT)
- o. Komunitas Mahasiswa Fotografi (KMF) KALACITRA

Sementara untuk tingkat fakultas dan jurusan, dibentuk masing-masing Himpunan Mahasiswa Fakultas dan pada level Jurusan. Selain itu terdapat juga organisasi ekstrakampus yang memiliki basis anggota di mahasiswa, seperti HMI dan PMII. Aktifitasnya tetap berlangsung bersama mahasiswa, namun tetap dalam pengawasan dan pembinaan pihak universitas. Pada tingkat alumni terdapat organisasi khusus yaitu Ikatan Alumni UIN (IKALUIN). Organisasi ini mewadahi semua alumnus UIN Syarif Hidayatullah dan memiliki program-program khusus yang rutin diadakan setiap tahunnya.

Lembaga Non Struktural Universitas

Selain lembaga dan unit yang masuk dalam struktur organisasi universitas atau masuk dalam statuta UIN, terdapat pula beberapa lembaga non struktural, yang dalam beberapa hal menjadi ujung tombak UIN dalam

berinteraksi dengan berbagai isu dan perkembangan sosial politik di masyarakat. Aktifitas lembaga ini ternyata semakin mampu memperkokoh dan menguatkan posisi UIN Jakarta sebagai perguruan tinggi yang akan menuju World Class University. Beberapa lembaga tersebut adalah :

1. Kopertais wilayah I, yang berfungsi sebagai pembinaan PTAI swasta di wilayah Jakarta
2. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), yang merupakan lembaga riset dan publikasi dengan fokus utama adalah pada Asia Tenggara sebagai *area mainstream*.
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), lembaga yang fokus bagi pengembangan kualitas SDM dosen dan tenaga kependidikan.
4. Pusat Konsultasi Hukum dan HAM, yang khusus memberikan layanan hukum kepada masyarakat
5. Pusat Pengembang Pengajaran dan Pembelajaran, lembaga yang khusus melakukan pembinaan pada dosen terkait sistem pembelajaran
6. Pusat Kajian Filsafat, yang merupakan sentra pemikiran filsafat di UIN Jakarta
7. Pusat Pengembangan Sains dan Teknologi, sebagai lembaga yang memfokuskan pada pengembangan sainstek.
8. Pusat Layanan Psikologi
9. Radio dan Televisi Dakwah dan Komunikasi
10. Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta, sebuah yayasan yang khusus diperuntukkan untuk membantu keluarga besar UIN Syarif Hidayatullah
11. Badan Urusan Peribadatan dan Dakwah, yang khusus mengatur soal peribadatan dan mekanisme dakwah di UIN Jakarta

12. Madrasah Pembangunan, sebuah lembaga pendidikan dasar dan menengah yang juga menjadi laboratorium FITK
13. Taman Kanak-Kanak Ketilang
14. UIN Jakarta Press
15. Social Trust Fund, sebuah program yang dibuat untuk memberikan fasilitas dan kemudahan bagi kaum dhuafa dan masyarakat kecil untuk mengenyam pendidikan di UIN Jakarta.
16. Pusat Studi Betawi, sebuah pusat kajian yang khusus membahas soal budaya dan tradisi Betawi.

Setiap lembaga tersebut merupakan bentukan yang ditujukan sebagai penunjang dan penopang kegiatan universitas secara keseluruhan. Baik mahasiswa, dosen maupun unsur lainnya bisa memanfaatkan lembaga tersebut secara maksimal sesuai dengan peminatan masing-masing.

B. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (website : www.uinsuka.ac.id)



Cikal bakal pendirian UIN Sunan Kalijaga hampir berdekatan dan bahkan bisa dikatakan berbarengan dengan keberadaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kedua PT ini memang dikenal sebagai PT tertua di Indonesia dan menjadi cikal bakal berdirinya berbagai perguruan tinggi keagamaan lainnya. Terdapat setidaknya beberapa periode pendirian UIN yang berpusat di Yogyakarta ini.

Periode awal adalah periode rintisan. Masa ini dimulai dengan Penegerian Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia (UII) menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950 Tanggal 14 Agustus 1950 dan Peresmian PTAIN pada tanggal 26 September 1951. Pada waktu ini, terjadi pula peleburan PTAIN (didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950) dan ADIA (didirikan berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 Tanggal 9 Mei 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan nama Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah. pada periode ini, PTAIN berada di bawah kepemimpinan KHR Moh Adnan (1951-1959) dan Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya (1959-1960).

Periode berikutnya adalah masa meletakkan landasan atau pondasi perguruan tinggi. Masa ini ditandai dengan peresmian IAIN pada tanggal 24 Agustus 1960. Pada waktu ini, terjadi pemisahan IAIN. Pertama berpusat di Yogyakarta dan kedua, berpusat di Jakarta berdasarkan Keputusan Agama Nomor 49 Tahun 1963 Tanggal 25 Februari 1963. Pada periode ini, IAIN Yogyakarta diberi nama IAIN Sunan Kalijaga berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 1965 Tanggal 1 Juli 1965. Saat itu telah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dimulai dengan pemindahan kampus lama (di Jalan Simanjuntak, yang sekarang menjadi

gedung MAN 1 Yogyakarta) ke kampus baru yang jauh lebih luas (di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta). Sejumlah gedung fakultas dibangun dan di tengah-tengahnya dibangun pula sebuah masjid yang masih berdiri kokoh. Sistem pendidikan yang berlaku pada periode ini masih bersifat 'bebas' karena mahasiswa diberi kesempatan untuk maju ujian setelah mereka benar-benar mempersiapkan diri. Adapun materi kurikulumnya masih mengacu pada kurikulum Timur Tengah (Universitas Al-Azhar, Mesir) yang telah dikembangkan pada masa PTAIN. Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga berada di bawah kepemimpinan Prof. R.H.A. Soenaryo, S.H. (1960-1972).

Periode berikutnya adalah masa meletakkan landasan akademik. Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga dipimpin secara berturut-turut oleh Kolonel Drs. H. Bakri Syahid (1972-1976), Prof. H. Zaini Dahlan, MA (selama 2 masa jabatan: 1976-1980 dan 1980-1983), Prof. Dr. HA Mu'in Umar (1983-1992) dan Prof. Dr. Simuh (1992-1996). Pada waktu ini, pembangunan sarana prasarana fisik kampus meliputi pembangunan gedung Fakultas Dakwah, Perpustakaan, Program Pascasarjana, dan Rektorat dilanjutkan. Sistem pendidikan yang digunakan pada periode ini mulai bergeser dari 'sistem liberal' ke 'sistem terpimpin' dengan mengintrodusir 'sistem semester semu' dan akhirnya 'sistem kredit semester murni'. Dari segi kurikulum, IAIN Sunan Kalijaga telah mengalami penyesuaian yang radikal dengan kebutuhan nasional bangsa Indonesia. Jumlah fakultas bertambah menjadi 5 (lima); yaitu Fakultas Adab, Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah dan Ushuluddin. Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga dibuka pada periode ini, tepatnya pada tahun akademik 1983/1984. Program Pascasarjana ini telah diawali dengan kegiatan-kegiatan akademik dalam bentuk *short courses on Islamic studies* dengan nama *Post Graduate Course*

(PGC) dan Studi Purna Sarjana (PPS) yang diselenggarakan tanpa pemberian gelar setingkat Master. Untuk itu, pembukaan Program Pascasarjana pada dasawarsa delapan puluhan tersebut telah mengukuhkan fungsi IAIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga akademik tingkat tinggi setingkat di atas Program Strata Satu.

Periode berikutnya adalah pematapan akademik dan manajemen. Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga berada di bawah kepemimpinan Prof. Dr. HM. Atho Mudzhar (1997-2001). Upaya peningkatan mutu akademik, khususnya mutu dosen (tenaga edukatif) dan mutu alumni, terus dilanjutkan. Para dosen dalam jumlah yang besar didorong dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi, baik untuk tingkat Magister (S2) maupun Doktor (S3) dalam berbagai disiplin ilmu, baik di dalam maupun di luar negeri. Demikian pula peningkatan sumber daya manusia bagi tenaga administratif dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan administrasi akademik. IAIN Sunan Kalijaga semakin berkonsentrasi untuk meningkatkan orientasi akademiknya dan mengokohkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Jumlah tenaga dosen yang bergelar Doktor dan Guru Besar meningkat disertai dengan peningkatan dalam jumlah koleksi perpustakaan dan sistem layanannya.

Masa berikutnya adalah periode pengembangan kelembagaan. Periode ini dapat disebut sebagai 'Periode Transformasi', karena, pada periode ini telah terjadi peristiwa penting dalam perkembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam tertua di tanah air, yaitu Transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 Tanggal 21 Juni 2004. Deklarasi UIN Sunan Kalijaga

dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2004. Periode ini di bawah kepemimpinan Prof. Dr. HM. Amin Abdullah (2001-2005) dengan Pembantu Rektor Bidang Akademik Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Drs. H. Masyhudi, BBA, M.Si. dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Dr. H. Ismail Lubis, MA (Almarhum) yang kemudian digantikan oleh Dr. Maragustam Siregar, MA. Pada periode kedua (2006-2010) dari kepemimpinan Prof. Dr. HM. Amin Abdullah telah dibentuk Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama. Dengan ditetapkannya keberadaan Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama, maka kepemimpinan UIN Sunan Kalijaga pada periode kedua ini adalah sebagai berikut : Pembantu Rektor Bidang Akademik, Dr. H. Sukamta, MA, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, Dr. H. Tasman Hamami, MA, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr. Maragustam Siregar, MA, dan Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama dijabat oleh Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA. Perubahan Institut menjadi universitas dilakukan untuk mencanangkan sebuah paradigma baru dalam melihat dan melakukan studi terhadap ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, yaitu paradigma Integrasi Interkoneksi. Paradigma ini mensyaratkan adanya upaya untuk mendialogkan secara terbuka dan intensif antara hadlrah an-nas, hadlrah al-ilm, dan hadlrah al-falsafah. Dengan paradigma ini, UIN Sunan Kalijaga semakin menegaskan kepeduliannya terhadap perkembangan masyarakat muslim khususnya dan masyarakat umum pada umumnya. Pemaduan dan pengaitan kedua bidang studi yang sebelumnya dipandang secara dimatral berbeda memungkinkan lahirnya pemahaman Islam yang ramah, demokratis, dan menjadi rahmatan lil 'alamin.

Tahap selanjutnya adalah tahapan kebersamaan dan kesejahteraan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/16522/2010

Tanggal 6 Desember 2010, Guru Besar Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam diberi tugas tambahan sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masa jabatan 2010-2014. Periode di bawah kepemimpinan Prof. Dr. H. Musa Asy'arie dibantu oleh empat Pembantu Rektor yaitu: Pembantu Rektor Bidang Akademik Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag., Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. H. Ahmad Rifai, M.Phil., dan Pembantu Rektor Bidang Kerjasama, Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A. Seiring dengan perkembangan jaman dan dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, dinilai organisasi tata kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta perlu ditata kembali. Oleh karena itu, Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013. Sesuai dengan Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang baru, dalam melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh tiga Wakil Rektor yaitu: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., dan wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Kerja sama Dr. H. Maksudin, MA.

Sampai sekarang, UIN Sunan Kalijaga, yang namanya diambil dari salah seorang nama Walisongo, terus memantapkan diri sebagai sentral pendidikan tinggi keagamaan di Yogyakarta dan Jawa. Paradigma integrasi-interkoneksi yang menjadi ciri khas lembaga ini semakin mantap dengan kehadiran banyak intelektual muslim di perguruan tinggi ini. Nama besar seperti alm. Prof. Kuntowijoyo memberikan sumbangan besar bagi penetapan distingsi kelembagaan, yang kemudian dikenal dengan sebutan

paradigma Sosial Profetik. Ciri khas inilah yang terus dipelihara dan dijaga sampai sekarang.

Visi, Misi dan Tujuan

Arah pengembangan UIN Sunan Kalijaga telah dirumuskan sejak awal dengan menekankan pada kualitas lulusan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu ditetapkanlah *core values* yang diembannya. Terdapat tiga nilai dasar yang dikembangkan di UIN ini yaitu :

1. Integratif-Interkonetif

Sistem keterpaduan dalam pengembangan akademik, manajemen, kemahasiswaan, kerjasama, dan entrepreneurship.

2. Dedikatif-Inovatif

Bersikap dedikatif, amanah, pro mutu, berpikir dan bergerak aktif, kreatif, cerdas, dan inovatif; tidak sekadar bekerja rutin dan rajin.

3. Inklusif-Continuous Improvement

Bersifat terbuka, akuntabel, dan komit terhadap perubahan dan keberlanjutan.

Visi

Unggul dan Terkemuka dalam Pemanduan dan Pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi Peradaban.

Misi

1. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran.
2. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.

3. Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani.
4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan sarjana yang mempunyai kemampuan akademis dan profesional yang integratif-interkoneksi.
2. Menghasilkan sarjana yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial, manajerial, dan berjiwa kewirausahaan serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan.
3. Menghasilkan sarjana yang menghargai dan menjiwai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan.
4. Menjadikan Universitas sebagai pusat studi yang unggul dalam bidang kajian dan penelitian yang integratif-interkoneksi.
5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.

Fakultas, Jurusan, Dosen dan Mahasiswa

UIN Sunan Kalijaga, sebagai sebuah lembaga pendidikan tua di Indonesia, saat ini memiliki 8 fakultas dan 1 program pascasarjana, yaitu :

1. Fakultas Adab dan Humaniora : 5 program studi
2. Fakultas Dakwah dan Komunikasi : 5 program studi
3. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan : 8 program studi
4. Fakultas Syariah dan Hukum : 6 program studi
5. Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam : 6 program studi
6. Fakultas Sains dan Teknologi : 10 program studi

7. Fakultas Sosial dan Humaniora : 3 program studi
8. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : 4 program studi
9. Program Pascasarjana : 12 konsentrasi

Dari keseluruhan fakultas dan program studi tersebut, pelaksanaan perkuliahan dilakukan dengan memaksimalkan seluruh tenaga pengajar yang handal. Dosen-dosen yang mengajar di PT ini telah dikenal dengan nama-nama besar yang telah berkiprah di masyarakat, baik berskala nasional maupun internasional. Nama-nama seperti Prof Muhktar Yahya, Prof. Amin Abdullah, Prof. Noorhaidi, Prof. Machasin, Prof Musa Asy'arie, Prof. Zakiah Darajat, Prof. H Zaini Dahlan, dan lainnya, adalah nama-nama besar yang telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan keagamaan di masyarakat dan negara.

Organisasi dan Aktifitas Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan di UIN Jogja mengikuti pola umum setiap PTKI, yaitu membentuk *student government*. *Student Government* dibangun seperti yang terjadi di negara. Dalam proses pemilihan presiden, ada partai mahasiswa. Partai ini tidak berafialiasi dengan partai politik yang ada. Partai mahasiswa adalah sarana untuk mendukung calon presien yang mereka usung, kemudian ada tahapan kampanye, ada KPU, ada Bawaslu, dan lain-lain. Bagi mahasiswa, *student government* ini tidak hanya menjadi arena bagi mahasiswa mempratekan nilai-nilai demokrasi, juga bagaimana melahirkan pemimpin mahasiswa yang memiliki visi dan berintegritas, selain itu memiliki pandangan Islam Moderat.

Student government di lingkungan UIN Sunan Kalijaga terdiri atas lembaga-lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas, Fakultas, dan

Jurusan/Program Studi. Berikut ini adalah lembaga-lembaga kemahasiswaan di UIN Sunan Kalijaga:

Ditingkat Universitas terdiri dari DEMA Universitas dan SEMA Universitas, Kemudian Uni Kegiatan Mahasiswa (UKM) terdiri dari UKM Olahraga, UKM PPS Cepedi, UKM INKAI, UKM Taekwondo, UKM PSM Gita Savana, UKM OG Al-Jami'ah, UKM Teater ESKA, UKM Jamaah Cinema Mahasiswa, UKM JQH Al-Mizan, UKM Kordiska, UKM SPBA, UKM Koperasi Mahasiswa, UKM LPM Arena, UKM Resimen Mahasiswa, UKM Pramuka Racana Sunan Kalijaga, UKM Pramuka Racana Nyi Ageng Serang, UKM KSR PMI, UKM Mapalaska, UKM EXACT, UKM PIK-M Lingkar Seroja, dan UKM Kalimasada.

Semua organisasi ini adalah organisasi yang memang resmi terdaftar di direktori kemahasiswaan UIN Suka. Bagi organisasi lain, dianggap bukan organisasi resmi. Pembinaannya berada di bawah kewenangan WR III dan WD III.

Organisasi Non Struktural

Sama seperti UIN lainnya, di UIN Sunan Kalijaga juga dibentuk beberapa organisasi intrakampus yang sifatnya non struktural. Lembaga ini tidak masuk dalam struktur organisasi berdasarkan statuta, tetapi dibuat berdasarkan kebutuhan yang ada. Peran lembaga-lembaga ini sangat penting, baik sebagai unit layanan umum ataupun bentuk kegiatan lainnya.

Lembaga yang termasuk pada Unit Layanan Umum adalah :

1. Poliklinik
2. Hotel
3. Restoran
4. Koperasi Pegawai RI

5. Koperasi Mahasiswa
6. Multipurpose
7. Sport venue
8. Club House
9. TK/RA

Selain itu terdapat juga pusat-pusat kajian yang menjadi ajangnya sumbangan pemikiran dan perdebatan di kalangan akademisi, baik mahasiswa maupun dosen. Pusat-pusat kajian ini ada yang berada di bawah naungan universitas dan juga ada yang dibawah koordinir fakultas.

UIN Sunan Kalijaga juga memiliki Unit Layanan Kampus yaitu:

1. Laboratorium terpadu
2. Laboratorium agama
3. International Office
4. Career Informations and Development Centre
5. Building Management

Lembaga-lembaga ini merupakan lembaga penting yang banyak menjadi ujung tombak penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Sesuai dengan paradigma integrasi-interkoneksi, unit-unit ini diwajibkan untuk bersinergi mewujudkan tujuan dan keinginan lembaga.

C. UIN Alauddin, Makassar (website : www.uin-alauddin.ac.id)



UIN Alauddin di Makassar, Sulawesi Selatan, bisa dikatakan adalah pusat pendidikan keagamaan untuk Indonesia wilayah Timur. Hal ini tidak lepas dari kiprahnya yang memang sangat menonjol, serta dilihat dari aspek sejarahnya yang sudah lama berkiprah di masyarakat. Sejarah pendirian UIN Alauddin ini bisa dirunut dari beberapa fase, mulai dari awal hingga sekarang. Runtutan sejarah ini diadopsi dari website resmi UIN Alauddin Makassar.

Fase tahun 1962 s.d 1965

Mulanya IAIN Alauddin Makassar yang kini menjadi UIN Alauddin Makassar berstatus Fakultas Cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Atas desakan Rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan serta atas persetujuan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 75 tanggal 17

Oktober 1962 tentang penegerian Fakultas Syari'ah UMI menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 10 Nopember 1962. Kemudian menyusul penegerian Fakultas Tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 11 Nopember 1964 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 tanggal 7 Nopember 1964. Kemudian Menyusul pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta cabang Makassar tanggal 28 Oktober 1965 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 77 tanggal 28 Oktober 1965.

Fase tahun 1965 s.d 2005

Mempertimbangkan dukungan dan hasrat yang besar dari rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terhadap pendidikan dan pengajaran agama Islam tingkat Universitas, serta landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 1963 yang antara lain menyatakan bahwa dengan sekurang-kurangnya tiga jenis fakultas IAIN dapat digabung menjadi satu institut tersendiri sedang tiga fakultas dimaksud telah ada di Makassar, yakni Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin, maka mulai tanggal 10 Nopember 1965 berstatus mandiri dengan nama Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah di Makassar dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965.

Penamaan IAIN di Makassar dengan Alauddin diambil dari nama raja Kerajaan Gowa yang pertama memeluk Islam dan memiliki latar belakang sejarah pengembangan Islam di masa silam, di samping mengandung harapan peningkatan kejayaan Islam di masa mendatang di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia bahagian Timur pada umumnya. Sultan Alauddin adalah raja Gowa XIV tahun 1593-1639,

(kakek/datok) dari Sultan Hasanuddin Raja Gowa XVI, dengan nama lengkap I Mangnga'ranggi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin, yang setelah wafatnya digelar juga dengan Tumenanga ri Gaukanna (yang mangkat dalam kebesaran kekuasaannya), demikian menurut satu versi, dan menurut versi lainnya gelar setelah wafatnya itu adalah Tumenanga ri Agamana (yang wafat dalam agamanya). Gelar Sultan Alauddin diberikan kepada Raja Gowa XIV ini, karena dialah Raja Gowa yang pertama kali menerima agama Islam sebagai agama kerajaan. Ide pemberian nama Alauddin kepada IAIN yang berpusat di Makassar tersebut, mula pertama dicetuskan oleh para pendiri, di antaranya adalah Andi Pangeran Daeng Rani, (cucu/turunan) Sultan Alauddin, yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan, dan Ahmad Makkarasusu Amansyah Daeng Ilau, ahli sejarah Makassar.

Pada Fase ini, IAIN (kini UIN) Alauddin yang semula hanya memiliki tiga (3) buah Fakultas, berkembang menjadi lima (5) buah Fakultas ditandai dengan berdirinya Fakultas Adab berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 148 Tahun 1967 Tanggal 23 Nopember 1967, disusul Fakultas Dakwah dengan Keputusan Menteri Agama RI No.253 Tahun 1971 dimana Fakultas ini berkedudukan di Bulukumba (153 km arah selatan kota Makassar), yang selanjutnya dengan Keputusan Presiden RI No.9 Tahun 1987 Fakultas Dakwah dialihkan ke Makassar, kemudian disusul pendirian Program Pascasarjana (PPs) dengan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama No. 31/E/1990 tanggal 7 Juni 1990 berstatus kelas jauh dari PPs IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kemudian dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 403 Tahun 1993 PPs IAIN Alauddin Makassar menjadi PPs yang mandiri.

Fase Tahun 2005 s.d sekarang

Untuk merespon tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan mendasar atas lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 tahun 1989 di mana jenjang pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I, telah disamakan kedudukannya khususnya jenjang pendidikan menengah, serta untuk menampung lulusan jenjang pendidikan menengah di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I, diperlukan perubahan status kelembagaan dari Institut menjadi Universitas, maka atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-2006 dan atas dukungan civitas Akademika dan Senat IAIN Alauddin serta Gubernur Sulawesi Selatan, maka diusulkanlah konversi IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar kepada Presiden R.I melalui Menteri Agama R.I dan Menteri Pendidikan Nasional R.I.

Mulai 10 Oktober 2005 Status Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar berubah menjadi (UIN) Universitas Islam Negeri Alauddin Alauddin Makassar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandai dengan peresmian penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Bapak DR H Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Desember 2005 di Makassar.

Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam.

Misi

1. Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.

2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik, dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.

Tujuan

1. Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insani yang kuat dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
2. Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan.
3. Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami.
4. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional.

Fakultas, Jurusan, Dosen dan Mahasiswa

Dalam perubahan status kelembagaan dari Institut ke Universitas , UIN Alauddin Makasar mengalami perkembangan dari lima (5) buah Fakultas menjadi 7 (tujuh) buah Fakultas dan 1 (satu) buah Program Pascasarjana (PPs) berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006, yaitu:

1. Fakultas Syariah dan Hukum
2. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
3. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
4. Fakultas Adab dan Humaniora

5. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
6. Fakultas Sains dan Teknologi
7. Fakultas Ilmu Kesehatan.
8. Program Pascasarjana(PPs)

Jumlah program studi dari keseluruhan fakultas yang adalah 54 program studi. Tentu ini berbanding pula dengan jumlah mahasiswa yang memang selalu menunjukkan grafik peningkatan peminat. Tahun 2018 saja, UIN Makassar menerima sebanyak 5.469 mahasiswa, yang berasal dari berbagai daerah terutama di Indonesia wilayah Timur. Jumlah mahasiswa untuk saat ini adalah 17.957 orang⁴⁰.

Sebagai PT agama terbesar di wilayah timur, UIN Makassar juga didukung oleh tenaga pengajar yang bervariasi dan telah memiliki kiprah besar dalam kehidupan sosial keagamaan di masyarakat. Dosen-dosen di UIN Alauddin Makassar memiliki variasi keilmuan dan kualifikasi yang sudah dikategorikan mencukupi untuk kelancaran pendidikan di kampus ini. Beberapa tokoh pendidikan di level lokal, nasional, dan bahkan internasional berasal dari kampus ini. Bahkan pada saat ini (2018), Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI berasal dari UIN Alauddin Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki memang sudah memadai.

Organisasi dan Aktifitas Kemahasiswaan

Aktifitas organisasi kemahasiswaan juga berjalan dengan baik di UIN Alauddin Makassar. Hal ini tampak dari bagaimana geliat ormawa berlangsung dalam berbagai aktifitas kemahasiswaan. Secara formal, ormawa berada pada organisasi Senat Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Pada sisi lain juga banyak ormawa dalam bendera UKM-UKM,

⁴⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Alauddin_Makassar

bahkan juga yang eksternal kampus. Hal ini membuat dinamika kampus di UIN Alauddin cukup kuat.

Saat ini jumlah ormawa di UIN Makassar berjumlah 12 UKM, selain DEMA dan SEMA. UKM tersebut adalah :

1. LDK Al Jami'
2. Pramuka
3. PMI
4. Resimen Mahasiswa
5. Washilah
6. Black Panther
7. Tapak Suci
8. SB Esa
9. Pencak Silat
10. Koperasi Mahasiswa
11. Tae Kwon Do
12. RITMA (Riset, Keilmuan, Kemitraan Masyarakat).

Masing-masing UKM beraktifitas sesuai ketentuan ormawa yang ada, di bawah koordinasi WD 3 Fakultas dan WR 3 Universitas. Pada beberapa sisi aktifitas mereka cukup menonjol karena memperlihatkan sisi kreatifitas dan sisi kritis mahasiswa.

Organisasi Non Struktural

UIN Alauddin juga memiliki lembaga-lembaga penunjang lain yang tidak masuk dalam struktur. Hal ini terwujud dalam bentuk pusat-pusat studi dan kajian. Ini yang sangat berperan dalam membahas dan mengkaji berbagai masalah riil di masyarakat. Beberapa pusat kajian tersebut adalah :

1. Pusat Kajian Islam, Sains dan Teknologi

2. Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan Pemerintah (LKSP)
3. Forum Kajian Ekonomi Syariah
4. Lembaga Kajian An-Nur Fakultas Psikologi
5. Pusat Studi Wanita
6. Pusat Studi Pengembangan Bisnis

Selain itu juga terdapat pusat-pusat kajian yang dibentuk di fakultas ataupun program studi. Sayangnya data mengenai ini belum terkumpul dengan baik. Tidak hanya di level UIN, pada level ormawa juga ada yang membentuk pusat kajian sendiri-sendiri. Fungsinya adalah sebagai wadah diskusi para mahasiswa, khususnya anggota pusat tersebut.

D. UIN Antasari Banjarmasin (website : www.uin-antasari.ac.id)



Sejarah keberadaan dan pendirian UIN Antasari Banjarmasin, dulunya IAIN Antasari, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dan dinamika masyarakat di Kalimantan, khususnya masyarakat Banjar. Pertalian antara

sejarah dan etnis Banjar dengan keinginan untuk membentuk perguruan tinggi agama Islam di daerah ini sangat kuat. Oleh karena itu tulisan dari Mujiburrahman (saat ini sebagai Rektor UIN Antasari) menarik untuk dicermati.

Menurut Mujiburrahman⁴¹, pendidikan agama Islam di Banjarmasin tidak lepas dari bagaimana perjuangan dan eksistensi Pangeran Antasari di Kesultanan Banjar. Kalau kita amati sejarah Perang Banjar, khususnya perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari, tampak jelas bahwa unsur-unsur Islam turut memberikan sumbangan yang besar. Gerakan tarekat yang didukung oleh haji-haji, khususnya di Hulu Sungai, yang disebut dengan gerakan ‘Baratib Baamal’, merupakan pendukung perjuangan Antasari yang sangat kuat dan setia. Mereka meyakini bahwa perang melawan Belanda adalah jihad fi sabilillah. Kekuatan Islam tersebut tentu bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya, melainkan melalui proses dakwah yang dilakukan oleh para ulama. Tak syak lagi, peran Muhammad Arsyad al-Banjari dan murid-muridnya sejak abad ke-18, sangatlah penting. Ketika pulang dari belajar Islam di Mekkah, atas dukungan Sultan, Arsyad kemudian menggelar pengajian di tempat khusus yang dikenal dengan wilayah Dalam Pagar. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan Arsyad tampaknya tidak jauh berbeda dengan halaqah dalam pendidikan pesantren. Dalam model ini, seorang guru mengajar murid-muridnya dengan membacakan dan menerangkan sebuah kitab/teks. Tidak ada jenjang pendidikan berdasarkan kelas. Kita tidak tahu pasti, apakah sistem ini hanyalah peniruan dari apa yang dialami Arsyad dan kawan-kawannya di Mekkah, atau ada kaitannya dengan upaya ‘mengislamkan’ sistem

⁴¹ Mujiburrahman, Dari Iain Ke UIN Pangeran Antasari: Tantangan Dan Peluang Di Tengah Arus Perubahan Sosial Dan Budaya, Jurnal Khazanah, Volume XII, Nomor 1, 2014

pendidikan Hindu-Buddha yang sebelumnya mungkin sudah ada. Tetapi besar kemungkinan, yang terjadi adalah yang pertama.

Apa yang dikatakan Mujiburrahman di atas adalah untuk menunjukkan keterikatan masyarakat Banjar dengan Islam, terutama sekali keterikatan dengan tokoh-tokoh agama. Hal ini yang kemudian menjadikan keyakinan bahwa Islam di Banjarmasin adalah identitas bagi masyarakat. Berangkat dari hal itu juga kemudian muncul gagasan dari berbagai tokoh untuk mendirikan perguruan tinggi agama Islam, sebagai wadah bagi siswa-siswa yang sudah lulus Madrasah, untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Mujiburrahman juga mengatakan bahwa orientasi untuk memadukan pendidikan Islam dengan pendidikan modern cukup banyak mempengaruhi tokoh-tokoh pendidikan di daerah ini. Kalau diperhatikan lembaga-lembaga pendidikan swasta yang bertebaran di Kalsel, yang didirikan di abad yang lalu, mungkin akan berkesimpulan bahwa mayoritas lembaga pendidikan Islam di Kalsel berorientasi pada integrasi. Pendidikan umum seperti SMP dan SMA, cenderung kurang diminati, khususnya di daerah Hulu Sungai. Adapun untuk Banjarmasin, yang sejak dulu cenderung kosmopolit dan 'dekat' dengan Belanda, keadaannya memang terbalik. Jumlah madrasah di kota ini kalah dengan jumlah sekolah umum. Namun secara keseluruhan, jumlah madrasah, terutama jika dimasukkan yang swasta, masih jauh lebih banyak. Data terbaru dalam Kementerian Agama RI dalam Angka 2012 (Anonim 2013) menyebutkan, di Kalsel terdapat 504 Madrasah Ibtidaiyah (143 negeri dan 361 swasta), 245 Madrasah Tsanawiyah (80 negeri dan 165 swasta), dan 95 Madrasah Aliyah (41 negeri dan 54 swasta)⁴².

⁴² Ibid.

Hal ini jugalah yang diprediksi oleh Mujiburrahman bahwa mungkin inilah salah satu sebab, pada paruh kedua abad ke-20, ada usaha-usaha ulama Banjar untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi negeri khusus untuk kajian Islam. Inisiatif ini datang dari para ulama alumni Mesir dan Haramain. Akhirnya, sebuah Fakultas Agama Islam yang berafiliasi dengan Universitas Lambung Mangkurat didirikan pada 1958. Pada tahun-tahun berikutnya, fakultas ini berubah menjadi Fakultas Islamologi, lalu menjadi Fakultas Syariah cabang IAIN Sunan Kalijaga. Akhirnya, setelah melewati berbagai proses, pada 20 Nopember 1964, berdirilah IAIN Antasari Banjarmasin.

Tampak bahwa pengaruh dari pendidikan tinggi Islam di Jawa (khususnya IAIN Sunan Kalijaga) cukup besar. Sepertinya ini juga berlaku untuk wilayah Timur Indonesia lainnya. Mengutip dari tulisan di wikipedia⁴³, pendirian IAIN Antasari adalah sejarah panjang sejak awal kemerdekaan hingga kemudian berdiri Universitas Lambung Mangkurat yang menjadi cikal bakal IAIN Antasari.

Tiga buah Fakultas Agama didirikan tiga kabupaten yakni di Amuntai Fakultas Ushuluddin, di Barabai Fakultas Tarbiyah dan di Kandangan Fakultas Adab,(sebelumnya bernama Akademi Agama Islam dan Bahasa Arab). Agar ketiga Fakultas tersebut dapat dibina dengan baik dibentuklah sebuah Badan Koordinator di Banjarmasin yang diketuai Gubernur sendiri (H. Maksid) dan H. Abdurrasyid Nasar selaku Sekretaris. Kebijakan tersebut tampaknya cukup melegakan masyarakat sehingga proses selanjutnya untuk mengintensifkan pembinaan perguruan tinggi agama tersebut dapat berjalan lancar. Cita cita mendirikan fakultas agama di

⁴³ Penjelasan sejarah IAIN Antasari banyak mengutip dari sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Antasari

ibukota provinsi Kalimantan Selatan ini tidak pernah padam. Pada tanggal 21 September 1958 diresmikan berdirinya Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan 4 fakultas, salah satunya adalah Fakultas Agama Islam.

Fakultas Agama Islam ini umurnya tidak begitu lama, karena kemudian berubah menjadi Fakultas Islamologi dengan ketuanya H. Abdurrahman Ismail, MA (alm) dan Sekretaris H. Mastur Jahri, MA (alm). Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1960 dibentuk Panitia Persiapan Fakultas Syari'ah Banjarmasin. Salah satu pertimbangannya adalah karena masyarakat Kalimantan Selatan mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap Penegerian Fakultas Islamologi menjadi Fakultas Syari'ah Banjarmasin.

Keluarnya Peraturan Presiden RI No.11 tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Peraturan Presiden No.27 tahun 1963 tentang perubahan Peraturan Presiden No.11 tahun 1960, maka peluang untuk menegerikan Fakultas Islamologi menjadi Fakultas Syari'ah terbuka lebar. Selain Peraturan Presiden itu, TAP MPRS tanggal 3 Desember 1960 No.II/MPRS/1960 yang disusul dengan Resolusi MPRS No.1/MPRS/1963, memberikan dasar pijak yang lebih kuat bagi hasrat untuk mengem-bangkan pendidikan Agama dan perluasan Fakultas Agama.

Sebagai upaya untuk penegerian Fakultas Islamologi Unlam menjadi Fakultas Syari'ah itu, maka panitia Persiapan Fakultas Syari'ah mengutus H.M.Daud Yahya (alm) dan Abdurrivai, BA (sekarang Drs. H. Abdurrivai) untuk menghadap Menteri Agama K.H.M.Wahib Wahab (alm) di Jakarta guna memantapkan usaha yang sedang ditempuh.

Usaha delegasi Panitia Persiapan Fakultas Syari'ah ini tidak sia sia, karena dengan Keputusan Menteri Agama RI No.28 tahun 1960 tanggal 24 Nopember 1960 yang ditandatangani sendiri oleh K.H. Wahib Wahab,

diresmikanlah penegerian Fakultas Islamologi Banjarmasin menjadi Fakultas Syari'ah sebagai cabang dari Al Jami'ah Al Islamiah Al Hukumiah Yogyakarta. Penegerian Fakultas Syari'ah ini terhitung mulai tanggal 15 Januari 1961 M bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1380 H. Dan sebagai Dekan ditetapkan H.Abdurrahman Ismail, MA (alm). Fakultas Syari'ah ini sejak dinegerikan sampai dengan tahun 1965 masih menempati kantor di Jalan Lambung Mangkurat bersama 3 Fakultas lainnya dari Universitas Lambung Mangkurat. Perkuliahan pada waktu itu bersama fakultas lainnya menggunakan gedung bekas Kodam X/LM di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Pada tahun 1965 kantor Fakultas Syari'ah dan sebagian perkuliahan dipindahkan ke gedung Sekolah Menengah Islam Atas (SMIA) di jalan Sungai Mesa Darat. SMIA dimaksud kemudian menjadi SP IAIN dan terakhir menjadi Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin.

Fakultas Syari'ah ini pulalah yang merupakan salah satu modal berdirinya IAIN Antasari. Pada saat fakultas Syari'ah ini menjadi salah satu fakultas dalam lingkungan IAIN Antasari pada bulan Nopember 1964 telah meluluskan Srjana muda (BA) sebanyak 25 orang.

Walaupun Fakultas Islamologi Universitas Lambung Mangkurat telah dinegerikan menjadi Fakultas Syari'ah cabang al jami'ah Yogyakarta, keinginan masyarakat Kalimantan Selatan untuk memiliki sebuah perguruan tinggi agama Islam di daerah ini dirasakan belum terpenuhi seluruhnya. Yang ada baru merupakan satu badan koordinator sebagaimana telah diutarakan terdahulu. Kemudian berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah gabungan ketiga Fakultas yang ada di Kabupaten, maka hubungan koordinasi ditingkatkan dan sepakat untuk mendirikan Universitas Islam Antasari yang disingkat dengan UNISAN. Unisan ini langsung dipimpin

oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Maksid sebagai Presidennya. Dalam melaksanakan tugasnya dia Presidium UNISAN ini dibantu oleh H. Mukhyar Usman, Abd. Gafar Hanafiah dan H. Abd. Rasyid Nasar, masing-masing membidangi pendidikan, keuangan dan kemahasiswaan, serta H. M. Irsyad Jahri sebagai Sekretaris.

Pengumuman resmi berdirinya UNISAN ini dibacakan oleh H. Maksid sendiri pada tanggal 17 Mei 1962 di lapangan Dwi Warna Barabai sebagai bagian dari kegiatan peringatan Hari Proklamasi ALRI Divisi IV pertahanan Kalimantan yang ke-13. Upacara tersebut dihadiri oleh Panglima ALRI Laksamana R.E. Martadinata. Sesudah peresmian tersebut, pada tahun itu juga Fakultas Publisistik di Banjarmasin yang dipimpin oleh Zafry Zamzam bergabung pada UNISAN. Dengan demikian UNISAN memiliki 4 Fakultas, yaitu: Fakultas Ushuluddin di Amuntai Kabupaten HSU, Fakultas Tarbiyah di Baratai Kabupaten HST, Fakultas Adab di Kandangan Kabupaten HSS, Fakultas Publisistik di Kotamadya Banjarmasin

Adanya Peraturan Presiden nomor 11 tahun 1960. tentang IAIN Al Jami'ah al Islamiyah al Hukumiyah), dan penetapan Menteri Agama Nomor 35 tahun 1960 tentang pembukaan resmi Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah serta penetapan Menteri Agama Nomor 43 tahun 1960 tentang penyelenggaraan IAIN disatu sisi, kemudian dipihak lain berdirinya UNISAN tahun 1961 serta adanya Fakultas Syari'ah cabang Al Jami'ah Yogyakarta, menjadi modal utama para tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendirikan satu IAIN yang berdiri sendiri di Kalimantan Selatan.

Setelah melalui proses perjuangan yang panjang dan penegerian fakultas Tarbiyah Barabai, Fakultas Ushuluddin Amuntai serta Fakultas Syari'ah Kandangan ditambah dengan fakultas Syari'ah cabang Al Jami'ah

Yogyakarta, maka pada tanggal 20 Nopember 1964, berdasar Kepmenag nomor 89 tahun 1964, diresmikanlah pembukaan IAIN Al Jami'ah Antasari berkedudukan di Banjarmasin dengan rektor pertama Zafry Zamzam.

Pada waktu IAIN Antasari diresmikan pada tahun 1964, fakultas-fakultas yang sudah ada di Banjarmasin dan daerah-daerah kabupaten yang berasal dari UNISAN dijadikan Fakultas-Fakultas Negeri di bawah IAIN Antasari. Ada empat fakultas yang resmi dikelola, yaitu: Fakultas Syariah di Banjarmasin Fakultas Syariah di Kandangan Fakultas Tarbiyah di Barabai Fakultas Ushuluddin di Amuntai

Disebabkan hanya mempunyai empat fakultas yang tersebar di daerah dan hanya satu yang berada di Banjarmasin sebagai pusat Institut, sehingga Rektor merasa perlu agar sebagai pusat institut tidak hanya ada satu fakultas, melainkan harus memiliki fakultas yang lengkap sebagaimana IAIN lainnya.. Disamping itu di daerah yang belum ada fakultasnya juga dirintis usaha untuk mendirikan Fakultas cabang. Hal ini didorong oleh keinginan untuk memudahkan calon mahasiswa yang tidak mampu ke luar daerah, agar bisa melanjutkan studinya di daerahnya sendiri, disamping ingin sebanyak-banyaknya mendidik generasi Islam yang berpendidikan perguruan tinggi.

Sebagai realisasi dari keinginan tersebut, berturut-turut berdirilah beberapa fakultas di daerah, yaitu: Fakultas Tarbiyah Banjarmasin, diresmikan pada tahun 1965 Fakultas Tarbiyah Cabang Martapura, diresmikan pada tahun 1969 Fakultas Tarbiyah Cabang Rantau diresmikan pada tahun 1970 Fakultas Tarbiyah Cabang Kandangan, diresmikan pada tahun 1965 Fakultas Dakwah Banjarmasin, didirikan pada tahun 1970

Dengan demikian, sejak berdiri pada tahun 1964 sampai tahun 1970, IAIN Antasari telah berkembang menjadi sembilan fakultas. Pada tahun

1973 diadakan oleh pimpinan IAIN Antasari diadakan evaluasi terhadap jalannya fakultas-fakultas di daerah dan akhirnya diputuskan untuk mengintegrasikan Fakultas Tarbiyah Cabang Martapura, Rantau dan Kandangan ke Banjarmasin dan Barabai ke Banjarmasin dan Barabai. Selanjutnya mulai tahun 1978, Fakultas Syariah di Kandangan diintegrasikan ke Fakultas Syariah di Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah di Barabai diintegrasikan ke Fakultas Tarbiyah Barabai dan Fakultas Ushuluddin di Amuntai dipindahkan ke Banjarmasin. Proses pengintegrasian dan pemindahan ini berakhir pada tahun 1980. Sehingga mulai tahun 1980, IAIN Antasari hanya mempunyai empat fakultas yang semuanya ada di Banjarmasin, yaitu: Fakultas Syariah Fakultas Tarbiyah Fakultas Dakwah Fakultas Ushuluddin Pada tahun 1988 fakultas yang ada di IAIN Antasari bertambah menjadi enam, yaitu dengan di integrasikannya Fakultas Tarbiyah Palangka Raya dan Fakultas Tarbiyah Samarinda sebagai cabang dari IAIN Antasari.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1999 Fakultas Tarbiyah Palangka Raya berubah menjadi STAIN Palangka Raya dan Fakultas Tarbiyah Samarinda menjadi STAIN Samarinda, sehingga sampai saat ini IAIN Antasari kembali menjadi empat fakultas, yaitu: Fakultas Syariah Fakultas Tarbiyah Fakultas Dakwah Fakultas Ushuluddin.

Munculnya kemudian kebijakan transformasi IAIN ke UIN yang berlaku di Indonesia, menyebabkan IAIN Antasari juga berbenah diri. Ini dianggap sebagai peluang untuk mengembangkan diri, sekaligus memaksimalkan proses integrasi keilmuan agama dengan umum. Sebagaimana dikatakan oleh Mujiburrahman⁴⁴, Transformasi IAIN ke UIN tentu diharapkan dapat memberikan tawaran-tawaran alternatif bagi

⁴⁴ Mujiburrahman, *ibid.*

kegalauan moral dan budaya yang dihadapi generasi muda. Tetapi hal ini bisa jadi pula berubah sebagai ancaman. Setelah berubah menjadi UIN, perilaku mahasiswanya dan wawasan budayanya, justru makin terbawa arus, ikut-ikutan dengan yang terjadi di universitas umum. Sementara itu, pembalikan bisa pula terjadi dari sudut lain, yaitu berupa radikalisasi keagamaan. Seolah sebagai respon balik atas kehidupan bebas dan permissif di masyarakat, sebagian anak-anak kampus justru menjadi aktivis keagamaan radikal, yang mengimpikan revolusi, dan sangat anti terhadap perbedaan paham keagamaan.

Pada tanggal 3 April 2017, sesuai Perpres No. 36/2017 (diundangkan tanggal 7 April 2017), IAIN Antasari resmi berubah menjadi UIN Antasari Banjarmasin. Perubahan ini kemudian diikuti dengan pendirian beberapa program studi baru serta fakultas pada keilmuan umum seperti Sains dan Teknologi, Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Visi, Misi dan Tujuan

Visi UIN Antasari adalah menjadi Universitas yang unggul dan berakhlak. Sementara misi yang diembannya adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam berbagai disiplin ilmu yang terintegrasi dengan kebangsaan, berbasis karakter dan kearifan lokal, serta berwawasan global;
2. Mengembangkan riset berbagai disiplin ilmu integratif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak terhadap kelestarian alam;
3. Mengembangkan pola pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
4. Membangun kepercayaan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga regional, nasional, dan internasional; dan

5. Mengembangkan tata kelola berdasarkan manajemen modern dalam rangka mencapai kepuasan Sivitas Akademika dan *stakeholders*

Tujuan yang ingin dicapai oleh UIN Antasari adalah :

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan disiplin ilmu yang terintegrasi dengan kebangsaan, berakhlak mulia, menghormati kearifan lokal, berwawasan kebangsaan, dan global;
2. Menghasilkan riset berbagai disiplin ilmu integratif yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Terlibat aktif dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan; dan
5. Menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas untuk semua kalangan.

Fakultas, Jurusan, Dosen dan Mahasiswa

Setelah perubahan dari IAIN ke UIN Antasari, fakultas dan program studi juga bertambah. Pada saat ini terdapat 6 Fakultas yaitu :

1. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan : 13 program studi
2. Fakultas Syariah : 3 program studi
3. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora : 4 program studi
4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi : 3 program studi
5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : 4 program studi
6. Program Pascasarjana : 6 program studi (S-2)
2 program studi (S-3)

Pengembangan jurusan dan fakultas pada UIN Antasari di atas menunjukkan bahwa aktifitas pendidikan yang dilakukan sangat dinamis.

Hal ini kemudian akan berefek pada input mahasiswa yang masuk ke UIN menjadi lebih bervariasi, tidak hanya mesti dari latar belakang pendidikan agama. Begitu juga, motivasi masuk ke UIN bukan semata-mata ingin menjadi orang yang ahli agama, sebagaimana dijelaskan oleh Mujiburrahman di atas.

Jumlah mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, setelah berubah menjadi UIN menunjukkan grafik yang meningkat. Hal ini sebenarnya fenomena umum pada lembaga yang bertransformasi dari IAIN ke UIN. Pada saat ini jumlah mahasiswa aktif diperkirakan sebanyak 25.000 orang. Mahasiswa ini berasal dari berbagai daerah, khususnya di Pulau Kalimantan.

Lembaga Non Struktural

Pada UIN Antasari juga dibuat lembaga-lembaga khusus yang memang membahas kajian dan aspek tertentu. Lembaga-lembaga yang berbentuk pusat kajian ini cukup banyak tumbuh di UIN Antasari. Beberapa lembaga tersebut adalah :

1. Pusat Kajian Konsultasi
2. Pusat Kajian Falahiyah
3. Pusat Kajian Syariah dan Hukum
4. Pusat Kajian Borneo

Selain lembaga ini, terdapat pula beberapa lembaga lain yang tidak masuk dalam struktur namun dibentuk melalui SK Rektor. Lembaga ini sebenarnya merupakan ajang dan wadah diskusi para mahasiswa untuk mengaktifkan berbagai kegiatan posifnya.

E. UIN Sultan Syarif Kasim Riau (website : www.uin-suska.ac.id)⁴⁵



Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau dalam bahasa Arab adalah *ميتريا ولحو جامعة السلطان شريف قاسم الإسلامية* dan dalam bahasa Inggris adalah *State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau* merupakan hasil pengembangan/ peningkatan status pendidikan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru yang secara resmi dikukuhkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005 tentang Perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan diresmikan pada 9 Februari 2005 oleh Presiden RI, Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tindak lanjut perubahan status ini, Menteri Agama RI menetapkan

⁴⁵ Penjelasan tentang sejarah pendirian UIN Sultan Syarif Kasim ini diadopsi dari sejarah ringkas berdasarkan website resmi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan alamat <https://uin-suska.ac.id/profil/sejarah-ringkas-universitas/>

Organisasi dan Tata kerja UIN Suska Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 4 April 2005.

Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim (IAIN Susqa) Pekanbaru sebagai cikal bakal UIN Suska Riau, didirikan pada tanggal 19 September 1970 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 194 Tahun 1970. Institut ini diresmikan berdirinya oleh Menteri Agama Republik Indonesia K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 19 September 1970 berupa penandatanganan piagam dan pelantikan Rektor yang pertama, Prof. H. Ilyas Muhammad Ali.

IAIN Susqa ini pada mulanya berasal dari beberapa Fakultas dari Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang kemudian dinegerikan, yaitu Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Riau di Pekanbaru, Fakultas Syariah Universitas Islam Riau di Tembilahan, dan Fakultas Ushuluddin Mesjid Agung An-Nur Pekanbaru.

Dengan persetujuan Pemerintah Daerah, maka Institut Agama Islam Negeri Pekanbaru ini diberi nama dengan Sulthan Syarif Qasim, yaitu nama Sulthan Kerajaan Siak Sri Indrapura ke-12 atau terakhir, yang juga nama pejuang nasional asal Riau. Pengambilan nama ini mengingat jasa-jasa dan pengabdian beliau terhadap negeri, termasuk di bidang pendidikan.

IAIN Susqa Pekanbaru ini mengambil tempat kuliah pada mulanya di bekas sekolah Cina di Jl. Cempaka, sekarang bernama Jl. Teratai, kemudian dipindahkan ke masjid Agung An-Nur. Lalu pada tahun 1973, barulah IAIN Susqa menempati kampus Jl. Pelajar (Jl. K.H. Ahmad Dahlan sekarang). Bangunan pertama seluas 840 m² yang terletak di atas tanah berukuran 3,65 Ha dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dan diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Arifin Achmad, pada tanggal 19 Juni 1973.

Ketika didirikan, IAIN Susqa hanya terdiri atas tiga Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, dan Fakultas Ushuluddin. Namun sejak tahun 1998, IAIN Susqa mengembangkan diri dengan membuka Fakultas Dakwah. Fakultas ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 104 Tahun 1998 tanggal 24 Pebruari 1998. Fakultas ini pada mulanya berasal dari Jurusan Dakwah yang ada pada Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1997 telah berdiri pula Program Pascasarjana/PPs IAIN SUSQA Pekanbaru.

Keinginan untuk memperluas bidang kajian di IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru muncul melalui Seminar Cendikiawan Muslim (1985), Seminar Budaya Kerja dalam Perspektif Islam (1987), dan dialog ulama serta cendikiawan se-Propinsi Riau. Tiga tahun berturut-turut (1996, 1997, 1998) melahirkan rekomendasi: Agar IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru membuka program studi baru (umum). Melalui keputusan rapat senat IAIN Susqa tanggal 9 September 1998 yang menetapkan perubahan status IAIN Susqa menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, maka dilakukan persiapan secara bertahap. Mulai pada tahun akademik 1998/1999 telah dibuka beberapa program studi umum pada beberapa fakultas, seperti program studi Psikologi pada Fakultas Tarbiyah, program studi Manajemen dan Manajemen Perusahaan pada Fakultas Syari'ah, dan program studi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah. Pada tahun akademik 1999/2000 IAIN Suska telah pula membuka Program Studi Teknik Informatika. Satu tahun kemudian, tepatnya tahun akademik 2000/2001, dibuka pula Program Studi Teknik Industri. Kedua program studi terakhir ini untuk sementara ditempatkan di bawah administrasi Fakultas Dakwah.

Pada tahun akademik 2002/2003 program studi umum yang ada pada fakultas diatas dan ditambah beberapa program studi baru, ditingkatkan menjadi fakultas yang berdiri sendiri. Fakultas-fakultas tersebut adalah Fakultas Sains dan Teknologi dengan Jurusan/Program Studi Teknik Informatika, Teknik Industri, Sistem Informasi, dan Matematika; Fakultas Psikologi dengan Jurusan/Program Studi Psikologi; Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Program Studi Manajemen, Akuntansi dan Manajemen Perusahaan Diploma III; dan Fakultas Peternakan dengan Program Studi Ilmu Ternak dengan konsentrasi Teknologi Produksi Ternak, Teknologi Hasil Ternak dan Teknologi Pakan dan Nutrisi.

Dengan demikian, pada tahun akademik 2002/2003, IAIN Susqa sebagai persiapan UIN Suska Riau telah mempunyai 8 fakultas, yaitu: Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Peternakan.

Peningkatan status IAIN menjadi UIN dimaksudkan untuk menghasilkan sarjana muslim yang mampu menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu ke-Islaman, ilmu pengetahuan dan teknologi secara intergral, sekaligus menghilangkan pandangan dikhotomi antara ilmu keislaman dan ilmu umum.

Pengembangan UIN Suska tidak hanya dilakukan pada bidang akademik semata, seperti melalui pembukaan fakultas-fakultas dan program-program studi baru, tapi juga diarahkan pada pengembangan di bidang fisik, sarana, dan prasarana. Dewasa ini UIN Suska telah mempunyai lahan kampus seluas 84,15 Ha yang terdiri atas 3,65 Ha di Jl. K.H. Ahmad Dahlan dan 80,50 Ha di Km. 15 Jl. Soebrantas Simpangbaru Panam Pekanbaru.

Lahan kampus di Km 15 Jl. H.R. Soebrantas tersebut dibebaskan pada tahun 1981/1982 mulanya seluas 60 Ha dan diperluas pada tahun 2003-2006 menjadi 80,50 Ha. Pada tahun 1995/1996 pembangunan fisik di lahan ini telah dimulai dan telah berhasil membangun gedung seluas 5.760 m² untuk 70 lokal ruang kuliah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PMA RI No. 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau, maka UIN Suska Riau memiliki 8 fakultas, yaitu: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan Fakultas Pertanian dan Peternakan.

Visi, Misi, dan Tujuan

“Terwujudnya Universitas Islam Negeri sebagai lembaga pendidikan tinggi pilihan utama pada tingkat dunia yang mengembangkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni secara integral pada tahun 2023”.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas secara akademik dan profesional serta memiliki integritas pribadi sebagai sarjana muslim;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan menggunakan paradigma Islami;

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau seni dengan menggunakan paradigma Islami;
4. Menyelenggarakan tatapamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan serta keunggulan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang bernafaskan Islam;
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan martabat dan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional;
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul berkelas dunia;
4. Menghasilkan kinerja institusi yang efektif untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan.

Fakultas, Jurusan, Mahasiswa dan Dosen

Fakultas yang ada di UIN Suska terus berkembang sesuai dengan perubahan dari IAIN ke UIN. Beberapa program studi umum sudah ditawarkan dan menjadi andalan pula dalam merekrut mahasiswa baru. Fakultas yang ada di UIN Suska saat ini adalah :

1. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan : 9 program studi
2. Fakultas Syariah dan Hukum : 7 program studi

3. Fakultas Ushuludin : 3 program studi
4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi : 4 program studi
5. Fakultas Sains dan Teknologi : 5 program studi
6. Fakultas Psikologi : 3 program studi
7. Fakultas Ekonomi dan Sosial : 6 program studi
8. Fakultas Pertanian dan Peternakan : 2 program studi
9. Program Pascasarjana

Melalui fakultas dan program studi di atas, maka dinamika dan dialektika pembelajaran di UIN Suska juga menjadi dinamis. Kajian-kajian keagamaan yang selama ini kuat dengan basis pada komunitas masyarakat Melayu, sekarang merambah ke diskusi dan perdebatan di areal yang lebih luas. Dialektika yang terjadi sangat membuka peluang munculnya prodi lain dan juga gagasan-gagasan baru.

Jumlah mahasiswa UIN Riau cukup banyak, kendati belum didapatkan data pastinya, yang jelas penerimaan mahasiswa baru tahun 2018 mencapai 5.090 orang. Jumlah yang sangat banyak, dan diperkirakan dengan model seperti ini, jumlah total bisa mencapai 30.000 orang, bahkan lebih.

Guna menjalankan pendidikan di masing-masing fakultas, dukungan dari para Dosen ini terbagi atas dosen tetap PNS dan dosen tetap non PNS. Dosen ini diseleksi melalui rekrutmen mekanisme pusat maupun dengan mekanisme lokal, internal perguruan tinggi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Radikalisme Beragama dalam Pandangan Para Rektor

Sebagai pemangku kebijakan tertinggi di tingkat UIN, pandangan para rektor tentang radikalisme itu sendiri sangat penting. Dari sinilah nantinya kebijakan akan diturunkan ke bawah. Rektor sendiri selain pimpinan universitas juga merupakan representasi cendekiawan muslim pada bidangnya sendiri-sendiri, oleh karena itu sudut pandang dalam memahami tentang radikalisme beragama itu sendiri, tentu ada variasi-variasi tersendiri.

Prof. Dr, Ahmad Mujahidin, M.Ag., Rektor UIN Susqa Riau berpendapat bahwa radikalisme identik dengan perilaku kekerasan dalam beragama yang dilatarbelakangi oleh pemahaman keagamaan masing-masing. Menurutnya, fenomena ini sudah taraf darurat jika tidak ditangani dari mulai sekarang.

“Radikalisme itu muncul dari dalam yang dipengaruhi oleh dua hal yang, pertama adalah soal simplikasi pemahaman agama. Analoginya orang bisa saja pintar, namun ketika berbicara persoalan agama “sumbu pendek” maka akan jadi masalah. Kedua, soal ekonomi anti kemapanan yang menyebabkan muncul pemikiran radikalsime. Ekonomi yang dimaksud adalah anti kemapanan”⁴⁶.

Bagi Prof Mujahidin, radikalisme itu sebenarnya bukan pada wilayah ideologis, tapi lebih pada masuknya pengaruh-pengaruh paham luar

⁴⁶ Wawancara tanggal 9 Oktober 2018

yang kemudian berdiaklektika dengan pengetahuan agama yang selama ini dimiliki mahasiswa. Polanya semacam indoktrinasi berupa “metode cuci otak”, tapi ini bukan keyakinan, hanya terperdaya saja. Oleh karena itu, kekuatan pengetahuan keagamaan seseorang menjadi penting agar dia tidak mudah dipengaruhi oleh paham-paham tersebut.

Dalam hal ini, UIN Riau yakin bahwa fenomena radikalisme di kalangan mahasiswa bisa dicegah, asalkan ada upaya serius dalam menciptakan itu. Ia juga mengatakan bahwa beberapa waktu lalu sempat dikabarkan di Riau banyak terduga teroris, bahkan di kampus. Semua hal itu bisa diatasi kedepannya, dengan cara-cara pendekatan keagamaan tentunya, yang fokus pada aspek humanis.

“Fenomena ini sebenarnya banyak mencuat belakangan ini. Perubahan status IAIN ke UIN juga berpengaruh. Kalau dulu hanya bicara soal pendidikan keagamaan saja, jadi fokus dan terjadi diskusi disitu. Tapi sekarang, sudah masuk pula banyak prodi umum, bahkan dosen dan mahasiswa saja banyak yang bukan latar belakang agama. Ini kan jadi masalah ketika mereka dihadapkan pada diskusi-diskusi keagamaan.”⁴⁷

Oleh karena itu, Prof Mujahiddin sepakat bahwa pemahaman dan pengetahuan agama harus diperkuat, karena disinilah kunci terpenting dari proses yang dilakukan. Ini tidak sekedar belajar agama saja, tapi mencakup keseluruhannya lewat sisi-sisi humanis.

Hal yang hampir mirip juga disampaikan oleh Prof. Dede Mariyana, Rektor UIN Syahid, Jakarta. Baginya radikalisme itu sudah dari dulu didengungkan, bahkan dari akar sejarah juga sudah terlihat genealoginya. Kekerasan atas nama agama sudah pernah ada, dan itulah kemudian yang harus diantisipasi agar menguat kembali.

⁴⁷ Wawancara tanggal 9 Oktober 2018

“Radikalisme beragama itu kan identik dengan menghalalkan cara-cara kekerasan dalam beragama, baik fisik maupun non fisik. Ini bukan masalah teologis apalagi ideologis sebenarnya. Hanya pemahaman yang keliru saja, tapi kemudian dianggap benar.”⁴⁸

Oleh karena itu, wawasan dan sudut pandang keagamaan harus diperkuat, kuncinya ada disitu. UIN Jakarta, secara kelembagaan dan juga secara personal, sudah memproklamkan diri sebagai kampus yang anti radikalisme. Hal ini tampak dari slogan yang dibawanya yaitu Inklusifisme, Toleran, Pluralisme. Tiga unsur inilah yang harus mewarnai dan menjadi ruh dari semua aktifitas di dalam kampus. Dosen, mahasiswa, karyawan, dan siapapun yang mengaku civitas akademika UIN Syahid harus memahami hal tersebut. Kalau ini sudah kuat diyakini, tidak akan ada lagi radikaisme itu. Obat penawarnya ada pada tiga slogan utama di atas.

Rektor UIN Jakarta juga pernah mengeluarkan larangan bagi dosen untuk menggunakan cadar dalam perkuliahan. Kendati alasan ini bukan dalam konteks radikalisme, tetapi tetap saja nuansa larangan paham fundamentalisme kental dalam larangan tersebut. Menurut rektor, ini terkait dengan sisi pluralis, toleran dan inklusif yang dibawa oleh UIN ini.

Pendapat lain yang juga memiliki kemiripan tampak dari gagasan Prof. Julian Wahyudi, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baginya, radikalisme harus dicegah sedini mungkin, dan bangsa ini tidak mungkin menganggap itu tidak ada.

“sekarang ini kondisinya sudah mengkhawatirkan. Radikalisme yang dianggap menghalalkan kekerasan atas nama agama, bahkan sampai ingin mengganti falsafah bernegara segala, itu harus diwaspadai dan dijaga agar tidak muncul. Harus dicegah.”⁴⁹

⁴⁸ Wawancara tanggal 10 Oktober 2018

⁴⁹ Wawancara tanggal 11 Oktober 2018

Bagi Prof Julian, siapapun kiranya sudah paham bahwa radikalisme itu hanya soal kesalahan dalam memahami ajaran agama, bukan pada wilayah substantif. Tetapi ini dibelokkan menjadi keyakinan ideologis, akhirnya efeknya jadi luar biasa.

“memang ini dipengaruhi banyak hal, termasuk perkembangan sosial politik dan berbagai isu internasional. Namun akarnya tetap pada wawasan keagamaan.”⁵⁰

Prof. Julian termasuk yang cukup kuat melakukan upaya-upaya mencegah kemunculan paham radikalisme beragama ini. UIN Jogya pernah melakukan pelarangan pemakaian cadar di kalangan mahasiswa, dengan maksud agar lebih kondusifnya perkuliahan yang dilakukan. Tetapi kebijakan ini tetap saja tidak bisa melepaskan bayang-bayang kuatnya gerakan fundamentalisme yang harus disikapi. Belakangan, kebijakan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hanya saja dari penjelasan yang ada, Rektor UIN Suka memiliki pendirian yang sama bahwa radikalisme harus disikapi dan dicegah sedini mungkin. Ini tidak lepas dari karakteristik UIN Suka yang memang telah memproklamkan diri sebagai kampus yang moderat dan toleran.

Sementara itu, Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Prof. Mujiburrahman mengatakan bahwa radikalisme tetap menjadi isu yang harus dicermati dan diwaspadai. Radikalisme berkaitan dengan perilaku kekerasan dalam beragama, memandang pihak lain salah dan hanya kelompoknya yang benar.

“Di UIN Antasari ini sebenarnya tidak ada, walaupun dulu pernah ada yang terlibat dalam HTI, tetapi sekarang tidak lagi. Secara sosiologis juga sebenarnya karakteristik Banjarmasin tidak mengarah ke radikalisme. Tetapi upaya mencegah tetap dilakukan.”⁵¹

⁵⁰ Wawancara tanggal 10 Oktober 2018

⁵¹ Wawancara tanggal 10 Oktober 2018

Dalam hal ini, Rektor UIN Antasari sepakat bahwa gerakan radikalisme adalah hal yang berbahaya, apalagi jika memapar mahasiswa. Ini yang disebutnya sebagai bentuk kegalauan mahasiswa, karena mereka baru bergabung di dunia kampus. Oleh karena itu, tindakan yang perlu dilakukan adalah menghapuskan kegalauan ini.

Hampir senada dengan hal tersebut, Rektor UIN Makassar juga berpandangan yang sama. Radikalisme adalah gerakan yang harus dicegah dan dilarang, terutama di dunia kampus. Tetapi radikalisme harus dibedakan dengan perilaku anarkis. Anarkisme cenderung tidak memiliki nuansa ideologis, tapi lebih pada ekspresi dalam sebuah gerakan semata.

“Radikalisme itu adalah sebuah gerakan yang anti NKRI, Pancasila, undang – undang dasar dan Bhineka Tunggal Ika. Kalau yang dimaksud radikalisme itu adalah gerakan yang anarkis, maka di UIN Alaudin itu ada, bahkan gerakan seperti itu hampir disetiap kampus di Indonesia. Bahkan untuk kasus anarkis ini, UIN Alaudin pernah mengeluarkan mahasiswa yang terbukti melakukan kegiatan anarksi saat melakukan aksi demonstrasi. Tetapi radikal dalam konteks ideologi pemahaman agama, disini tidak ada.”⁵²

Prof. Musafir Pabbarani menegaskan bahwa UIN Makassar harus terbebas dari paham-paham radikal keagamaan. Kebijakan yang dibuat umumnya mengarah pada aspek pencegahan munculnya gerakan ini. Ini tidak bisa dilepaskan dari realitas bahwa radikalisme akan sangat mengancam bagi stabilitas sosial budaya dan politik. Rektor menyatakan bahwa efeknya sangat besar jika mahasiswa terpapar, karena itu harus dicegah sedini mungkin.

Secara ringkas, gambaran dari sudut pandang para rektor khususnya yang menjadi objek kajian ini dalam melihat radikalisme beragama bisa dicermati dari tabel berikut.

⁵² Wawancara tanggal 11 Oktober 2018

Tabel 4

Pandangan Rektor tentang Radikalisme Beragama

Rektor	Mendesak/Tidaknya disikapi	Wujud Radikalisme Beragama	Ancaman Radikalisme Beragama
UIN Sultan Syarif Qasim, Riau	Mendesak	Kekerasan, intoleran, memaksakan kehendak, fanatik simbol	NKRI, Pancasila, kerukunan bergama, stabilitas nasional
UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	Mendesak	Kekerasan, intoleran, memaksakan kehendak, anggapan pihak lain salah	NKRI, Pancasila, kerukunan bergama, stabilitas nasional, membiasakan kekerasan
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	Mendesak	Kekerasan, intoleran, memaksakan kehendak, kaku dalam bersikap	NKRI, Pancasila, kerukunan bergama, stabilitas nasional, stabilitas mahasiswa di kampus
UIN Antasari, Banjarmasin	Mendesak	Kekerasan, intoleran, memaksakan kehendak	NKRI, Pancasila, kerukunan bergama, stabilitas nasional, melemahkan tradisi lokal
UIN Alauddin, Makassar	Mendesak	Kekerasan, intoleran, memaksakan kehendak	NKRI, Pancasila, kerukunan bergama, stabilitas nasional,

			perpecahan di kalangan mahasiswa
--	--	--	----------------------------------

Sumber : analisis data penelitian, 2018

Tampak bahwa, semua rektor menengarai radikalisme beragama itu berhubungan atau identik dengan perilaku kekerasan. Radikalisme mampu menciptakan instabilitas sosial politik yang ada, bahkan pada taraf yang lebih luas mengancam pada keutuhan NKRI dan Pancasila, artinya Indonesia menjadi pertaruhan kalau paham ini terus menguat.

Realitas seperti ini bisa dikonfirmasi dari pandangan Nur Syam⁵³ bahwa muncul dan menguatnya radikalisme beragama akan berefek pada banyak hal. Salah satunya adalah terjadi reduksi pemahaman agama di masyarakat, tak terkecuali tentunya di kalangan mahasiswa. Reduksi ini bergerak dari paham yang sebelumnya mengajarkan kedamaian, kemudian menjadi gerakan kekerasan dan intoleran. Dikatakan juga bahwa radikalisme agama adalah respon sosial terhadap realitas sosial yang dikonstruksi sebagai “menyimpang” dari ajaran agama yang benar. Isu-isu yang dikembangkan terkait dengan ketidakadilan barat terhadap Islam, modernisasi yang salah arah dan kegagalan pemerintah sekular dalam menata dan membangun masyarakatnya. Aspek penyebab seperti inilah yang kemudian memberikan implikasi besar pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁵³ Nur Syam, *Radikalisme Dan Masadepan Hubungan Agama-Agama: Rekonstruksi Tafsir Sosial Agama*, naskah pidato pengukuhan Guru Besar pada IAIN Sunan Ampel, disampaikan tanggal 10 Oktober 2005, <https://core.ac.uk/download/pdf/34212117.pdf>, diakses tanggal 24 Oktober 2018.

B. Kecenderungan Timbulnya Radikalisme di Kalangan Mahasiswa

Sebagaimana telah dikutip pada bagian awal laporan penelitian ini, dimana hasil riset dari BNPT mengatakan bahwa mahasiswa sudah terpapar oleh paham radikal. Begitu juga riset dari PPIM UIN Syahid, menunjukkan hal yang sama. Kasus Pepi Fernando, seorang alumnus UIN Syahid, yang kemudian terlibat dari teror bom, mengindikasikan itu semakin kuat. Ini fakta-fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa kampus bukanlah wilayah yang kebal terhadap paham-paham radikal, termasuk kampus pendidikan keagamaan.

Memang sedikit ada pengecualian jika masing-masing kampus dibedakan ciri khasnya, yaitu antara Perguruan Tinggi Umum (PTU) dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)⁵⁴. Analisis dari BPNT menyatakan bahwa yang paling rentan justru kampus non keagamaan atau PTU. Dalam banyak kasus memang alumnus atau oknum mahasiswa dari kampus tersebut yang tercatat terlibat dalam gerakan-gerakan radikal. Kasus di Universitas Riau tahun 2018 awal lalu adalah salah satu contoh konkrit.

Akan tetapi, bukan berarti pula kampus PTKI, khususnya UIN menjadi kebal dan terbebas dari gerakan radikal. “Potensi terhadap fenomena itu tetap ada, jika dibiarkan ia akan berlanjut dan bisa membesar menjadi gerakan-gerakan yang menyimpang. Fenomenanya memang tidak sebesar kampus PTU,” ujar Rektor UIN Alauddin Makassar dalam sesi wawancara penelitian ini⁵⁵. Hal senada juga disampaikan oleh Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Prof Mujiburrahman⁵⁶,

“di Banjarmasin memang tidak ada kasus radikalisme terjadi, tetapi potensi itu tetap ada, karena mahasiswa adalah kelompok yang

⁵⁴ Bisa dibandingkan dengan pendapat Azyumardi Azra, Kompas 27 April 2011.

⁵⁵ Wawancara dengan Prof. Musaffir Pabano, Rektor UIN Alaudin, 17 September 2018

⁵⁶ Wawancara tanggal 18 September 2018

memang sangat rentan dan mudah dipengaruhi, disebabkan mereka masih dalam taraf mencari dan ingin mengetahui masa depannya nanti seperti apa. Pendek kata, mereka lagi galau”

Hasil wawancara dengan semua rektor pada UIN yang menjadi objek riset ini, menunjukkan bahwa saat ini kampus yang dipimpinnya belum bisa dikategorikan sebagai gerakan radikal beragama, walaupun dalam beberapa sisi tampak ada dinamika yang cukup tinggi di kalangan mahasiswa. Rektor UIN Syahid sendiri, Prof. Dede Mariyana juga berpendapat hal yang sama, kendati ia tidak menampik ada satu dua yang terpapar.

“Jika dikatakan mahasiswa, dalam artian dominan, terpapar radikalisme, saya kira tidak. Tetapi bahwa ada satu atau dua yang terpengaruh ya itu pengecualian. Dengan kata lain, bukan pola yang ada yang keliru, tapi ada unsur lain dari luar yang mempengaruhi. Kita juga selalu waspada dan melakukan berbagai upaya antisipasi.”

Masing-masing rektor juga menyadari bahwa fenomena radikalisme memang sesuatu yang harus diwaspadai. Isu ini bukan lagi sekedar isapan jempol. Sudah saatnya untuk waspada dan menjadikan radikalisme di kalangan mahasiswa sebagai hal yang serius. Rektor UIN Sumatera Utara yang sempat diwawancarai dalam riset ini, berkata bahwa soal radikalisme di kalangan mahasiswa sudah sangat serius. Ini tidak bisa lagi dianggap sebelah mata.

“Soal radikalisme itu memang ada dan sudah mengkhawatirkan. Semua komponen dalam kampus harus waspada dan kita juga selalu antisipatif, tidak hanya ke mahasiswa, bahkan ke dosenpun kita juga lakukan hal yang sama⁵⁷.”

Dilihat dari beberapa kajian yang ada, memang fenomena ini bukanlah hal yang sederhana. Komarudin Hidayat, mantan Rektor UIN

⁵⁷ Wawancara tanggal 17 September 2018

Syahid pernah mengatakan bahwa fenomena Pepi Pernando yang terlibat dalam jaringan teror, bisa jadi bukan hanya anomali semata, tetapi menjadi permulaan dari kemungkinan munculnya sosok-sosok lain. Oleh karena itu, langkah antisipatif harus segera dilakukan sedari ini, terutama oleh perguruan tinggi masing-masing⁵⁸.

Sebuah hasil riset dari Wahid Khozin⁵⁹ mengatakan bahwa pandangan absolutisme kebenaran agama yang dianut, bisa menjadi salah satu indikasi bahwa radikalisme bisa muncul di kalangan mahasiswa. Khozin menunjukkan dari hasil risetnya bahwa hampir di semua agama, mahasiswa mengklaim bahwa absolutisme kebenaran agamanya adalah yang paling benar. Tertinggi adalah dari kalangan Islam. Memang, ini tidak bisa menjadi justifikasi langsung terhadap radikalisme, karena ini terkait dengan keyakinan secara teologis seperti keimanan terhadap agama yang dianut. Setiap agama tentu mengajarkan kebenaran yang harus dipercayai oleh semua penganutnya, dan itu memang sudah selayaknya. Tetapi Khozim menunjukkan bahwa absolutisme terhadap paham agama masing-masing memang cukup tinggi di kalangan mahasiswa.

Khozim juga menyatakan bahwa absolutisme beragama ini menjadi pisau bermata dua. Apabila tidak baik dan dewasa dalam pengelolaan sikap kebenaran, ia akan mudah terjerumus pada aspek “mengkafirkan” agama lain, yang kemudian bisa berwujud pada sikap mengesampingkan atau menganggap rendah umat dari agama lain. Fenomena ini yang kemudian bisa berujung pada tindakan-tindakan radikalisme.

Pertanyaan mendasar yang penting mendapat jawaban untuk bisa sampai pada solusi yang bisa diambil adalah mengapa fenomena

⁵⁸ Jurnal Wisuda, 23 Juli 2011 dan pernah dimuat di Harian Seputar Indonesia, 6 Mei 2011.

⁵⁹ Jurnal Edukasi, *Sikap keagamaan dan potensi radikalisme agama mahasiswa perguruan tinggi agama*, Volume 11, Nomor 3, September 2013.

radikalisme bisa berkembang di kalangan mahasiswa, terutama dari sudut pandang pimpinan PTKI sendiri. Jawaban terhadap hal ini penting karena para pimpinan lah nantinya yang akan mengeluarkan kebijakan untuk memberikan solusi terhadap masalah tersebut.

Hasil wawancara dengan para pimpinan UIN yang menjadi objek riset ini, serta dengan beberapa lembaga kemahasiswaan menunjukkan beberapa fenomena penting kecenderungan munculnya sikap radikal beragama di kalangan mahasiswa. Dikatakan kecenderungan karena memang cukup banyak aspek penyebab dan banyak pula hal yang berpengaruh terhadap kondisi tersebut. Beberapa hal yang dianggap sebagai kecenderungan penyebab munculnya radikalisme adalah sebagai berikut :

a. Minimnya wawasan keagamaan

Wawasan keagamaan berkaitan dengan pemahaman secara menyeluruh dan komprehensif tentang ajaran agama itu sendiri. Munculnya paham radikal, terutama yang menganggap gerakan kekerasan adalah cara untuk memperjuangkan agama, berawal dari hal ini. Inilah yang disebut oleh Azyumardi Azra bahwa salah satu penyebab radikalisme adalah pemahaman teks keagamaan secara literal atau sebatas tekstual semata. Akhirnya ayat-ayat suci hanya dipandang secara hitam putih belaka.

Rektor UIN Alauddin Makassar membenarkan terhadap hal ini. “Walaupun di UIN Makassar fenomena radikalisme beragama tidak terlalu kuat di kalangan mahasiswa selama ini, tetapi dangkalnya pemahaman keagamaan adalah hal mendasar. Saya kira ini berlaku untuk semua tempat di Indonesia, karena memahami agama secara salah, itulah yang membuat perilaku menjadi tidak terarah dan tidak terkendali⁶⁰.”

⁶⁰ Wawancara tanggal 17 September 2018

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Rektor UIN Susqa Riau, bahwa agama jangan hanya teks saja, tapi ada konteks, dalam hal ini ada unsur budaya yang juga harus dipahami, termasuk pada simbol-simbol beragama.

“Kita lihat sekarang ini masyarakat, begitu juga mahasiswa, sudah begitu jauh dengan keterikatannya pada simbol-simbol. Simbol yang saya maksud disini adalah simbol kenusantaraan dan kebudayaan kita dalam beragama. Mereka hanya melihat teks, tapi tidak melihat kultur yang berkembang di masyarakat.”⁶¹

Rektor di UIN yang lain juga berpendapat sama, bahwa kesalahan terbesar adalah kesalahan dalam memahami dan menerjemahkan ayat-ayat pada kitab suci. Mahasiswa belum sampai pada wilayah pemahaman secara kontekstual dan bahwa agama adalah rahmat bagi semua makhluk, tidak hanya pada umat beragama itu sendiri.

Riset dari Khozim⁶² kemudian bisa menjadi legitimasi terhadap fenomena ini. Disebutkan bahwa penggunaan media kekerasan masih dianggap wajar dan patut oleh kalangan mahasiswa, terutama ketika jalur damai sudah tidak bisa diandalkan lagi. Termasuk disini Khozim juga mengatakan bahwa kesiapan siap mati demi agama juga cukup kuat di kalangan mahasiswa. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap teks keagamaan serta unsur-unsur eksternal lainnya berpengaruh terhadap kemunculan sikap tersebut.

Masnun Tahir dalam sebuah tulisannya pernah berkata bahwa pengetahuan dan informasi masyarakat tentang agama cenderung lemah dan sedikit, tetapi semangat ingin berbuat lebih. Oleh karena diperlukan pendalaman dan pemahaman aspek keagamaan tentang perdamaian,

⁶¹ Wawancara tanggal 17 September 2018

⁶² Wahid Khozim, *ibid.*

kerukunan dan kemanusiaan, yang tentu saja bukan sekedar berbasis intelektualitas-kognitif, melainkan lebih menekankan aspek “penghayatan” (afektif) dan “pengamalan” (psikomotorik)⁶³. Semua aspek tersebut adalah bentuk dari pemahaman terhadap teks keagamaan, yang pada akhirnya bermuara pada pemahaman secara menyeluruh mengenai keagamaan. Inilah yang menjadi awal dari kemunculan sikap radikal beragama. Wawasan keagamaan sangat sempit, cenderung literal semata.

Al Maqin⁶⁴, dalam sebuah wawancara penelitian ini mengatakan bahwa masalah radikal ini sangat terkait dengan soal teks yang dipahami secara tekstual saja. Tidak ada upaya untuk membongkar teks secara keseluruhan dan mendalam. Akibatnya wawasan keagamaan menjadi sempit dan tidak meluas. Fenomena seperti ini kata Al Maqin memang berlaku umum, hampir di semua perguruan tinggi. Wawasan keagamaan mahasiswa cenderung literal, walaupun tidak radikal, cenderung menjadi apatis saja.

Prof. Julian dari UIN Sunan Kalijaga berpendapat bahwa pemahaman keagamaan mahasiswa memang harus digenjut. Ini disebabkan karena derasnya teknologi informasi, sehingga mahasiswa bisa menerima informasi dari manapun. Menurutnya diperlukan upaya-upaya khusus, bahkan kalau perlu dengan cara indoktrinasi.

“Mau tidak mau harus dilakukan karena memang memahami agama yang salah bisa berakibat fatal. Lemahnya wawasan keagamaanlah yang kemudian menjadikan orang suka membabibuta dengan iming-iming yang tidak masuk akal.”⁶⁵

Mahdalina, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin yang juga aktivis pada Lembaga Dakwah Kampus (LDK) berpendapat bahwa wawasan

⁶³ Jurnal Syariah, *Wacana Fiqh Kebangsaan*, Volume 49 Nomor 2, tahun 2015

⁶⁴ Prof. Al Maqin, guru besar UIN Sunan Kalijaga, spesialis teks dan naskah keagamaan. Wawancara tanggal 17 September 2018

⁶⁵ Wawancara tanggal 18 September 2018

keagamaan memang harus ditingkatkan, dan itu dilakukan melalui pengajian-pengajian rutin dan diskusi yang dilakukan.

“Soal wawasan keagamaan, itulah yang didiskusikan di LDK. Tidak benar kalau LDK adalah organisasi radikal dan tersusupi. Justru kami banyak diskusi untuk meningkatkan pemahaman keagamaan. Banyak yang kami lakukan disini dan semua itu untuk menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa.”⁶⁶

Apa yang dijelaskan di atas kiranya menjadi hal penting bahwa wawasan keagamaan yang sempit akan bermuara pada sikap keagamaan yang bersifat intoleran, pada beberapa sisi melahirkan tindakan yang radikal. Hal ini yang selalu diingatkan oleh Azyumardi Azra bahwa memahami agama secara sempit akan berdampak pada sikap yang tidak toleran. Tawaran Islam Wasathiyah oleh Azra adalah bagian dari hal ini. Mahasiswa bisa menerima asupan informasi dari mana saja, ini yang membuatnya sangat rentan terhadap berbagai paham keagamaan. Sejak dulu sebenarnya paham-paham ekstrem ini sudah banyak masuk ke kampus, yang karena kampus tidak terlalu intensif dalam pemahaman ini, akibatnya ruang-ruang kosong itu dimanfaatkan oleh berbagai aliran yang ada.⁶⁷

Dapat dikatakan disini bahwa wawasan keagamaan adalah aspek mendasar dalam menentukan bagaimana pemahaman keagamaan seseorang. Wawasan yang sempit, literal, hanya satu sumber, akan berdampak pada tindakan yang juga bersifat sektoral. Sebaliknya wawasan yang luas, moderat, dan kontekstual akan membawa pada gagasan tentang agama yang lebih humanis dan penuh keterikatan dengan unsur-unsur lainnya.

⁶⁶ Wawancara tanggal 12 Oktober 2018

⁶⁷ Azyumardi Azra, *ibid.*

b. Minimnya wawasan kebangsaan

Wawasan kebangsaan berkaitan dengan kemampuan untuk melihat negara ini, sebuah kesatuan wilayah Indonesia. Dalam bahasa Lemhannas RI, wawasan kebangsaan atau disebut juga sebagai wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa tentang lingkungan dan dirinya sendiri dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945 sebagai sebuah kesatuan yang utuh⁶⁸. Aspek penting dalam wawasan kebangsaan adalah Pancasila dan UUD 1945 sebagai sesuatu yang konkrit dan diakui eksistensinya sebagai perekat berbangsa dan bernegara. Wawasan seperti ini kemudian mewujud pada sikap, tindak dan prilaku dalam melihat Indonesia secara keseluruhan, termasuk keragaman penduduk dan segala yang ada didalamnya.

Sementara itu, dalam konteks radikalisme beragama terutama di kalangan mahasiswa, rendahnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan menjadi salah satu penyebab utama munculnya gerakan-gerakan yang ingin merubah pondasi bernegara. Anzar Abdullah mencontohkan hal ini dengan gerakan Islam radikal kontemporer, antara lain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi ini bersifat radikal dalam hal ide politiknya, namun menekankan cara-cara damai untuk mencapai tujuannya. Radikalismenya tergambar dari perjuangan HTI yang menginginkan perubahan politik fundamental melalui penghancuran total Negara-bangsa sekarang ini, dan menggantinya dengan Negara Islam baru di bawah satu komando khilafah⁶⁹. HTI dalam aktifitasnya mendorong terciptanya negara Islam dan tidak mengakui adanya negara bangsa yang pernah ada, termasuk Indonesia.

Rendahnya wawasan kebangsaan ini, terwujud pula dalam aksi kelompok radikal tersebut yang menolak pemberlakuan hukum positif di

⁶⁸ Bahan ajar Materi Wawasan Nusantara, Lemhannas RI, 2018

⁶⁹ Anzar Abdullah, *ibid*.

negara, termasuk Indonesia. Mereka hanya mengakui hukum yang disebutnya sebagai Syariat, hukum Allah. Abdullah mengatakan dalam kasus Indonesia, penerapan syari'at Islam secara formal bukan hanya mimpi sebagian besar umat Islam, tetapi juga sebaliknya menjadi kecemasan banyak pihak, termasuk juga umat Islam sendiri. Di sisi lain, diversitas agama dan budaya merupakan fakta yang tidak mungkin diabaikan⁷⁰.

Kajian dari Sa'dullah Affandy⁷¹ juga menunjukkan bahwa gerakan radikal di Indonesia terkait dengan pemahaman tentang kebangsaan dan keIndonesiaan. Disebutkannya bahwa ditilik dari sejarah, seperti aktifitas DI/TII, NII, kasus Ali Imron, Talang Sari Lampung, Komando Jihad, dan sebagainya, semua mengarah pada keinginan untuk mengganti negara Indonesia dengan konsep Islam. Gerakan radikalisme ini awalnya muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap komunisme di Indonesia. Selain itu, perlawanan mereka terhadap penerapan Pancasila sebagai asas Tunggal dalam politik. Bagi Kaum radikal agama sistem demokrasi pancasila itu dianggap haram hukumnya dan pemerintah di dalamnya adalah kafir taghut (istilah bahasa arab merujuk pada "setan"), begitu pula masyarakat sipil yang bukan termasuk golongan mereka. Oleh sebab itu bersama kelompoknya, kaum ini menggaungkan formalisasi syariah sebagai solusi dalam kehidupan bernegara.

Apa yang disebutkan di atas mau tidak mau juga terjadi di kalangan mahasiswa. Semua itu menjadi salah satu dari sekian banyak penyebab munculnya gerakan yang ingin merubah konstitusi dalam bernegara. Rektor UIN Sumatera Utara mengakui hal ini.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Katib Syuriah PBNU; Dosen Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan STAINU Jakarta, tulisan ini diambil dari Nuonline, tanggal 10 Oktober 2018

“Soal radikal ini terkait dengan dua hal utama, wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan. Bangsa ini dianggap kafir dan tidak sesuai syariat, karena itu harus ada perlawanan. Saya pikir di kalangan mahasiswa ide-ide seperti ini juga mulai masuk dan menjadi bahan diskusi.”⁷²

Wawasan kebangsaan yang masih rendah, terutama di kalangan mahasiswa, memang sangat dimungkinkan sekali. Hal ini disebutkan oleh Rektor UIN Alauddin Makassar,

“Mereka itu kan masih baru masuk, baru tamat sekolah menengah. Asupan informasi juga sangat variatif. Tugas kita lah memberikan penanaman dan pemahaman mengenai kebangsaan ini. Jika salah memberikan pemahaman, maka salah pula kedepannya⁷³”

Wawasan kebangsaan menjadi kunci penting yang harus ditanamkan. Rendahnya pemahaman wawasan kebangsaan berkorelasi dengan tingginya sikap ingin mengingkari negara bangsa yang dibentuk. Prof. Dede Mariyana, Rektor UIN Syahid mengakui hal ini dan menegaskan bahwa masalah wawasan kebangsaan adalah persoalan serius yang harus diselesaikan.

Terhadap pengetahuan wawasan kebangsaan yang meliputi juga tentang aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, diyakini oleh kalangan mahasiswa memang memberikan pengaruh besar terhadap daya kritis mahasiswa. Presiden Mahasiswa UIN Syahid mengatakan bahwa, Ahmad Nabil Bintang, menilai bahwa isu-isu sosial dan politik terkait keagamaan memang menjadi perhatian mahasiswa. Sebab, mahasiswa sebagai intelektual yang sedang belajar tentu mengasah ketajaman berpikirnya terhadap permasalahan kemiskinan, kemudian bagaimana mengatasi kemiskinan di Indonesia, khususnya di Ibukota. Sebab,

⁷² Wawancara tanggal 17 September 2018.

⁷³ Wawancara tanggal 17 September 2018.

kemiskinan ini dalam ajaran Islam dekat dengan kekufuran. Mahasiswa harus memiliki tanggungjawab untuk terlibat mengatasi kemiskinan tersebut meskipun keterlibatannya berupa kontribusi pemikiran. Begitu juga masalah politik, menurut Presiden Mahasiswa UIN Jakarta ini, masih terdapat permasalahan dalam hal etika politik. Sebab, banyak politisi terkadang tidak mengindahkan etika politik. Di lain sisi, permasalahan yang lain adalah politik uang (money politik) yang dalam jangka panjang dapat merusak karakter bangsa.

Bentuk pemahaman seperti ini memang sangat memungkinkan munculnya pemikiran kritis dan bahkan ke sikap yang lebih keras, walaupun belum tentu sampai ke perilaku kekerasan. Ini terjadi karena mahasiswa terbiasa melakukan kajian, diskusi, dan menganalisis. Munculnya fenomena mahasiswa menjadi anggota HTI dulunya, bisa jadi disebabkan oleh isu-isu seperti ini, yaitu rasa frustrasi karena melihat dinamika sosial politik kebangsaan yang banyak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan itu sendiri⁷⁴. Hal ini kemudian bisa dilihat bahwa persoalan radikalisme biasanya berhubungan dengan sikap kritis terhadap kehidupan bernegara yang dikatakan demokratis, tetapi dalam pandangan mahasiswa justru banyak ketimpangan dan ketidakadilan.

c. Pengaruh kegalauan (input)

Terjadinya paham keagamaan yang bersifat radikal di kalangan mahasiswa, dapat pula disebabkan oleh kelabilan individu-individu mahasiswa itu sendiri. Ini bisa dipahami karena mahasiswa umumnya berada di kisaran usia 16-22 tahun, sebuah masa yang memang masih berada dalam proses pematangan diri. Sikap labil ini sangat mudah

⁷⁴ Wawancara dengan Rektor UIN Riau, tanggal 18 September 2018.

mempengaruhi masuknya berbagai paham dan ide-ide yang dianggap menarik dan bahkan kontroversial.

Sebuah hasil riset menunjukkan bahwa dalam diri mahasiswa yang relatif masih muda dan mencari pembentukan kepribadiannya, maka *truthseeking*, *openmindness*, dan *maturity* bisa meningkat secara signifikan ketika ada diskusi dan pola-pola pembelajaran yang sifatnya intensif. Seseorang yang masih labil, bisa dipengaruhi dan bisa menjadi sebuah sikap tersendiri, jika pola-pola tersebut dilangsungkan terus menerus dan dengan metode persuasif⁷⁵. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa memang pribadi yang sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai paham-paham lain di luar dirinya. Pada beberapa hal, mahasiswa juga memiliki fantasi-fantasi tersendiri tentang kondisi ideal di luar dirinya.

Hal ini dikatakan oleh Prof. Mujiburrahman sebagai bentuk kegalauan diri seorang mahasiswa.

“Mahasiswa itu ketika masuk ke kampus, terdaftar sebagai mahasiswa baru, umumnya belum memiliki pandangan yang jelas tentang masa depannya. Banyak pula di antara mereka yang malahan tidak tahu mereka itu nantinya akan jadi apa. Ini yang saya sebut galau, dan ini jadi masalah tersendiri jika tidak ditangani dengan baik.”⁷⁶

Rektor UIN Antasari Banjarmasin ini juga mengatakan bahwa fenomena seperti itu, sangat rentan dimasuki berbagai paham lain. Disebutkan juga bahwa iklim yang selama ini mereka kenal selama masa studi di sekolah menengah berbeda dengan perkuliahan. Saat kuliah mahasiswa lebih dituntut untuk aktif dan mandiri. Peran dosen tidak terlalu banyak mengurui, justru kebebasan dan daya kritis berpikir yang diasah. Oleh karena itu, pribadi yang galau sangat membutuhkan kepastian.

⁷⁵ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/21314/8.%20BAB%20IV.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

⁷⁶ Wawancara tanggal 9 Oktober 2018

Kegalauan ini disebutkan juga dipengaruhi oleh latar belakang mahasiswa yang banyak tidak dari pendidikan agama. Semenjak perubahan dari IAIN ke UIN, maka input mahasiswa sudah berubah. Mereka yang berasal dari pendidikan umum seperti SMU bisa masuk ke UIN, bahkan tidak menutup kemungkinan yang berasal dari non muslim. Ini sebuah konsekuensi, yang dalam bahasa Prof Dede Mariyana, disebut sebagai sesuatu yang memang bakal terjadi pada UIN. Artinya disini, faktor input mahasiswa ikut berpengaruh, yaitu yang tidak memiliki basis pendidikan agama, kemudian masuk ke wilayah dominan pendidikan keagamaan dengan berbagai dinamikanya.

Transformasi IAIN ke UIN memang jadi fenomena tersendiri. Ali Muhanif, Kepala LP2M UIN Syahid mengatakan hal itu. Kemunculan radikalisme di kampus pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh transformasi IAIN menjadi UIN. Sebab, UIN menerima mahasiswa baru dari berbagai latar belakang pendidikan SLTA yang umum, di samping madrasah atau pesantren. Mahasiswa baru yang belatar pendidikan umum inilah yang semasa SLTA kemungkinan telah mendapatkan pendidikan atau pelatihan agama yang “keras”. Selain itu, tentu terdapat kemungkinan saat mahasiswa baru telah memasuki kampus, kemudian mereka mengikuti organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan kampus.⁷⁷ Hal ini yang kemudian memunculkan kegalauan saat mereka berada di lingkungan perguruan tinggi yang iklimnya jelas berbeda dengan sekolah menengah sebelumnya.

Kegalauan atau kegamangan ketika belum memastikan diri untuk menjadi sosok tertentu di masa datang, sebenarnya adalah fenomena umum di kalangan mahasiswa baru. Secara umum mereka masuk sebuah

⁷⁷ Wawancara tanggal 9 Oktober 2018

universitas, hanya berbekal pengetahuan awal saja tentang program studi yang diambilnya, bahkan tidak jarang yang hanya asal pilih.

Mujiburrahman mengatakan bahwa fenomena kegalauan banyak ditemukannya di UIN Antasari, dan kemungkinan juga terjadi di UIN lainnya. Memang sampai saat ini, tidak sampai terjadi tindak radikal, tetapi potensi itu tetap ada. Mujiburrahman sepakat bahwa jika seorang mahasiswa telah memiliki visi hidup ke depan yang jelas, tahu ingin jadi apa nantinya, kecil kemungkinan ia akan terjebak pada pemahaman-pemahaman keagamaan yang sempit dan mengarah ke sikap yang radikal.

Rektor UIN Banten, juga mengatakan hal yang sama. Radikalisme itu karena kondisi kejiwaan yang memang masih mencari-cari jati diri. Walaupun di Banten tidak ditemukan kasus radikalisme mahasiswa, namun potensi karena mahasiswa masih dalam taraf mencari jati diri, dimungkinkan terjadi. Apalagi dalam beberapa kasus, terdapat indikasi terorisme dan radikalisme di wilayah Banten, walau itu bukan di UIN.

d. Pengaruh sosial, politik, dan kebijakan pemerintah

Radikalisme yang terjadi di kalangan mahasiswa dan juga pada pelaku lainnya, tidaklah terjadi hanya karena satu faktor. Secara internal, faktor dalam diri mahasiswa memegang peranan penting, seperti minimnya wawasan serta kegalauan tentang masa depan. Tetapi hal yang juga tak kalah pentingnya, dan terkadang juga berkelindan dengan aspek internal, adalah dinamika dan perkembangan sisi eksternal. Sisi ini bisa berhubungan dengan kebijakan pemerintah dalam mengelola kenegaraan, ataupun dinamika yang terjadi di negara-negara lain yang kemudian mampu membangun semangat solidaritas keagamaan.

Mengenai ini sudah cukup banyak analisis para pakar, yang jika dilihat dari sisi sejarahnya, memang radikalisme berhubungan erat dengan

bagaimana kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah. Titik penting dari bagaimana kebijakan bernegara menjadi tentangan, bahkan pada level internasional, tidak lain adalah protes terhadap semua perlakuan yang dianggap tidak adil bagi umat Islam. Ketidakadilan adalah kunci terpenting, karena dari sinilah kemudian gerakan protes dalam berbagai bentuk bisa muncul⁷⁸.

Dalam analisisnya, Azra mengatakan bahwa radikalisme keagamaan juga dapat mendapat tambahan alasan dari deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Pada saat yang sama disorientasi dan dislokasi sosial---budaya, dan eksekusi globalisasi, dan semacamnya sekaligus merupakan tambahan faktor---faktor penting bagi kemunculan kelompok-kelompok radikal⁷⁹. Hal ini yang juga kemudian berlaku di kalangan mahasiswa, terutama UIN. Dinamika politik global yang terus menunjukkan berbagai ketimpangan, termasuk ketidakadilan dalam melihat isu-isu berkaitan dengan umat Islam, seperti konflik Timur Tengah, konflik Palestina, konflik Patani, Thailand, serta daerah-daerah lainnya yang merupakan basis masyarakat muslim, menjadi isu yang potensial untuk diolah menjadi sentimen keagamaan.

Persoalan sosial politik dan hubungan luar negeri juga semakin mencuat dalam kasus radikalisme, ketika Barat (identik dengan kelompok negara AS dan sekutunya), memberikan tafsir ganda tentang terorisme. Bahkan, istilah Islam Radikal atau *radicalism of Islam* sendiri dikembangkan dan dikonstruksi oleh Barat, konsep yang sebenarnya tidak dikenal oleh kalangan umat Islam. Kuatnya opini barat ini yang kemudian

⁷⁸ Persoalan ketidakadilan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk “perlawanan”, bisa dibandingkan dengan bacaan dari Mellon (2001), Husein Zadeh (2005), Sahri (2016), Abd A’la (2008), Azra (2011).

⁷⁹ Azyumardi Azra, *ibid.*

menimbulkan rasa ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang di kalangan Islam.

Dalam sebuah analisisnya Jamaludin Ancok⁸⁰ rasa ketidakadilan ini bisa dibedakan menjadi tiga katagori yaitu, ketidakadilan distributif, ketidakadilan prosedural, dan ketidakadilan interaksional. Distributif yang dimaksud disini adalah ketidakadilan perolehan input dan output antara dua belah pihak. Ini bisa dimaknai sebagai penguasaan sumber daya alam, teknologi, ilmu pengetahuan, yang pelaksanaannya dilakukan secara dominatif oleh pihak Barat. Outputnya lebih banyak untuk kepentingan kelompok Barat, sementara kelompok Timur (yang identik dengan Islam), dijadikan sebagai objek dan bahkan dilakukan penjajahan secara ekonomi, politik hingga menyentuh sisi ideologi. Ketidakadilan prosedural yang dimaksud disini adalah kesempatan yang setara antara para pihak yang mengelola input dan output. Selama ini kecenderungannya adalah dominasi dari pihak tertentu, terutama kelompok Barat dalam pengelolaan pada berbagai unsur, baik itu SDA, teknologi, sosial dan politik. Ketidakadilan interaksional adalah adanya kesetaraan pola hubungan dalam proses interaksi antara para pihak, ada penghargaan terhadap pihak lain, bukan hanya dominasi. Tiga unsur ketidakadilan inilah yang kerap terjadi dan kemudian menimbulkan rasa kecewa dari sebagian pihak. Wujud kekecewaan inilah yang ditunjukkan dengan mekanisme perlawanan secara radikal.

Keyakinan terhadap ketidakadilan inilah yang kemudian tumbuh berkembang menjadi banyak hal, tidak luput juga dari kalangan mahasiswa. Diskusi-diskusi yang mereka lakukan, asupan informasi yang diperoleh,

⁸⁰ Jamaludin Ancok, Ketidakadilan Sebagai Sumber Radikalisme Dalam Agama: Suatu Analisis Berbasis Teori Keadilan Dalam Pendekatan Psikologi, Jurnal Masyarakat

fakta-fakta yang ditemui, semua menunjukkan hal tersebut. Secara kasat mata juga tampak dari bagaimana perang terhadap terorisme yang dikomandoi oleh AS, dengan tuduhan terkuat ada pada masyarakat muslim. Ini dianggap sebagai tindakan yang berat sebelah dan sewenang-wenang.

Rektor UIN Syahid mengatakan bahwa,
“Dari sisi eksternal memang penyebab radikalisme ini tidak lepas dari bagaimana dinamika politik luar negeri, seperti konflik Timur Tengah. Banyak tuduhan kemudian dilabelkan pada komunitas Islam sebagai pelaku kekerasan. Begitu juga bagaimana sikap ganda dari beberapa negara barat. Hal ini mau tidak mau memicu rasa sakit hati dari kalangan muslim lainnya. Rasa seperti ini bisa berkembang menjadi perilaku yang radikal”

Selain itu, dinamika sosial politik dan kebijakan pemerintah juga memberikan sumbangan terhadap munculnya rasa ketidakadilan yang kemudian bisa memicu gerakan-gerakan perlawanan. Beberapa indikasi tindak kekerasan atas nama agama tampak berawal dari sikap protes terhadap pemerintah. Gerakan FPI yang melakukan *sweeping* lokasi maksiat, disebutkan sebagai bentuk tindakan masyarakat saat pemerintah tidak mengambil kebijakan. Begitupun beberapa kebijakan pemerintah yang tidak secara berani melakukan upaya membentengi negara dari paham-paham luar, juga dianggap tindakan yang tidak pas. Hal-hal seperti ini berkembang di media massa dan berbagai media online yang kemudian diterima dan dipahami oleh banyak kalangan dalam perspektifnya masing-masing. Tak terkecuali mahasiswa. Ini ditegaskan juga oleh Rektor UIN Riau,

“Sekarang ini kan semuanya serba mudah, begitupun informasi. Saat pemerintah mengambil kebijakan yang dianggap tidak pro pada salah satu umat, itu akan dengan mudahnya berkembang dan menjadikannya bias. Mahasiswa termasuk salah satu unsur yang menerima informasi tersebut, padahal mungkin tingkat pengetahuan mereka belum maksimal.”

Kebijakan-kebijakan pemerintah dituntut untuk selalu pro pada kebutuhan masyarakat banyak. Dalam beberapa sisi diminta berpihak pada mayoritas. Misalnya, ketegasan sikap tentang komunis di Indonesia. Tidak jarang sosok yang dianggap komunis atau berafiliasi dengan komunis, justru sekarang dibiarkan leluasa melaksanakan aktifitasnya⁸¹. Hal ini mau tidak mau menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat, tidak terkecuali di mahasiswa. Model-model asupan informasi yang kemudian tidak tersambung ke kebijakan pemerintah, membuat sikap protes dan ketidaksetujuan itu mencuat. Pada banyak hal, ini diyakini menjadi salah satu pemicu munculnya garis keras perlawanan. Pengaruh kebijakan pemerintah ini akan terkait erat dengan rendahnya pemahaman wawasan kebangsaan, karena pemerintah merupakan representasi negara yang mengatur dan menjalankan berbagai aktifitasnya.

Muhammad Wildan dari CISForm mengatakan bahwa pengaruh global terhadap radikalisme di tanah air tentu saja ada. Radikalisme itu sendiri pada dasarnya adalah gejala global yang dipengaruhi atau dibentuk oleh faktor-faktor lokal. Sebagaimana diketahui bahwa gerakan ekstrem kanan sedang marak-maraknya di berbagai negara. Sementara itu, faktor-faktor lokal atau faktor-faktor yang ada di tanah air seperti ketidakadilan memberikan sumbangan juga kemunculan resistensi terhadap pemerintah⁸².

Oleh karena itu, Wildan juga mengatakan bahwa yang perlu disadari globalisasi tidak sekedar sebuah konsep atau proses sosial yang menghasilkan suatu komoditas, melainkan sebuah proses sosial yang memproduksi tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya yang dihasilkan globalisasi itu dapat

⁸¹ Bisa dibandingkan dengan munculnya buku "Aku Bangga jadi Anak PKI" tulisan Ribka Tjiptaning, begitu juga dengan dialog-dialog di media massa yang secara gamblang menampilkan kelompok-kelompok yang mendukung komunis.

⁸² Wawancara tanggal 11 Oktober 2018

menghancurkan tradisi dan budaya lokal. Hal ini tentu saja merupakan ancaman yang serius terhadap tradisi dan budaya agama.

e. Pola pembinaan di internal ormawa

Terhubung pada realitas-realitas yang dijelaskan di awal, maka mahasiswa yang dibiasakan untuk berorganisasi dan berdiskusi kemudian melakukan banyak aktifitas di kampus masing-masing. Aktifitas ini biasanya terwujud dalam bentuk organisasi kemahasiswaan (ormawa). Masing-masing perguruan tinggi memiliki ormawa sendiri-sendiri. Bentuk formal ormawa yang berlaku umum di semua UIN adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) dan Senat Mahasiswa (Sema). Organisasi ini ada di tingkat universitas dan juga fakultas. Selain itu juga banyak terdapat unit kegiatan mahasiswa (UKM) dalam berbagai bentuknya.

Hasil riset ini dengan menelusuri ke berbagai ormawa di masing-masing UIN, tampak bahwa masing-masing ormawa memiliki pola pembinaan termasuk kaderisasi anggota sendiri-sendiri. Aturan formal dari kampus memang sudah ada dalam bentuk kebijakan rektor, yang memberikan syarat-syarat administratif, tetapi aplikasinya di lapangan berada pada kewenangan masing-masing ormawa.

Rektor UIN Syahid mengatakan bahwa pembinaan di ormawa bisa saja memunculkan lahir-lahirnya gagasan baru, yang pada beberapa sisi bisa disusupi masuknya paham yang tidak tepat.

“Ormawa adalah tempat aktifitas organisasi kemahasiswaan. Mereka sering melakukan kegiatan diskusi, seminar dan lainnya. Jika dilepas saja, ini bisa disusupi. Makanya kita melakukan kontrol dengan melihat setiap aktifitas yang dilakukan. Misalnya, jika mereka melakukan diskusi atau seminar, kita lihat dulu siapa narasumbernya. Kontrol kita lakukan, jika punya kecenderungan masuknya ide-ide tertentu yang menjurus radikal, kita tolak.”⁸³

⁸³ Wawancara tanggal 18 September 2018

Hal yang sama juga berlaku di UIN lain, seperti di UIN Alauddin Makassar. Rektor punya kewenangan untuk melakukan seleksi terhadap kegiatan kemahasiswaan.

“Mahasiswa melakukan kekerasan dalam berbagai aksi mereka memang ada di UIN Makassar, tapi yang menjurus ke radikal beragama, itu tidak ada. Kita lakukan kontrol dengan melihat bagaimana aktifitas organisasi yang mereka lakukan.”⁸⁴

Salah satu ormawa Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang selama ini kerap dijadikan bahan tuduhan munculnya sikap radikal, justru menilai bahwa tuduhan tersebut hanya dibuat-buat. Mereka menilai justru sebenarnya orang yang tidak tahu saja yang menuduh hal tersebut.

“Kami di LDK hanya berdiskusi dan kemudian melakukan kajian keagamaan. Tapi orang sering menuduh kami macam-macam, padahal tidak ada. Kami pakai cadar dikatakan radikal, padahal tidak ada buktinya. Justru yang melarang bercadar itu yang harus dikatakan radikal.”⁸⁵

Terhadap pola pembinaan yang dilakukan, masing-masing ormawa memang memiliki cara tersendiri. Tetapi secara umum, mereka melakukannya dengan melakukan rekrutmen melalui pengumuman terbuka. Beberapa pola kaderisasi dan pembinaan adalah sebagai berikut :

1. Rekrutmen anggota baru melalui pengumuman terbuka
2. Pelatihan dasar masing-masing organisasi
3. Diskusi/kajian rutin
4. Pelatihan keterampilan

Salah satu karakteristik ormawa ini adalah memiliki jaringan ke luar kampus. Jaringan ini bisa terhubung dengan berbagai pihak, yang biasanya dilaksanakan melalui jejaring alumni atau senior keanggotaan. Jejaring

⁸⁴ Wawancara tanggal 10 Oktober 2018

⁸⁵ Wawancara dengan pengurus LDK UIN Antasari Banjarmasin, tanggal 8 Oktober 2018

alumni dan jejaring organisasi biasanya memiliki afiliasi dengan organisasi lainnya. Sebagai contoh adalah kelompok LDK yang dalam sejarah serta aktifitasnya merupakan cikal bakal pendirian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang awalnya dinamai Partai Keadilan (PK). Kelompok ini juga berafiliasi dan bahkan berbasis pada Ikhwanul Muslimin (IM) dan Jamaah Tarbiyah⁸⁶.

Kelompok LDK ada di semua UIN, kecuali UIN Suka, dan mereka melakukan aktifitas secara rutin dengan pola-pola dakwah yang mereka anut. Hubungannya dengan organisasi di luar kampus, terutama PKS, tetap berjalan, karena memang basisnya ada di organisasi ini. Beberapa kader LDK mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini tergolong biasa saja, yaitu hanya melakukan rutinitas dakwah dengan kajian-kajian yang bersifat rutin. Tetapi secara afiliasi dan rencana ke depan, kader LDK umumnya mendukung gerakan untuk masuk ke wilayah politik bernegara⁸⁷.

Sementara untuk organisasi lainnya, cenderung tidak terlalu berhubungan dengan diskusi keagamaan atau membahas topik-topik keagamaan secara mendalam. SEMA dan DEMA misalnya, lebih banyak fokus pada aspek keorganisasian dan membicarakan kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan internal kampus. Pada beberapa sisi, seperti di UIN Alauddin Makassar, kelompok ini yang sering melakukan aksi dengan berbagai karakteristiknya. Hanya saja, arah gerakan lebih pada mengkritisi berbagai kebijakan internal kampus, ataupun kebijakan pemerintahan secara luas.

⁸⁶ Armantoto Dwiyono dan Budi Kurniawan, *Politisasi Kampus : Studi Tentang Hubungan antara Partai Keadilan Sejahtera dan Lembaga Dakwah Kampus di Universitas Lampung*, Laporan Hasil Penelitian tahun 2009, FISIP Universitas Lampung.

⁸⁷ Ibid.

Khusus UIN Suka, LDK tidak diizinkan ada di kampus. Organisasi dakwah yang dibentuk adalah Kordiska (Korps Dakwah Islamiyah Sunan Kalijaga).

“Di UIN Suka tidak ada LDK. Organisasi dakwah kampus adalah Kordiska, dan itulah yang diakui secara resmi. Kordiska itu adalah tempat atau wahana untuk membangun masyarakat kampus yang memiliki toleransi dan humanis dalam beragama, berbangsa dan bernegara.”⁸⁸

Tetapi, Dr. Waryono selaku WR III UIN Suka tidak menampik jika di UIN Suka juga tampak spanduk-spanduk LDK. Baginya itu liar dan bukan organisasi resmi. Untuk ini, Waryono mengaku bahwa gerakan-gerakan seperti ini terus berlangsung dan terus mencari peluang. Pengawasan tetap dilakukan, tetapi kadang sulit untuk mengawasi secara terus menerus. Pada organisasi seperti inilah yang sebenarnya perlu kewaspadaan, karena cenderung dilakukan tertutup.

f. Kurikulum dan metode pembelajaran

Aspek kurikulum dan cara-cara pembelajaran, dari beberapa wawancara dengan para Rektor UIN, menunjukkan bahwa munculnya gerakan radikalisme beragama di kalangan mahasiswa ternyata ikut berpengaruh. Hal ini tidak lepas dari *core* lembaga pendidikan ada pada kurikulum yang akan menunjukkan sajian mata kuliah yang ditawarkan serta cara-cara penyajian dilakukan.

Rektor UIN Susqa Riau mengakui hal itu.

“Kurikulum jelas berperan, dengan kata lain kalau salah kita menyajikan mata kuliah maka salah pula pemahaman mahasiswa. Begitu pula kalau keliru dosen menyampaikan, maka keliru pula mahasiswa memahaminya.”

⁸⁸ Wawancara dengan Wakil Rektor III UIN Sunan Kalijaga, tanggal 11 Oktober 2018

Rektor UIN Syahid juga berpendapat sama, “Terhadap kurikulum jelas berperan. Kita sesuaikan dengan misi kita yaitu moderat, inklusif dan toleran. Semua kurikulum kita mengarah kesana. Begitu juga dosen dalam penyajian ikut diarahkan, terutama dengan mengoptimalkan RPS yang dibuat.”⁸⁹

Mekanisme penyusunan kurikulum di semua UIN sebenarnya sudah mengacu pada kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang kemudian diterjemahkan menjadi distingsi pada masing-masing UIN. Terhitung setelah bertransformasi menjadi UIN, banyak muatan mata kuliah pengetahuan umum (non keagamaan) yang masuk dalam ranah UIN. Hal inilah yang kemudian diadopsi dalam masing-masing mata kuliah. Kelemahan dari aspek ini adalah semakin minimnya materi yang fokus pada bidang keagamaan secara mendalam.

Hal ini diakui oleh Rektor UIN Antasari Banjarmasin. “transformasi memang kemudian merubah struktur kurikulum. Tetapi kita mensiasatinya dengan mengoptimalkan kajian agama pada semua mata kuliah. Ditambah lagi dengan pola pembelajaran melalui Ma’had.”⁹⁰

Sementara di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal ini dilakukan dengan menekankan pada distingsi yang digunakan.

“UIN Jogja kan fokusnya pada integrasi-interkoneksi. Jadi tidak ada masalah masuknya mata kuliah non agama. Justru disitu kita lakukan integrasi-interkoneksi antara mata kuliah agama ke umum. Tidak bisa dipisahkan, dan itu yang selalu kita lakukan.”⁹¹

Pada UIN Alaudin Makassar, kurikulum juga dilakukan perubahan, tetapi nilai keagamaan tetap dimasukkan. Hal ini kemudian diimbangi pula dengan membuat kegiatan untuk meningkatkan kapasitas personal

⁸⁹ Wawancara tanggal 10 Oktober 2018

⁹⁰ Wawancara tanggal 10 Oktober 2018

⁹¹ Wawancara tanggal 11 Oktober 2018

mahasiswa. Tujuannya adalah agar mereka memiliki keterampilan serta kepribadian yang utuh.

Mengacu pada Teori Kognitif, sebagaimana disampaikan oleh Reznick dan Clopfer⁹² disebutkan bahwa agar bisa menjadi seseorang dengan keterampilan yang tinggi tidak bisa hanya dengan mengetahui bagaimana melakukan beberapa pekerjaan tetapi juga harus tahu kapan menggunakan keterampilan tersebut dan menyesuaikan penggunaannya pada berbagai situasi. Lewat teori ini juga disebutkan bahwa kurikulum yang disajikan semestinya tidak hanya terfokus pada hapalan semata, tapi mengarah pada pemahaman secara praktis.

Oleh karena itu, kurikulum menjadi penting, karena kemampuan untuk menerapkan apa yang dipelajari secara teoritis, seharusnya sudah tampak pada sebaran kurikulum yang ditawarkan. Tanpa adanya sebaran ini, maka bisa dipastikan bahwa mahasiswa akan memahami semua itu secara *teks book* semata. Aplikasi di lapangan menjadi sulit dan bahkan sangat rumit, karena kurikulum tidak menjawab kebutuhan atau pengalaman praktis pelakunya. Hal inilah yang dikatakan oleh Rektor UIN Susqa bahwa kurikulum tersebut harusnya bisa menghubungkan realitas sehari-hari di masyarakat dengan kehidupan di kampus. Apa yang terjadi di kesehariannya harusnya bisa tampak dalam kehidupan kampus. Perbedaan antara realitas dengan kampus akan menyebabkan kegamangan, dan meminjam istilah Rektor UIN Antasari, ini identik dengan kegalauan.

Kurikulum sendiri sebenarnya bukanlah semata-mata struktur mata kuliah saja. Kurikulum juga mencakup pengalaman belajar yang dialami peserta didik dan kemudian mempengaruhi perkembangan perilaku dan

⁹² Reznick, Lauren B. Klopfer, Leopold E. *Toward The Thinking Curriculum: Current Cognitive Reserac.*1989. ASCD Yearbook

kemampuannya. Kurikulum dipandang dalam pengertian yang lebih luas, dimana keterikatan peserta didik tidak semata-mata ikut perkuliahan dalam kelas, namun mencakup kemampuannya untuk mengetahui dan memahami kondisi riil dari muatan kurikulum tersebut.⁹³

Dapat dikatakan bahwa kurikulum menjadi sangat strategis karena akan berhubungan dengan aktifitas mahasiswa. Oleh karena itu, peran kurikulum sangat penting dalam membentuk karakter mahasiswa dalam pembelajaran maupun aktifitas perkuliahan lainnya.

Pada masing-masing UIN, hal ini agaknya sudah dipahami, kendati tidak terlalu menjadi perhatian khusus, namun struktur kurikulum menjadi bahasan yang selalu diperhatikan. Masing-masing rektor pada UIN yang jadi objek penelitian mengaku bahwa kurikulum penting, tetapi dalam penyusunan kurikulum sebenarnya bukan diarahkan untuk mencegah radikalisme beragama. Orientasinya adalah pada capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan distingsi masing-masing UIN dan program studi yang membawahnya.

Rektor UIN Alaudin mengatakan bahwa sebenarnya tidak terlalu fokus ke radikalisme, namun revisi kurikulum memang diharuskan untuk menyesuaikan dengan tuntutan capaian pembelajaran.

“Kurikulum itu kan mengacu ke capaian pembelajaran. Itu selalu direvisi sesuai renstra kita. Memang alasannya bukan karena radikalisme, tapi *outcome*. Namun soal radikalisme akan ikut serta karena memang kita juga selalu waspada terhadap hal itu.”⁹⁴

Begitu juga dengan Rektor UIN Susqa yang berpendapat bahwa kurikulum akan terhubung dengan nilai mutu sebuah program studi.

⁹³ Asep Hery Hernawan dan Dewi Andriani, <http://repository.ut.ac.id/4040/1/PKOP4303-M1.pdf>

⁹⁴ Wawancara tanggal 9 Oktober 2018

Persoalan radikalisme akan terbawa serta karena masing-masing mata kuliah yang ditawarkan orientasinya adalah peningkatan kualitas mahasiswa secara umum.

Secara keseluruhan, Kepala LP2M UIN Syahid, yang dalam hal ini banyak melakukan kajian tentang radikalisme beragama mengatakan bahwa penyebab munculnya paham-paham tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu (1) adanya tekanan politik dari penguasa terhadap kelompok-kelompok Islam yang dianggap radikal sampai isu Komando Jihad yang dianggap mewakili radikalisme kanan, sedangkan radikalisme kiri juga mendapat tekanan-tekanan politik. Beberapa pimpinan dan tokohnya, baik dari radikalisme kanan maupun radikalisme kiri, ditangkap; (2) adanya ideologi tandingan yang terwujud dalam ideologi anti-westernisme. Hal ini disebabkan paham Barat dianggap sangat menekan kaum muslim dalam mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam atau syariat Islam; (3) adanya kebijakan pemerintah yang membuat umat Islam marah dan frustrasi karena tak mampu mengatasi dominasi ideologi, politik, ekonomi, budaya dan militer. Misalnya, lemahnya dalam mempertahankan aset negara yang lari keluar negeri, wilayah Indonesia yang diklaim dan diambil Malaysia serta kekayaan negara yang dirampas konspirator politik; (4) adanya budaya atau kultural sekularistik yang mendominasi sehingga memunculkan budaya tandingan (counter-culture) dalam bentuk resistensi terhadap budaya sekularistik yang tidak hanya menyingkirkan umat Islam, juga kehidupan umat Islam telah terpinggirkan, bahkan tertindas⁹⁵.

Berdasarkan analisis di atas tampak bahwa radikalisme bukan disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi dipengaruhi oleh banyak hal, baik internal kampus maupun eksternal. Menyelesaikannya juga tidak bisa hanya

⁹⁵ Wawancara tanggal 10 Oktober 2018

pada satu sudut pandang saja. Pendekatan individualistis dan pandangan organisatoris diperlukan pada konteks ini.

Fenomena kemunculan radikalisme ini bukanlah hal yang terjadi begitu saja. Memang banyak faktor yang menyebabkan itu terjadi, sebagaimana penjelasan di atas. Tetapi hal terpenting adalah bagaimana terjadinya perubahan diri dari yang sebelumnya tidak memahami isu, hingga kemudian malah menjadi pihak yang berlaku radikal. Ini biasanya berawal dari hubungan mahasiswa ataupun ormawa dengan pihak lain yang kemudian memberikan pengaruh-pengaruh khusus. Teori Penetrasi Sosial menjelaskan mengenai ini, bahwa semuanya memiliki tahapan masing-masing, dimana mahasiswa sebenarnya belum memahami apa-apa, kemudian menjadi pihak yang berperan. Model penetrasi yang dilakukan kelompok lainlah yang kemudian mampu melakukan *brain washing*. Diri yang sebelumnya tidak tahu menahu, akhirnya menjadi fanatik⁹⁶.

Dijelaskan oleh Presma UIN Syahid bahwa dalam rekrutmen anggota, dipentingkanlah adalah kemampuan mempengaruhi. Kelompok yang selama ini dikatakan punya indikasi radikal, biasanya merekrut anggota secara diam-diam dan tertutup. Hanya mereka yang tahu. Ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu diluar kampus yang memiliki jejaring ke dalam kampus. Memang pada kebanyakan lembaga rekrutmen dilaksanakan secara terbuka, diumumkan dan diterima. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang melakukannya secara diam-diam, melalui hubungan personal.

Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga juga mengatakan hal yang sama. Tidak menutup kemungkinan masuknya paham-paham radikal dan liberal ke dalam kampus. Secara formal sebenarnya UIN Suka sudah

⁹⁶ Altman dan Taylor, *ibid*.

melakukan proses *screening* awal dan juga memberikan batasan terhadap aktifitas kemahasiswaan. Tetapi dalam prakteknya bisa saja terjadi hal-hal yang tidak terawasi.

Mekanisme dalam teori penetrasi sosial yang menyatakan bahwa seseorang menerima informasi tertentu melalui lapisan-lapisan khusus tampak pada konteks ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masuknya paham itu diawali dengan kegalauan atau belum jelasnya arah yang ingin dicapai dari seseorang, kemudian masuk, berinteraksi dengan komunitas di kampus. Dalam interaksi ini, masuk pula berbagai pengaruh lain, seperti informasi dari berbagai media tentang isu-isu keagamaan, kebijakan pemerintah, persoalan sosial politik, korupsi, penegakan hukum, dan sebagainya. Ini secara simultan dan bertahap masuk dalam ranah kognisi seseorang. Saat ini masuk, maka tindakan-tindakan tertentu bisa saja terjadi. Penetrasi sosial akan terus dilakukan⁹⁷.

Konteks inilah yang sangat mungkin terjadi di kalangan mahasiswa, khususnya wilayah kajian. Kendati riset ini tidak mengukur seberapa besar penetrasi itu terjadi, tetapi indikasi ke arah hal itu sudah terlihat. Rekrutmen yang tidak terbuka, pola pendidikan internal di kalangan organisasi mahasiswa, bisa menjadi bagian dari membangun penetrasi tersebut.

C. Upaya Strategis Deradikalisme Beragama di Kalangan Mahasiswa

Mencermati bagaimana fenomena radikalisme di kalangan mahasiswa yang sudah dijelaskan sebelumnya, serta kecenderungan kemunculannya, maka ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang strategis dan perlu perhatian serius. Kunci terpenting memang ada di unsur pimpinan pengelola kampus, karena unsur inilah yang paling tahu dan paham dengan

⁹⁷ Bryson, *ibid.*

dinamika serta perkembangan internal masing-masing perguruan tinggi. Rektor adalah pucuk pimpinan tertinggi, karena itu kebijakan rektor akan menentukan seperti apa perlakuan dan kebijakan yang akan diambil.

Secara kelembagaan, ini berhubungan dengan perspektif dalam melihat stabilitas institusi masing-masing. Kelembagaan ini akan berhubungan dengan perspektif kebijakan, dimana kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Menurut Uphoff⁹⁸, kelembagaan diarahkan pada aspek suatu himpunan atau tatanan norma–norma dan tingkah laku yang bisa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Institusi ditekankan pada norma-norma perilaku, nilai budaya dan adat istiadat. Kunci dari efektifitas pelaksanaan kebijakan pada sebuah lembaga adalah unsur pimpinan.

Pada konteks ini dengan melihat pada fenomena-fenomena yang ada, maka tampak bahwa semua rektor sudah memiliki pengetahuan dan kekhawatiran terhadap munculnya gerakan radikal di kalangan mahasiswa, walaupun tidak melihat adanya yang terpapar secara nyata. Kekhawatiran ini bukannya tanpa alasan, tapi didasari pada realitas bahwa mahasiswa adalah kelompok yang sedang mencari pengetahuan dan sedang dalam masa pergulatan keilmuan. Istilah “galau” dilontarkan oleh Rektor UIN Antasari Banjarmasin, karena itu sangat mudah untuk disusupi dan bahkan dimasuki paham-paham yang berbau radikal.

Kendati sudah mengkhawatirkan, namun hasil wawancara menunjukkan bahwa para rektor mengaku belum menemukan adanya kasus radikalisme beragama di kalangan mahasiswanya, terutama mahasiswa aktif. Kasus Pepi Fernando yang terlibat bom buku sebenarnya bukan mahasiswa

⁹⁸ Uphoff N. 1986. Local Institutional Development. West Hartford. CT. Kumarian Press

aktif, tapi alumnus dari UIN Syahid⁹⁹. Untuk itu, para rektor menguatkan kebijakannya lebih kepada sisi preventif, khususnya penguatan pengetahuan kemahasiswaan. Langkah-langkah yang diterapkan mengarah pada penguatan kapasitas individu maupun kelembagaan secara umum, dengan kata lain tidak spesifik pada isu radikalisme.

Sementara dari sudut pandang kelembagaan yang lebih tinggi, terutama Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kemenag RI, soal kebijakan deradikalisasi beragama di kalangan mahasiswa, disebutkan sebagai otoritas masing-masing rektor. Prof. Arskal Salim, selaku Direktur Diktis menegaskan hal tersebut.

“Kalau berkaitan dengan kebijakan internal kampus, ya rektor lah yang punya kewenangan. Dari Diktis tidak melakukan intervensi, hanya sifatnya kita menghimbau saja. Tetapi yang jelas, Diktis juga memahami bahwa isu radikalisme di kalangan mahasiswa harus senantiasa diwaspadai. Untuk teknisnya kita serahkan pada kewenangan masing-masing rektor.”¹⁰⁰

Diktis juga tidak memberikan instruksi ataupun himbauan tertulis. Tetapi dalam Rencana Strategis Kemenag dan Arah Kebijakan Pendis 2015-2019 disebutkan salah satunya adalah peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada pendidikan keagamaan. Dalam beberapa forum juga selalu disampaikan bahwa kebijakan deradikalisasi harus menjadi perhatian¹⁰¹. Ini menunjukkan bahwa isu-isu soal radikalisme memang mendapat porsi perhatian tersendiri. Arskal juga mengatakan bahwa secara kelembagaan Diktis tentu mendukung langkah para rektor selagi itu ditujukan untuk kebaikan lembaga dan proses pendidikan yang

⁹⁹<https://nasional.kompas.com/read/2011/04/28/17271018/pepi.bikin.sibuk.dosen-dosen.uin>

¹⁰⁰ Wawancara tanggal 18 September 2018

¹⁰¹<http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=strategipendis>

ada. Untuk selanjutnya, para rektor bisa melakukan kreatifitas tersendiri untuk penguatannya.

Melihat posisi demikian, maka ujung tombak memang pada kebijakan para rektor. Hal-hal yang sudah diterapkan selama ini, yang menurut para rektor memiliki hubungan ke sikap radikalisme beragama bisa diidentifikasi sebagai berikut:

a. Efektifitas program Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

PBAK adalah program yang khusus ditujukan kepada mahasiswa baru di setiap perguruan tinggi. Program ini merupakan kebijakan yang berlaku umum dan sama di setiap perguruan tinggi, dengan dasarnya adalah kebijakan dari Diktis, dengan kata lain, seluruh perguruan tinggi harus melakukan hal ini. Dulunya PBAK ini dikenal dengan OPSPEK, OPDIK, dan berbagai sebutan lainnya. Pada dasarnya semua sama yang mengarah pada pemberian materi orientasi pada mahasiswa yang baru masuk ke sebuah perguruan tinggi.

Masa orientasi dianggap sebagai masa yang paling krusial, karena disinilah terjadinya peralihan dari dunia pendidikan menengah ke pendidikan tinggi. Iklim yang berbeda akan dirasakan, dan karenanya situasi *culture shock* sangat memungkinkan untuk terjadi. Oleh karena itu, masa PBAK menjadi krusial, pengenalan awal menjadi penting, terutama pengetahuan dan wawasan mengenai dunia perguruan tinggi yang akan dimasuki.

Tahun 2018, masa orientasi ini menggunakan *tag* PBAK Garuda. Ini berlaku secara nasional. Setiap UIN juga melakukan hal sama, namun dalam prakteknya bervariasi sesuai karakteristik setiap perguruan tinggi.

Dalam konteks mencegah munculnya paham radikalisme beragama di kalangan mahasiswa, momen PBAK dimaksimalkan oleh para Rektor untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan wawasan akademik.

“Ini krusial sekali, dan kita maksimalkan, walaupun waktunya sangat singkat. “Indoktrinisasi” kita lakukan pada mahasiswa baru, agar mereka paham bahwa dunia kampus itu berbeda. Alhamdulillah ini ternyata positif sekali, terbukti survey yang kita lakukan, mahasiswa menyatakan bermanfaat.¹⁰²”

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Rektor UIN Syahid, UIN Susqa, UIN Suka, dan UIN Antasari Banjarmasin. Semua menyatakan bahwa momen PBAK merupakan titik awal mahasiswa untuk mengenal seperti apa dunia kampus yang akan dijalani.

Mekanisme PBAK biasanya terbagi antara PBAK tingkat universitas dan PBAK fakultas. Pada saat ini, semua mahasiswa baru diwajibkan hadir dan ikut menjalani kegiatan yang ada. Tekanan pada PBAK terasa saat ini lebih kental pada isu-isu kebangsaan dan keagamaan, termasuk soal radikalisme. Untuk itu, di setiap momen PBAK biasanya dihadirkan narasumber dari unsur utama yaitu, Panglima Daerah Militer setempat, Kapolda, BNPT dan BNN. Empat unsur ini selalu menjadi acuan utama. Semua UIN menerapkan ini. Khusus BNN (Badan Narkotika Nasional), didasarkan atas asumsi bahwa selain soal radikalisme, soal penyalahgunaan narkotika, ikut menjadi musuh bersama yang sudah sangat mengkhawatirkan kondisinya.

¹⁰² Wawancara dengan Rektor UIN Alaudin Makassar, tanggal 17 September 2018.

Metode pelaksanaan PBAK untuk masing-masing narasumber biasanya dilaksanakan dengan cara kuliah umum dengan jatah waktu tertentu. Artinya disini durasi waktu sangat terbatas. Keterbatasan waktu sebenarnya jadi masalah tersendiri, karena efektifitas kegiatan tidak akan terlalu maksimal. Ini juga dirasakan oleh para Rektor.

“Memang waktunya sangat singkat, mungkin kurang efektif. Tetapi ini sangat bermanfaat untuk pengenalan awal. Terhadap tindaklanjut dengan pendalaman materi, kampus biasanya akan meneruskan dengan kegiatan-kegiatan lain. Tetapi PBAK tetap punya kontribusi penting.¹⁰³”

Riset ini juga menunjukkan bahwa materi-materi utama pada PBAK adalah tentang wawasan kebangsaan dan keagamaan. Hal ini disinkronkan dan dikolaborasikan dengan berbagai kegiatan yang berasal dari internal kampus, seperti penjelasan tentang keberadaan UKM-UKM serta lembaga lain di dalam kampus. Efektifitas PBAK memang bisa dipertanyakan jika sasarannya adalah pemahaman kenegaraan, kebangsaan dan keagamaan dari mahasiswa, tetapi para Rektor menyebutkan bahwa untuk tahap awal ini sudah cukup baik, tinggal dilanjutkan dengan materi-materi berikutnya dalam aktifitas kemahasiswaan.

b. Efektifitas pendidikan melalui Ma’had al Jamiyah

Pendidikan melalui Ma’had al Jamiyah atau metode pendidikan berasrama, dimiliki oleh seluruh UIN yang ada. Ini memang sudah merupakan kebijakan yang dirancang secara keseluruhan di semua PTKI. Ma’had diatur oleh ketentuan yang cukup kuat yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan

¹⁰³ Wawancara dengan Rektor UIN Syahid, tanggal 18 September 2018

Islam sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Aturan ini diturunkan lagi dalam instruksi Menteri Agama No. Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/2374/2014 tentang Instruksi Penyelenggaraan Pesantren Kampus (*Ma'had Al-Jami'ah*).

Model umum pendidikan ini adalah kampus menyediakan bangunan asrama secara fisik yang diperuntukkan bagi mahasiswa untuk tinggal dalam periode tertentu. Ma'had dikelola oleh unit khusus dengan dipimpin oleh seorang ketua. Tetapi asrama tidak sekedar tempat menginap, polanya disesuaikan dan dirancang secara khusus untuk juga dilakukan pendidikan tertentu. Oleh karena itu, asrama lebih menyerupai aktifitas seperti layaknya pesantren, yaitu ada Ketua Ma'had, kurikulum, jadwal pembelajaran dan aktifitas harian. Mahasiswa yang menempati Ma'had harus mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara intensif seiring dengan aktifitas harian mereka.

Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Diktis mengatakan bahwa Ma'had jangan hanya difungsikan sebagai tempat “nginap” semata, tetapi juga menjadi tempat belajar mahasiswa terutama yang intensif keagamaan. Menurutnya ada dua model aksentuasi program kurikuler melalui Ma'had yaitu “melengkapi” dan “mendalami”. Melengkapi maksudnya adalah kurikulum yang diarahkan untuk mempersiapkan mahasiswa sehingga dapat menjalankan peranan dirinya sebagai seorang muslim dan mampu memiliki penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dengan baik. Dalam konteks ini, ilmu-ilmu agama yang bersifat fardlu ‘ain menjadi alat ukur minimal yang harus diajarkan. Sasarannya diutamakan kepada mahasiswa yang tidak

memiliki latar belakang pendidikan keagamaan Islam yang cukup. “Mendalami” maksudnya adalah kurikulum yang diarahkan untuk menghasilkan lulusannya menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin). Sasaran untuk kurikulum ini adalah mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan Islam yang baik, seperti lulusan Madrasah Aliyah atau lulusan SMA/SMK yang berada di lingkungan pondok pesantren atau lulusan pendidikan yang cukup kuat penguasaannya di bidang kutub al-turats (kitab kuning)¹⁰⁴.

Jelas bahwa kebijakan tentang program Ma’had adalah kebijakan Diktis yang kemudian harus diterapkan di semua PTKI, sebuah kebijakan yang kemudian tampak berbeda dengan PTN. Ruhnya sebenarnya adalah menjaga marwah pendidikan agama tetap muncul.

Para rektor yang diwawancarai dalam riset ini, sepakat dengan hal itu, dan kegiatan Ma’hadpun sudah dilakukan. Banyak kelebihan yang didapat dan para rektor memiliki variasi sendiri dalam memanfaatkan Ma’had. Masalah yang muncul hanya satu, keterbatasan daya tampung.

Rektor UIN Susqa menjelaskan hal ini.

“Ma’had tentu saja kita lakukan dan itu sarana pendidikan yang sangat efektif dalam membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa. Pada ma’had dibuat program dan kurikulum tersendiri, sehingga mahasiswa bisa fokus pada perkuliahan reguler dan juga kuliah di Ma’had¹⁰⁵.”

¹⁰⁴ Suwendi dalam <https://kemenag.go.id/berita/read/509062/penguatan-moderasi-islam-di-ptki>.

¹⁰⁵ Wawancara tanggal 10 Oktober 2018

Hal yang hampir sama juga dilakukan di UIN Syahid. Mahasiswa diwajibkan masuk Ma'had dan kemudian mengikuti pendidikan secara rutin sesuai kurikulum yang diterapkan.

“Ma'had sangat efektif, karena pola pendidikannya bersifat intensif. Ini bagus sekali karena bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa. Kita wajibkan itu, tetapi memang ma'had sendiri sangat terbatas kapasitasnya. Kita maksimalkan apa yang ada saja.”¹⁰⁶,

Mengandalkan kepada aktifitas ma'had juga dilakukan di Jogjakarta. Prof Judian Wahyudi, Rektor UIN Suka mengatakan hal tersebut.

“Kita malah mewajibkan semua mahasiswa baru, terutama yang berasal dari pendidikan umum, untuk ikut kegiatan ma'had. Mereka diwajibkan di awal-awal perkuliahan. Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas ma'had, kita adakan kerjasama dengan pesantren-pesantren yang ada di sekitar kita. Itu yang dimaksimalkan. Mahasiswa diinapkan di pesantren dan melakukan kegiatan pendidikan sesuai pola disana.”¹⁰⁷,

UIN Suka melaksanakan program pembinaan ma'had dengan menggunakan pesantren mitra. Hal ini sangat dimungkinkan karena di wilayah UIN Suka banyak terdapat pesantren-pesantren, sehingga memungkinkan untuk menjalankan program ini. Terhitung sejak 2018, UIN Suka sudah resmi menggunakan model mitra pesantren. Hal ini dituangkan dalam pengumuman Rektor UIN Suka nomor B-3810/Un.01/R/PP.00/07/2018 Tentang Kewajiban Mengikuti Pesantren Untuk Mahasiswa Baru Prodi Umum Tahun Akademik 2018/2019.

¹⁰⁶ Wawancara tanggal 10 Oktober 2018

¹⁰⁷ Wawancara tanggal 10 Oktober 2018

Ketentuan pada model yang dikembangkan oleh UIN Suka ini dikhususkan untuk mahasiswa yang berasal dari pendidikan non agama, serta khusus pula untuk program studi umum. Tampak disini bahwa tekanan program Ma'had dengan pesantrenisasi adalah untuk mahasiswa yang belum memiliki pengetahuan agama, seperti kemampuan baca tulis Al Qur'an. Melalui program pesantren ini diharapkan alumnus UIN Suka menguasai pengetahuan-pengetahuan dasar keagamaan. Pertanyaan yang muncul mungkin apakah ini berkorelasi dengan mencegah munculnya sikap radikalisme? Tentu saja sulit untuk mengukurnya. Tetapi Prof Julian mengatakan bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk membangun dan menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang agama.

“Kita berharap ini bisa menjadi bekal, saya percaya bahwa pengetahuan agama yang baik akan berpengaruh pada sikap keagamaannya. Dalam model pesantrenisasi ini juga tidak hanya soal baca tulis Al Qur'an saja, tetapi juga tentang wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan.”¹⁰⁸

Model pesantrenisasi ini tidak hanya dilakukan di UIN saja, dimana IAIN Purwokerto sebenarnya sudah pernah memulai melakukan ini sejak 2017 lalu¹⁰⁹. Model ma'had dengan pesantrenisasi ini sebenarnya adalah variasi dan kreatifitas di masing-masing UIN. Bagi UIN lain, ada yang tetap dengan menggunakan cara ma'had dan kemudian membuat variasi pula.

UIN Antasari Banjarmasin melakukan ini dengan menggunakan ma'had model konvensional, tetapi melakukan proses yang bergilir, disebabkan

¹⁰⁸ Wawancara tanggal 10 Oktober 2018

¹⁰⁹ <http://iainpurwokerto.ac.id/iain-purwokerto-mencetak-santri-akademisi/>

terbatasnya kapasitas masing-masing ma'had. Caranya adalah dengan melakukan rotasi setiap dua bulan sekali.

“Ma'had kita juga jadi andalan. Setiap dua bulan kita gilirkan, khusus mahasiswa baru. Disini akan dididik secara intensif tentang kegiatan keagamaan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Termasuk juga materi kepribadian.^{110,}”

Program ma'had dengan beberapa variasinya juga dilakukan di UIN Alauddin Makassar. Mereka melakukan dengan metode berbeda, yaitu dengan menjadikan program khusus yang disebut Character Building Training (CBT) Program. Program ini berlangsung selama setahun, yang dilaksanakan di sela-sela perkuliahan reguler. Ini juga dikhususkan untuk mahasiswa baru. Rektor UIN Alauddin menjelaskan,

“Program CBT kita rancang untuk melakukan pendidikan khusus kemahasiswaan, yang tekanannya adalah pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa. Tentu saja dengan nilai-nilai keislaman.^{111,}”

Model CBT di UIN Makassar terkesan cukup unik, karena materi yang disampaikan bukan semata-mata soal keagamaan dan kebangsaan, tetapi juga tentang kepribadian. Metodenya pun dengan menggunakan cara-cara yang dianggap komunikatif seperti *outbond* dan dinamika kelompok. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendidik pengetahuan keagamaan dan kepribadian mahasiswa, sehingga saat mereka masuk di UIN akan sudah memiliki wawasan yang cukup. Dalam konteks radikalisme beragama, bagi Rektor UIN Makassar memang tidak terlalu fokus ke arah itu, tetapi

¹¹⁰ Wawancara dengan Rektor UIN Antasari, tanggal 11 Oktober 2018

¹¹¹ Wawancara tanggal 11 Oktober 2018

diyakini bahwa ini bisa membentuk karakter kepribadian mahasiswa yang lebih baik, sehingga celah-celah masuknya paham radikal bisa dihindari.

Di UIN Syahid Jakarta, program Ma'had bisa dianggap sebagai salah satu cara yang langsung membina mahasiswa agar tidak berlaku radikal. Wakil Rektor III UIN Syahid mengatakan bahwa dalam ma'had banyak yang dipelajari, khususnya masalah keagamaan, ini diyakini mampu membangun karakter keagamaan mahasiswa. Senada dengan ini, Dekan FISIP UIN Syahid juga berkata yang sama,

“di kita ma'had itu cukup efektif. Tetapi memang masih ada keterbatasan karena kelengkapan fasilitas dan daya tampung terhadap seluruh mahasiswa baru, masih menjadi kendala.”¹¹²,

Apa yang dijelaskan diatas sebenarnya pola yang mengarah pada indoktrinasi paham keagamaan sesuai distingsi masing-masing UIN, serta disesuaikan dengan kondisi masing-masing UIN. Tetapi ma'had dianggap cara yang efektif, kendati sulit karena terbatasnya daya tampung ma'had.

Dalam bahasa Suwendi, model ma'had yang memang khusus dilakukan di PTKIN, disebabkan karena memang banyak pekerjaan rumah yang belakangan muncul, termasuk efek perubahan IAIN ke UIN. Salah satunya adalah keluasan input mahasiswa yang masuk ke UIN.

Data awal menunjukkan bahwa mahasiswa baru PTKIN yang berlatar belakang pendidikan Madrasah Aliyah ternyata tidak lebih dari kisaran 15 hingga 20 %. Sisanya, sekitar 80 hingga 85% berlatar belakang pendidikan dari SMA, SMK dan Paket C. Angka ini, di satu sisi cukup

¹¹² Wawancara tanggal 10 Oktober 2018

menggembirakan. Bahwa ternyata PTKIN diminati lulusan pendidikan umum. Namun, data ini juga menyisakan problem tersendiri, terutama pada kapasitas minimal pengetahuan agama yang dimilikinya. Gelar Sarjana Agama (S.Ag) akan menjadi taruhan akan kualitas keagamaan yang dimiliki lulusan PTKI. Kondisi ini perlu diseriusi pimpinan dan stakeholder agar jangan sampai ada lulusan PTKI yang tidak dapat baca-tulis Alquran dan/atau tidak mengetahui kewajiban keagamaan yang melekat pada dirinya sebagai seorang muslim (beban fardlu ain)¹¹³.

Selain itu, Suwendi juga mengatakan bahwa pasca transformasi kelembagaan dari IAIN ke UIN, terdapat fakta tentang merosotnya peminat program studi keislaman, terutama yang berbasis *tafaqquh fiddin*. Program studi semisal Tafsir Hadis, Aqidah dan Filsafat, Perbandingan Agama, Perbandingan Mazhab, serta Jinayah dan Siyasa langka peminat. Bahkan, untuk mempertahankannya perlu langkah afirmatif, berupa beasiswa. Padahal, DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) PTKI adalah *tafaqquh fiddin*. Untuk itu, transformasi kelembagaan PTKI, dari IAIN ke UIN, misalnya, jangan sampai melunturkan identitas dan DNA-nya di bidang *tafaqquh fiddin* itu¹¹⁴.

Oleh karena itu, dengan adanya program ma'had dengan berbagai variasinya diyakini para rektor sebagai salah satu alternatif untuk mempertahankan ruh Islam pada UIN, sekaligus juga mengajarkan sikap-sikap moderat dan penghargaan terhadap perbedaan di kalangan mahasiswa. Minimnya wawasan keagamaan dan kebangsaan, sebagaimana indikasi awal yang disampaikan, diharapkan bisa menjembatani kekurangan tersebut. Sekaligus juga pada sisi ini

¹¹³Suwendi, <https://kemenag.go.id/berita/read/509062/penguatan-moderasi-islam-di-ptki>

¹¹⁴ Ibid.

menunjukkan bahwa secara keseluruhan, memang materi-materi keislaman sudah mengalami pengurangan persentase, ketimbang materi umum, sehingga perlu program khusus untuk menutupinya.

c. Program khusus pembinaan intensif mahasiswa melalui dosen PA

Pembinaan khusus bagi mahasiswa melalui dosen PA sebenarnya bukan hal baru, tetapi polanya yang dirubah sehingga lebih komunikatif dan intensif. Terhadap hal ini, beberapa rektor menyampaikan bahwa pembinaan intensif bukan disebabkan oleh adanya kasus, tetapi lebih kepada penguatan dan pemberdayaan. Pihak UIN melalui fakultas dan program studi masing-masing, memberikan pembinaan kepada beberapa mahasiswa secara langsung. Dosen PA (Penasehat Akademik) menjadi ujung tombak yang berhubungan secara langsung dengan mahasiswa.

Selama ini ada kecenderungan bahwa dosen PA tidak berperan dengan baik, hanya berhubungan dengan mahasiswa saat akan masuk peralihan semester. Dalam konteks idealnya, dosen PA diibaratkan sebagai orang tua dari mahasiswa saat berada di kampus. Diskusi dan konsultasi seharusnya rutin dilakukan, tidak hanya tentang kegiatan perkuliahan, juga tentang masalah-masalah lainnya. Sisi ini yang selama ini cenderung terlupakan, sehingga peran dosen PA kerap sebagai alat legitimasi pengisian Kartu Rencana Studi saja.

Terhadap hal inilah, di UIN Syahid, peran dosen PA ini dimaksimalkan. Memang tidak dalam bentuk tertulis, tetapi himbauan yang selalu disampaikan saat ada kegiatan-kegiatan.

“Dosen PA juga dilibatkan, tentu saja. Kita selalu himbau agar para dosen mengawasi dan melihat perkembangan masing-masing peserta didiknya. Selama ini mungkin kurang komunikasi, tetapi belakangan kita coba intensifkan. Gunanya adalah untuk mendeteksi persoalan-persoalan

yang dihadapi oleh mahasiswa. Jika ada masalah, harusnya itu bisa dibicarakan dengan dosen PA.”¹¹⁵

Pengaktifan dosen PA juga dilakukan di UIN lainnya, hanya saja aktifitas dosen PA ini tidak terlalu menonjol. Beberapa mahasiswa mengatakan bahwa masalah di dosen PA ini adalah kesibukan para dosen, sehingga intensitas untuk bertemu dengan mahasiswa juga sulit.

Prof Yusron Razak, WR III UIN Syahid mengatakan bahwa ketentuan tentang dosen PA sudah standar di UIN, tinggal sekarang ditingkatkan sehingga mahasiswa merasa memiliki pendamping selama di kampus. Apabila ada mahasiswa yang mulai terlihat mengarah pada sisi radikal, itu langsung dipanggil dan diajak dialog. Peran dosen PA besar disini. Begitu juga ketika ada mahasiswa yang memakai cadar, yang seringkali dianggap kelompok yang rawan radikal, itu akan dipanggil dan diajak berdiskusi. Tekanannya bukan melarang, tetapi menyesuaikan dengan pemaaman yang seharusnya dilakukan.

d. Program pembinaan khusus mahasiswa.

Sedikit berbeda dengan model pembinaan melalui ma’had, terdapat juga pola-pola pembinaan yang diterapkan di beberapa UIN tanpa melalui ma’had. Pembinaan jenis ini biasanya memiliki jangka waktu tertentu dan capaian-capaian tertentu pula. Pembinaan yang dilakukan lebih difokuskan pada satu aspek saja.

UIN Antasari Banjarmasin adalah salah satu UIN yang melakukan program khusus. Nama program yang dibuat adalah Kios Bakat dan Minat Mahasiswa yang fokus pada empat bidang utama yaitu, Tilawah, Kaligrafi Islami, MC dan Etika Kepribadian, serta Menulis Kreatif.

¹¹⁵ Wawancara tanggal 18 September 2018

Kebijakan mengenai ini dituangkan melalui SK Rektor No. 197 tahun 2016.

“Dari awal saya katakan bahwa persoalan di mahasiswa, terutama mahasiswa baru adalah kegalauan, yaitu kebingunan apa yang akan dicapai nantinya. Nah, kita buat salah satu program yaitu Kios Bakat dan Minat Mahasiswa, semacam pelatihan khusus bagi mahasiswa yang berminat untuk ikut.”

Kios Minat dan Bakat memiliki tujuan dasar yaitu :

- (a) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang kemampuan minat dan bakat
- (b) Membantu merencanakan dan membuat keputusan mengenai pilihan pendidikan maupun pekerjaan
- (c) Sarana untuk mengetahui sedini mungkin bakat-bakat yang dimiliki
- (d) Membekali peserta dengan pengetahuan teoritis dan praktis tentang lagu-lagu dan irama dalam naghham Al Qur'an
- (e) Peserta dapat mengaplikasikan maqam naghham Al Qur'an dengan benar pada ayat manapun.

Untuk bisa melaksanakan ini, UIN Antasari membentuk kepanitiaan sendiri dan dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model seperti ini ternyata bisa membantu mahasiswa untuk mengarahkan capaian apa yang akan mereka dapatkan setelah tamat kuliah. Ini yang dikatakan oleh Rektor UIN Antasari yaitu membantu menjawab kegalauan mahasiswa. Pertanyaannya adalah, apakah upaya ini memiliki korelasi dengan sikap radikalisme yang bisa muncul?

“Saya yakin, orang yang terlibat dalam tindakan radikal, atau gampang terpapar paham-paham seperti itu adalah mereka yang belum memiliki

fokus pada hidupnya. Kalau mereka sudah tahu arah masa depannya kemana, saya percaya mereka tidak akan berbuat yang macam-macam.”¹¹⁶

Selain cara di atas, UIN Antasari juga mengembangkan Program Kader Ulama. Ini merupakan kegiatan khusus yang tujuannya adalah mencetak mahasiswa-mahasiswa yang bisa menjadi contoh bagi mahasiswa lainnya, bahkan nanti menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Khusus program ini diarahkan pada mahasiswa yang memang terlihat memiliki prestasi akademik tinggi. Mereka dibina secara khusus untuk memperdalam pengetahuan keagamaan dan juga pengetahuan sosial. Tujuan praktisnya adalah mencetak kader-kader ulama masa depan. Sedangkan tujuan yang lebih jauh adalah menumbuhkan keinginan bagi mahasiswa lain untuk aktif dalam kegiatan kampus sekaligus meningkatkan pengetahuan akademiknya.

Apa yang disampaikan oleh Prof. Mujiburrahman di atas kiranya memiliki kemiripan dengan apa yang dilakukan di UIN Makassar dengan CBP nya. Tekanannya adalah pada peningkatan kapasitas masing-masing individu mahasiswa dengan menggunakan pendekatan psikologis. Memang tidak mengarah langsung pada sisi radikalisme atau memiliki tujuan langsung pada aspek tersebut, tetapi para Rektor punya keyakinan bahwa semakin disibukannya seseorang dengan aktifitas positif, apalagi berkaitan dengan masa depannya, maka akan semakin kecil peluangnya untuk terpapar paham-paham yang bisa merusak.

¹¹⁶ Wawancara dengan Rektor UIN Antasari, tanggal 17 September 2018

Keyakinan psikologis ini agaknya menjadi hal penting bagi para Rektor, dimana sisi mendasar sebenarnya adalah menekankan aspek preventif, bukan pada sikap penindakan.

Aspek psikologis yang jadi pertimbangan juga dilakukan dengan mendorong daya saing di antara mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Hal ini diwujudkan dengan bentuk pemberian reward kepada mahasiswa-mahasiswa yang dianggap teladan. Di UIN Antasari Banjarmasin hal ini dilaksanakan dalam bentuk pemilihan mahasiswa teladan pada semester 7. Setiap mahasiswa yang memenuhi kriteria dari sisi kemampuan akademik dan non akademik akan diusulkan untuk menjadi mahasiswa teladan dan kemudian diberikan penghargaan khusus. Hal ini dilakukan agar memunculkan keinginan bagi mahasiswa lain untuk terus memantapkan prestasi akademiknya.

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap ormawa

Aktifitas ormawa seringkali menjadi sorotan jika sudah membahas tentang kegiatan yang dilakukannya dalam kampus. Hal ini disebabkan karena memang sebuah ormawa biasanya memiliki aktifitas tersendiri. Kajian-kajian dan diskusi-diskusi yang dilakukan ormawa biasanya bersifat kritis dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan persoalan ketidakadilan, terutama jika membahas isu-isu terkait dengan agama, sosial, ekonomi dan politik.

Setiap kampus memiliki ormawa masing-masing, yang variasinya tergantung pada kebijakan setiap lembaga. Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa adalah ormawa yang selalu ada di setiap perguruan tinggi, dijadikan sebagai wadah besar dalam aktifitas mahasiswa. Tetapi dalam konteks pemikiran kritis tentang isu-isu keagamaan, apalagi

sampai pada taraf radikalisme, dua lembaga ini jarang menjadi perbincangan.

Rektor UIN Antasari Banjarmasin menjelaskan bahwa ormawa tetap diawasi dan dibina, karena seringkali jadi pintu masuk berbagai paham dan pemikiran lain.

“Kita awasi dan bina terus, apalagi disini pernah ada kader-kader HTI, semasa kelompok ini masih kuat. Sekarang terus kita pantau, dan biasanya ini dilakukan melalui koordinasi pada WD 3 di fakultas masing-masing. Setiap WD 3 diminta untuk aktif dan melihat bagaimana perkembangan setiap ormawa.”¹¹⁷”

Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari, bahwa setiap ormawa harus selalu dimonitor perkembangannya.

“Ada satu ormawa di Fak Dakwah yang rawan disusupi yaitu LDK As-Syifa. Organisasi rutin mengadakan diskusi dan pengajian dengan mengundang berbagai narasumber dari luar dan dalam. Jika narasumber berasal dari luar, kami harus tahu latarbelakangnya, tidak bisa sembarangan. Itu bentuk kontrol kita ke mereka.”¹¹⁸”

Selektif dalam melihat dan mencermati perkembangan kegiatan kemahasiswaan juga dilakukan pada UIN lainnya. UIN Syahid juga menegaskan hal yang sama.

“Kegiatan ormawa selalu diawasi, apapun bentuknya. Ini diserahkan ke WR 3 dan WD 3. Apabila ada ormawa akan melaksanakan seminar atau

¹¹⁷ Wawancara tanggal 10 Oktober 2018.

¹¹⁸ Wawancara dengan Dr Ahmad Salabi, M.Pd, WD 3 Fak Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari. Wawancara tanggal 11 Oktober 2018

diskusi, kita cek dulu narasumbernya siapa. Jika narasumber tersebut ternyata punya catatan kurang baik, kita minta diganti.¹¹⁹”

Kontrol ini sangat mungkin dilakukan, karena sesuai dengan mekanisme organisasi kampus, seluruh pendanaan terpusat pada rektorat. Rektor bisa menolak usulan mahasiswa, yang efeknya pendanaan ditolak dan kegiatan dibatalkan. Cara seperti ini kerap dilakukan, dan menurut para Rektor cukup efektif untuk membatasi ruang gerak masuknya paham-paham negatif secara langsung ke mahasiswa.

Aktifitas ormawa tentu bukan semata-mata pada organisasi internal kampus saja. Hampir di semua kampus, ormawa internal juga memiliki hubungan dengan organisasi eksternal. Organisasi ini bahkan memiliki kepengurusan dalam kampus yang anggotanya adalah mahasiswa itu sendiri. Organisasi yang lazim adalah HMI dan PMII yang basis massanya adalah mahasiswa.

Terhadap organisasi ini, pihak UIN tidak menerapkan kebijakan pelarangan, tetapi membiarkan tumbuh dan berkembang. Hanya saja, dari pengamatan dan pengetahuan para Rektor, organisasi-organisasi ini tidak mengarah pada aktifitas yang bisa memunculkan sikap-sikap radikal di kalangan mahasiswa.

Rektor UIN Riau mengatakan tentang hal ini.

“HMI dan PMII ada di sini, dan mereka berjalan biasa saja. Sejauh ini tidak ada masalah. Apabila sudah macam-macam baru kita akan tindak. Mereka lebih banyak pada pengajaran berorganisasi dan latihan kader ke mahasiswa. Tidak masalah.”

¹¹⁹ Wawancara dengan Rektor UIN Syahid, tanggal 18 September 2018

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rektor UIN Syahid, UIN Antasari, UIN Suka dan UIN Alaudin. Semua masih dalam koridornya.

“Semua baik-baik saja. Memang dulu pernah ada masalah, ketika HTI masih aktif. Kadernya ternyata juga ada di kalangan mahasiswa, tetapi setelah HTI dibubarkan, dengan sendirinya mereka juga menghilang.¹²⁰”

Hal yang sedikit menjadi perhatian adalah aktifitas LDK, yang memang memiliki basis massa cukup banyak di kalangan mahasiswa. Terhadap hal ini, pola yang dilakukan adalah dengan terus memantau perkembangan organisasinya, baik secara administratif maupun secara praktis. Secara praktis yang dimaksud disini adalah pengamatan secara langsung apa yang dilakukan organisasi tersebut. Kewenangan ini ada pada WD 3 masing-masing fakultas. Sejauh pengamatan para rektor, sebenarnya LDK tidak punya masalah serius. Organisasi ini lebih banyak melakukan kajian dakwah dan tidak menjurus paham-paham yang radikal. Hanya saja secara fisik memang keanggotaan LDK agak berbeda dengan ormawa lain, seperti penggunaan jilbab panjang dan bercadar. Ini yang dalam asumsi umum dianggap eksklusif dan tertutup. Beberapa aktifis mahasiswa LDK justru berpandangan berbeda mengenai ini, salah satunya adalah aktifis LDK UIN Antasari.

“Kami ini selalu jadi bahan tudingan, dikatakan radikal, tertutup dan sebagainya, hanya gara-gara kami memakai cadar. Padahal kami biasa-biasa saja. Seringkali karena kami pakai cadar, dosen mengusir kami dan

¹²⁰ Wawancara dengan Rektor UIN Alauddin, tanggal 10 Oktober 2018

tidak boleh ikut kuliah. Kalau begini kan sebenarnya dosen itu justru yang radikal.¹²¹”

Pada kenyataannya, LDK Asy-Syifa justru ingin membuktikan ke publik bahwa organisasi LDK bukanlah organisasi kekiri-kirian dan tersusupi paham radikal. Mereka mengembangkan berbagai kegiatan pengajian, diskusi keagamaan dan sosial. Dalam beberapa kegiatan mereka juga kerap melakukan aktifitas sosial kemasyarakatan. Tujuannya, selain untuk amar ma’ruf juga membantah tudingan publik tentang cadar sebagai radikal.

Ali Muhannif dari UIN Syahid mengatakan bahwa lantaran pemahaman mahasiswa (baru) terhadap agama Islam masih lemah, sehingga lebih mudah dipengaruhi. Mereka inilah yang menjadi target dari organisasi-organisasi keagamaan yang ada di kampus. Di UIN Syarif Hidayatullah terdapat Lembaga Dakwah Kampus, dan beberapa mahasiswi menggunakan cadar, meski penggunaan cadar itu belum menjamin si pemakainya memiliki pemikiran radikal. Bagi UIN Syahid, mahasiswi yang bercadar itu biasanya diajak dialog oleh dosen-dosen dimana mahasiswi itu kuliah agar tetap menggunakan busana yang dapat menutup aurat, misalnya menggunakan hijab.

Wakil Rektor III UIN Syahid, Prof. Dr. Yusran Razak, MA, mengatakan bahwa organisasi-organisasi mahasiswa di lingkungan UIN ini berada di dalam pengawasan pihak rektorat di tingkat universitas, dan wakil dekan III di tingkat fakultas. Hampir dapat dipastikan organisasi mahasiswa UIN Syahid bersih dari paham radikalisme agama. Meskipun, ada

¹²¹ Wawancara dengan Mahdalina, aktifis LDK Asy-Syifa UIN Antasari Banjarmasin, 10 Oktober 2018

organisasi mahasiswa seperti Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang dinilai sebagai organisasi yang menyebarkan paham radikal hanya dikarenakan anggotanya terdapat menggunakan cadar. Radikalisme agama tidaklah dapat diukur dengan busana, meski demikian tetap dilakukan pengawasan dan bimbingan serta berdialog dengan mahasiswa yang mengenakan cadar yang biasanya dilakukan oleh para dosen.

Dikatakan oleh WR III UIN Syahid bahwa pimpinan-pimpinan organisasi mahasiswa sudah memahami bahwa yang dikembangkan UIN Syarif Hidayatullah itu adalah Islam moderat atau Islam wasatiah. Di samping itu, yang senantiasa dikemukakan oleh Rektor adalah mengembangkan ciri khasnya dengan mengajarkan pluralisme, intoleran dan inklusif. Ketiga hal ini juga menjadi cara berpikir para pengurus organisasi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Semua kegiatan mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan pluralisme, intoleran dan inklusif.

Pendapat di atas yang kemudian juga diamini oleh oleh Presiden Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Dikatakannya bahwa BEM UIN akan mengajak dan berdialog dengan ormawa lainnya.

“Seperti dengan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) itu, biasanya, saya selaku presiden mahasiswa mengajak mereka berdialog mengenai pengembangan Islam moderat atau Islam Wasatiah. Mereka menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan LDK senantiasa mengacu pada cita-cita UIN Syarif Hidayatullah, seperti mengembangkan intoleran, inklusif dan pluralitas. Ormawa hanya mengajarkan bagaimana menunaikan perintah-perintah agama Islam. Ormawa UIN Syahid tidak boleh melenceng dari garis Islam moderat atau Islam wasatiah, maka

dikembangkan pemikiran mengenai pluralisme, inkusifisme dan intoleran.^{122,}

Sementara itu, di UIN Suka, pengawasan dan pembinaan terhadap ormawa tampak cukup ketat. Setidaknya, larangan aktifitas LDK di kampus adalah salah satu bukti. Dikatakan oleh WR III UIN Suka bahwa semua ormawa ada di bawah pengawasan.

“Organisasi mahasiswa (ormawa) di lingkungan UIN Sunan Kalijaga berada dalam pengawasan, meskipun tetap diberikan kebebasan. Di UIN Sunan Kalijaga, oerorganisasi mahasiswa di tingkat universitas ada Dewan mahasiswa dan Senat Mahasiswa, disamping ada 20 UKM. Semua organisasi ini kegiatannya mengacu pada kegiatan-kegiatan berupa pengembangan kesadaran yang berkaitan dengan Islam moderat atau Islam Wasattiyah, juga mengembangkan sikap inklusifisme, toleransi dan kebhinekaan. Kegiatan mahasiswa tersebut diharapkan dapat menangkal paham-paham radikalisme.”¹²³

Sebagai bagian dari bentuk pengawasan ini, di UIN Suka diberlakukan ketentuan bahwa sejak mahasiswa baru masuk ke kampus UIN Sunan Kalijaga, maka mereka harus menandatangani surat pernyataan yang isinya adalah (1) mentaati kode etik mahasiswa, dan (2) tidak akan terlibat dengan organisasi yang anti Pancasila dan NKRI. Jika dalam perjalanannya nanti terdapat mahasiswa yang melanggar pernyataan yang telah dibuat oleh mahasiswa tersebut, maka akan dikeluarkan dari kampus UIN Sinan Kalijaga. Ketentuan ini juga berlaku untuk ormawa.

¹²² Wawancara tanggal 9 Oktober 2018

¹²³ Wawancara tanggal 11 Oktober 2018

f. Membuka ruang dialog dengan mengedepankan perspektif kenusantaraan. Mekanisme ini sebenarnya bagian dari pengaktifan mekanisme dosen Pembimbing Akademik (PA) sebagaimana sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Akan tetapi ruang dialog yang dibuka disini diperluas tidak hanya dengan dosen PA, juga melingkupi dosen atau tenaga kependidikan yang lain. Secara tertulis memang ini tidak dijadikan kebijakan formal oleh para Rektor. Tetapi himbauan lisan selalu disampaikan yang tekanannya adalah arahan agar hubungan dosen dengan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan tenaga kependidikan lebih diperkuat dan dipererat. Hubungan yang dimaksud tidak hanya sebatas kepentingan kuliah dan urusan administrasi saja.

“Sebenarnya semua dosen dihimbau untuk selalu dekat dengan mahasiswa. Dalam arti kata, jika ada mahasiswa yang bertanya atau berkonsultasi, agar dilayani. Kita juga tekankan pentingnya pemahaman tentang keislaman dan kenusantaraan. Itu selalu disampaikan dalam berbagai pertemuan.¹²⁴”

Rektor UIN Makassar juga mengatakan bahwa pihak rektorat dan para dosen selalu melakukan pengawasan terhadap mahasiswa. Jika ada yang terindikasi bermasalah, maka akan segera didekati dan ditanyakan. Disinilah ruang dialog dibuka, jadi tidak hanya dari mahasiswa tetapi juga dari dosen itu sendiri.

Rektor melakukan kebijakan konsultasi ini melalui WR 3 dan WD 3 masing-masing fakultas. Pola seperti ini sebenarnya sudah lama, dalam arti kata sudah terjadi secara alamiah saja, terutama aspek kedekatan hubungan dosen dengan mahasiswa. Hanya saja pada konteks sekarang,

¹²⁴ Wawancara dengan Rektor UIN Alauddin Makassar, tanggal 10 Oktober 2018

penekanan pada wilayah kenusantaraan (tidak spesifik menyebut Islam Nusantara), menjadi perhatian tersendiri. Rektor UIN Suka mengatakan hal ini.

“Kita selalu menyarankan kepada dosen dan unsur lainnya agar senantiasa menjaga dan menjalin hubungan dengan mahasiswa. Dalam arti kata jika mahasiswa membutuhkan ruang-ruang konsultasi dan dialog, dosen harus menyediakan waktu. Itu himbauan, kendati tidak dalam bentuk kebijakan tertulis.”¹²⁵

Ruang-ruang dialog ini sebenarnya adalah pendekatan psikologis juga, yang utamanya adalah untuk membangun kedekatan hubungan antara dosen dengan mahasiswa, sehingga kegalauan-kegalauan dari mahasiswa bisa terjawab.

“Sebenarnya kan mahasiswa ini masih mencari-cari, atau belum menemukan formula yang tepat. Mereka sedang dalam taraf belajar, karena itu ruang dialog harus dibuka seluas mungkin. Dosen kita himbau, walaupun itu tidak diwajibkan. Hemat saya, dosen-dosen kita paham dan mereka sudah melakukan itu.”¹²⁶

Membuka ruang dialog seperti ini, agaknya bukan hal khusus. Kekhasan hanya pada adanya upaya khusus dengan menghimbau dosen agar lebih dekat dengan mahasiswa. Fokusnya adalah pada pendekatan secara psikologis. Strategi ini mungkin tidak terlihat berdampak langsung, tetapi para rektor meyakini bahwa ini adalah salah satu cara untuk menjembatani salah informasi yang didapatkan mahasiswa.

¹²⁵ Wawancara tanggal 11 Oktober 2018

¹²⁶ Wawancara dengan Rektor UIN Antasari Banjarmasin, 10 Oktober 2018

Menjalin kedekatan hubungan dengan mahasiswa secara personal, juga dilakukan di UIN Susqa, Riau. Malahan, kecenderungan pola yang diterapkan di Riau jauh lebih serius. Secara khusus Rektor menyebutkan bahwa pola pendekatan yang dipakai di UIN Riau adalah pendekatan yang humanis. Humanisme ini menjadi payung dalam setiap kegiatan di kampus ini, termasuk tentunya dengan mahasiswa.

“Saya menyebutnya humanis, karena kita gunakan pendekatan kultur, bukan pakai otot. Ajaran Islam yang diajarkan, cara-cara yang dilakukan, disesuaikan dengan aspek kultur yang ada. Humanis adalah pilihannya, sehingga lebih *soft* dan tentunya lebih akrab.”¹²⁷”

Oleh karena itu, dalam aktifitasnya, banyak pola-pola hubungan dengan mahasiswa yang cenderung lebih dekat. Bisa dalam bentuk dengan mengunjungi mahasiswa, menjadi pembina disetiap kegiatan, ataupun kesiapan jadi narasumber pada tiap kegiatan. Selain itu dikembangkan juga model “curhat”, Mengadakan pertemuan dengan organisasi kemahasiswaan ditingkat Fakultas untuk menerima saran dan kritikan. Tidak ada pembinaan dan kebijakan khusus tentang kemahasiswaan. Konteksnya adalah bagaimana Dekan, Wakil Dekan serta dosen bertanggung jawab terhadap mahasiswa untuk ikut mengawasi dan membina mahasiswa. Pengalaman seperti ini sudah diterapkan di UIN Riau.

Model humanis yang dikembangkan disini, juga diarahkan pada bentuk pemahaman terhadap simbol-simbol agama, misal menggunakan sarung, masjid menggunakan bedug, dan lain sebagainya. Pada beberapa sisi

¹²⁷ Wawancara dengan Rektor UIN Susqa Riau, 10 Oktober 2018

malah Rektor mengajukan pergantian kitab-kitab yang dulu jadi rujukan lama, sekarang sudah diperbaharui.

g. Pembinaan dan Pengawasan Dosen

Dosen merupakan ujung tombak dalam proses pendidikan dan pengajaran. Cara dan materi yang disampaikan oleh dosen akan berpengaruh besar terhadap pengetahuan mahasiswa, terutama sekali kelompok mahasiswa baru. Kualitas seorang dosenlah yang akan menjadi penentu keberhasilan dalam mengarahkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa.

Pada konteks radikalisme beragama di kalangan mahasiswa, dosen ikut memberikan pengaruh yang diyakini cukup kuat. Ini pernah dilansir oleh Wapres Jusuf Kalla bahwa kalangan kampus terutama dosen harus memahami cara menangkal radikalisme ini. Dosen harus bisa memberikan pengajaran, ceramah, pengajian, yang sifatnya menyejukkan dan mengajarkan tentang keagamaan yang baik dan keindonesiaan¹²⁸.

Tahun 2017 lalu pemerintah mengeluarkan Perpu No. 2/2017 yang intinya melakukan pelarangan terhadap organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila. Setelah keluarnya Perpu ini, HTI adalah korban pertamanya. Ormas ini dibubarkan dan dinyatakan dilarang untuk beraktifitas di Indonesia. Ternyata simpatisan dan keanggotaan HTI selama ini juga melibatkan beberapa dosen dan mahasiswa. Maka tak heran kemudian beberapa dosen dikenai sanksi oleh pihak kampus¹²⁹. Hal ini menunjukkan bahwa kalangan dosen juga ikut terpapar oleh

¹²⁸ <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/18/06/05/p9unvf428-jk-dosen-harus-paham-cara-atasi-radikalisme>, di akses tanggal 19 Oktober 2018

¹²⁹ Bisa dibaca kasus Prof. Suteki dari ITS, <https://tirto.id/gelombang-stigmatisasi-039radikalisme039-di-perguruan-tinggi-negeri-cPq7>, dan juga <https://damailahindonesiaku.com/banyak-dosen-terpapar-radikalisme-mahasiswa-baru-harus-diberi-pemahaman.htm>

paham-paham radikal dalam berbagai bentuknya. Memang, hal ini kemudian juga menjadi kontroversi karena definisi radikal untuk kalangan dosen bisa menjadi multitafsir.

Tetapi yang bisa dipastikan bahwa dosen memiliki peran dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa, termasuk pemahaman keagamaan, kebangsaan, dan multikulturalisme. Peran dosen ini akan terlihat dari keilmuan yang dimilikinya dan bagaimana ia kemudian bisa melakukan justifikasi ilmiah terhadap berbagai fenomena kekerasan yang muncul atas nama agama. Pada posisi ini, paparan radikalisme beragama di kalangan dosen tidak bisa semata-mata ditujukan pada asumsi bahwa dosen terlibat aksi radikalisme secara langsung. Aktifitas keilmuan dosen yang tidak memberikan pencerahan wawasan keagamaan dan kebangsaan, itu sebenarnya yang perlu mendapat perhatian besar. Intinya, bagaimana agar para dosen bisa memberikan pencerdasan beragama dan berbangsa kepada mahasiswa.

Mengenai hal tersebut, pandangan Azyumardi Azra bisa dilihat, bahwa dosen punya sisi yang strategis, terutama dosen-dosen sains yang tidak memiliki basis pengetahuan agama dan kebangsaan.

"Saya kira guru dan dosen, khususnya bidang ilmu alam. Banyak dosen atau gurunya berpaham radikal. Kita lihat dalam kasus bom bunuh diri itu banyak sekali kecurigaan bahwa itu rekayasa. Dan di kalangan dosen umum terkenal menganggap rekayasa dari pemerintah."¹³⁰

Menarik melihat disini bahwa dosen yang tidak memiliki basis pendidikan agama cenderung dianggap lebih mudah terpapar. Ini tentu

¹³⁰ Azyumardi Azra, dikutip pada

<https://www.suara.com/news/2018/05/26/043000/saran-guru-besar-uin-untuk-pangkas-paham-radikal-di-kampus>

saja berkaitan dengan kebijakan transformasi IAIN ke UIN, dimana dosen-dosen yang direkrut juga dibutuhkan dari keilmuan umum, seperti Sainstek, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan sebagainya.

Oleh karena itu, pada UIN yang menjadi objek riset ini, kebijakan tentang pengawasan dan pembinaan dosen juga menjadi titik perhatian. Cara awal adalah dari proses rekrutmen, baik dosen PNS maupun Non PNS. Saat melakukan proses seleksi penerimaan dosen, materi seleksi wawancara yang utama sekali adalah wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan. Jika sudah terindikasi meragukan, maka langsung dicoret.

“Proses rekrutmen dosen itu sudah membatasi soal keagamaan dan kebangsaan. Saat wawancara kita tanyakan pandangan keagamaan dan kebangsaannya. Kita bisa nilai dari penjelasannya.¹³¹”

Kebijakan tentang mekanisme seleksi dosen dengan menekankan pada pemahaman keagamaan dan kebangsaan, berlaku umum di semua UIN karena memang sudah menjadi kebijakan dari Diktis Kemenag RI. Pelaksananya adalah para Rektor, sehingga Rektor punya otoritas yang kuat untuk menentukan siapa dosen yang akan diangkat untuk mengajar di kampus tersebut.

Terhadap dosen juga dilakukan berbagai mekanisme untuk melihat aktifitas keilmuan mereka sehari-hari. Ini dengan asumsi bahwa aktifitas dan pemikiran dosen juga bersifat dinamis, karena itu monitoring sangat perlu. Ini dijelaskan oleh Rektor UIN Riau bahwa terhadap dosen, jika memang melanggar, akan dikenakan sanksi. Kepada mahasiswa juga disarankan untuk melaporkan jika ada dosen yang berperilaku atau mengarah pada paham yang radikal. Ini adalah bagian dari antisipasi

¹³¹ Wawancara dengan Rektor UIN Susqa Riau, 18 September 2018

serta bentuk lain pembinaan dosen sehingga mereka bisa menjadi bagian dari mekanisme untuk mencerdaskan mahasiswa.

Rektor UIN Syahid juga berpandangan sama,

“Kita selalu pantau dosen yang ada, karena mereka kita minta memperbanyak intensitas dengan mahasiswa, karena itu bisa saja ada dialektika ataupun dinamika lain. Selalu dilihat dan diawasi, bahkan melibatkan mahasiswa.”

UIN Syahid sendiri tidak membatasi cara berpikir dosen, karena itu sebenarnya ciri khas dunia kampus. Hal yang sama juga di kampus lain. Hanya saja yang dikembangkan adalah memperbanyak dialektika dan diskusi di kalangan dosen, termasuk mengaktifkan konsorsium dosen.

“Satu mata kuliah diajarkan oleh beberapa dosen dalam satu rumpun. Konsorsium dosen kita hidupkan, jadi sesama dosen pasti terlibat diskusi. Apabila ada di antara dosen tersebut yang punya paham berbeda, tentu akan terlibat diskusi dengan dosen lainnya. Diskusi akan bisa mencegah munculnya paham radikal, karena dialektika sudah terbangun. Itu sebenarnya yang perlu diperbanyak, diskusi membahas keagamaan dan kebangsaan, bukan bersikap brutal.”

Konsorsium yang dimaksud disini cakupannya cukup luas dan kemudian memang dirasakan memiliki manfaat bagi dosen. Melalui konsorsium bisa dilakukan diskusi untuk update ilmu pengetahuan, riset bersama, penulisan karya ilmiah, pengabdian dan sebagainya. Ketentuan tentang konsorsium dosen ini dilegalkan melalui SK Rektor No. 523 tahun 2016 tentang Pedoman Konsorsium Dosen UIN Syarif Hidayatullah.

Prof Dede Rosyada juga berkata bahwa aspek inklusifitas sudah menjadi ciri khas pada UIN Syahid. Oleh karena itu, semua pihak harus mengembangkan hal ini, termasuk dosen. Setiap kurikulum, mata kuliah, bahkan RPS selalu diarahkan pada aspek inklusifitas dan pluralisme.

“Semua itu kita awasi dan kita kontrol pada kurikulum. Tidak mungkin rasanya ada dosen UIN disini yang mengembangkan paham-paham radikal, termasuk yang terkatagorikan fundamentalis. Kita cukup tegas soal ini, kalau tidak setuju dan tidak sependapat dengan hal itu, ya kita beri sanksi.”¹³²”

Dijelaskan juga oleh Rektor UIN Syahid bahwa ciri khas UIN Syahid adalah terbuka dan toleran. Islam moderat/wasatiah adalah ciri khas yang selalu dikembangkan, dan ini kemudian akan terwujud dalam berbagai aktifitas, baik itu dosen maupun mahasiswa. Kampus UIN Syahid adalah kampus yang sangat plural. Hal ini bila dilihat dari berbagai aliran keagamaan yang dianut oleh mahasiswa, dosen, termasuk karyawan. UIN tidak dapat memaksakan satu aliran tertentu, semua aliran keagamaan berada dalam posisi yang sama, sejajar, mereka berdampingan secara *co-existence*, bahkan termasuk penganut agama dan kepercayaan yang berbeda. Selain itu, UIN Syarif Hidayatullah juga dikenal sebagai kampus yang menghargai berpikir terbuka. Di kampus UIN Jakarta ini, semua aliran atau mazhab berpikir selalu dihormati meskipun tidak sejalan. Keterbukan berpikir inilah yang dimaksudkan sebagai inklusifisme yang dikembangkan oleh UIN Syarif Hidayatullah.

Berdasarkan wawancara dengan para Rektor semuanya menegaskan pula bahwa dosen diikat dengan ketentuan perundang-undangan, baik UU tentang guru dan dosen, maupun aturan teknis lainnya. Termasuk pula di semua universitas, sudah memiliki Kode Etik Dosen, yang didalamnya

¹³² Wawancara tanggal 10 Oktober 2018

menyebutkan secara tegas hak, larangan, dan kewajiban bagi dosen. Kode etik inilah yang senantiasa jadi acuan dan panutan sehingga bisa menjadi rambu-rambu bagi dosen dalam melaksanakan aktifitasnya.

D. Analisis Strategi Kebijakan Deradikalisasi Beragama di Kalangan Mahasiswa

Konsep radikalisme yang dipakai pada kajian ini adalah paham yang merujuk keyakinan kelompok agama tertentu, yang menginginkan atau melakukan perubahan secara total terhadap tata nilai agama yang dianggap bertentangan dengan paham mereka melalui penggunaan cara-cara yang ekstrem, intoleran, dan pada titik tertentu dengan jalan kekerasan secara fisik. Konsep ini mengacu pada berbagai kajian dan definisi yang sudah dilakukan para ahli dan pihak yang terkait, diantaranya Azra (2011), Esposito (1992), Bakri dan Saidi (tt), Abd A'la (2008) serta BNPT sendiri.

Radikalisme beragama yang ditujukan disini adalah pada mahasiswa, dan pandangan serta kebijakan para Rektor, sudah menunjukkan aspek-aspek strategis yang dilakukan selama ini. Secara kelembagaan, peran Rektor berada pada *Top Management* yang akan menentukan bagaimana aktifitas pembinaan kemahasiswaan bisa dilakukan dengan baik. Untuk kebijakan dan strategi kebijakan menjadi penting.

Strategi dalam formulasi kebijakan biasanya dimulai dari pemahaman tentang isu-isu publik yang ada. Isu-isu publik ini akan menentukan pada tingkat perencanaan kebijakan yang dilakukan. Bryson¹³³ mengatakan bahwa perencanaan strategis lebih memfokuskan kepada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu, lebih menekankan kepada

¹³³ Bryson, J.M. 2005. Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

penilaian terhadap lingkungan di luar dan di dalam organisasi, dan berorientasi kepada tindakan. Gagasan dari Bryson ini menunjukkan bahwa diperlukan perencanaan strategis sebelum menuju ke arah pembuatan sebuah kebijakan.

Mengutip dari Handoko¹³⁴, bahwa perencanaan strategik (*strategic planning*) adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi ; penentuan strategi, kebijaksanaan dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut; dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Mengacu pada pendapat di atas maka sebuah kebijakan yang baik seharusnya dimulai dari proses perencanaan yang tertata dan tersusun dengan rapi. Rencana ini dimulai dari kepastian dan pengetahuan tentang tujuan-tujuan umum dalam sebuah organisasi. Rencana inilah yang kemudian dituangkan dalam kebijakan, dimana disini bisa dipahami bahwa rencana mengarah pada pemahaman terhadap masalah dan masalah itu sudah dianggap sebagai sebuah isu kebijakan yang sangat krusial.

Terhadap persoalan radikalisme beragama di kalangan mahasiswa, maka peranan rektor dalam memahami masalah dan kemudian membuat rencana kebijakan yang akan dilakukan adalah hal penting. Penjelasan sebelumnya sudah menunjukkan beberapa tindakan yang dilakukan oleh para rektor UIN yaitu :

1. Doktrin terhadap mahasiswa melalui kegiatan PBAK
2. Efektifitas pemanfaatan program Ma'had al Jami'ah
3. Pelaksanaan bimbingan mahasiswa secara intensif melalui dosen PA
4. Pembinaan khusus terhadap mahasiswa
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap ormawa

¹³⁴ Handoko, Hani T., Manajemen, Edisi 2, Cetakan Keduapuluh, BPFE Yogyakarta, 2009

6. Membuka ruang dialog intensif dalam perspektif kenusantaraan
7. Pembinaan dan pengawasan terhadap dosen

Tujuh hal di atas adalah realitas yang sudah dilakukan di masing-masing UIN dengan variasinya sendiri-sendiri. Dalam perspektif kebijakan organisasi, bisa dikatakan bahwa pola-pola yang dilakukan lebih berorientasi pada aspek pencegahan. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa sebenarnya di tingkat UIN tidak atau belum ditemukan kasus radikalisme oleh mahasiswa. Belum ada data yang menunjukkan bahwa mahasiswa UIN yang aktif sudah terlibat pada aktifitas radikalisme. Kalaupun ada yang melakukan tindakan kekerasan atau anarkis, isu yang dibawa bukanlah isu agama, tetapi ekspresi pada saat menyampaikan tuntutan. Biasanya dalam konteks demonstrasi atau unjuk rasa mahasiswa. Hal ini ditegaskan oleh Rektor UIN Makassar.

“Kalau mahasiswa melakukan tindak anarkis, ya benar. Itu ada di kalangan mahasiswa kita, biasanya saat mereka demo atau unjuk rasa. Tapi yang masuk wilayah radikalisme beragama, belum pernah ada.¹³⁵”

Hal yang sama juga ada di UIN Suka, UIN Syahid, UIN Suka, maupun UIN Antasari. Belum pernah ditemukan fenomena radikalisme beragama, terutama dari kalangan mahasiswa aktif. Berbeda tentunya dengan kasus Pepi Fernando, yang terlibat kasus bom buku dan bom serpong, dimana yang bersangkutan sudah berstatus alumnus.

Dalam konteks manajemen kelembagaan sebuah organisasi, terutama meminjam perspektif manajemen resiko, yang didefinisikan sebagai bahasan tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan

¹³⁵ Wawancara tanggal 18 September 2018

berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis¹³⁶, maka kebijakan kelembagaan terkait dengan kasus radikalisme bisa diterjemahkan sebagai upaya-upaya untuk mengatasi atau mencegah terjadinya resiko radikalisme di kalangan mahasiswa. Kebijakan deradikalisasi pada dasarnya adalah kebijakan yang bersifat preventif. Kebijakan yang diambil mungkin tidak berkolerasi langsung dengan terjadinya radikalisme, tetapi diyakini punya implikasi secara tidak langsung terhadap munculnya gerakan radikal. Dalam hal ini, memahami resiko-resiko yang bakal terjadi, sangat diperlukan, untuk kemudian memunculkan kebijakan pencegahan.

Saat para rektor membuat kebijakan, pada dasarnya itu adalah bagian dari proses manajemen untuk mencegah munculnya tindakan radikal. Resiko kemunculan tindakan radikal di kalangan mahasiswa bisa memberikan akses pada beberapa hal. Bakri dan Saidi¹³⁷, memberikan analisis mengenai ini, *pertama*, sebagai generasi muda terdidik, mahasiswa seringkali menjadi harapan terdepan masa depan bangsa dan sekaligus sebagai radar hati nurani rakyat yang paling dianggap bebas dari kepentingan. Minimnya kalkulasi politik yang dilakukan mahasiswa membuat gerakannya disebut sebagai *moral force*. Sebagai gerakan moral, gerakan mahasiswa seringkali menjadi parameter suhu politik yang paling *sensitive* dari setiap pergolakan yang dikobarkan. Karena itu, terjadinya paparan radikal sangat potensial mematikan ruh gerakan moral ini.

¹³⁶ Irfan Fahmi, Manajemen Risiko, Teori, Kasus, dan Solusi (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 2

¹³⁷ Maskuri Bakri dan Anas Saidi, Peta Radikalisme Agama Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Dinamika Politik Mahasiswa Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia, makalah pada International Seminar on Islamic Civilization, tt. Diambil dari <https://vdocuments.mx/peta-radikalisme-agama-di-indonesia-analisis-59-peta-radikalisme-agama.html>, tanggal 10 Oktober 2018

Kedua, secara sosiologis terjadinya gerakan radikalisme di kalangan mahasiswa akan berkorelasi terhadap masa depan demokrasi di Indonesia, karena titik fokus demokratisasi sering sebagai anti kritik terhadap demokrasi. Apalagi jika dilihat perubahan basis pola gerakan, dari yang dulunya berbasis pada organisasi modernis seperti HMI, sekarang mulai bergeser ke basis massa yang lain, yang cenderung mengedepankan sisi fundamentalis. Ikhwanul Musliman adalah organisasi yang mendapat tempat dan masuk ke berbagai bentuk organisasi kampus.

Ketiga, dari perspektif ideologis Indonesia yang menetapkan diri berideologi Pancasila --bukan sebagai Negara agama dan bukan pula sebagai Negara sekuler--, saat ini, sedang dalam himpitan dua tawaran ideologi besar. Di satu pihak tawaran ideologi sekuler yang menuntut pemisahan antara agama dan Negara; di lain pihak tawaran ideologi keagamaan yang menginginkan penyatuan antara agama dan Negara dalam bentuk syari'ah yang ada dalam terma Islam *Kaffah* (total).

Keempat, dalam rangka memproyeksikan masa depan demokrasi di Indonesia, seluruh dinamika politik mahasiswa, termasuk dasar-dasar pemikiran yang mendasarinya, membutuhkan kepastian. Hal ini tidak lepas dari kecenderungan bahwa masa depan politik Indonesia kuat dipengaruhi oleh bagaimana dinamika kegiatan kemahasiswaan.

Analisis lain bisa pula disampaikan bahwa gerakan radikalisme jika terus menguat di kalangan mahasiswa akan berimplikasi pada banyak hal. *Pertama*, mahasiswa adalah kelompok pemikir kritis yang pada akhirnya akan menjadi penerus dari berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terpaparnya kelompok ini dengan paham radikal, bisa dipastikan akan memberikan implikasi serius terhadap tatanan sosial politik Indonesia di masa depan. *Kedua*, mahasiswa memiliki kemampuan untuk memberikan

pengaruh kepada pihak lain. Terpaparnya kelompok ini, akan memberikan implikasi serius pula pada tatanan sosial budaya masyarakat. *Ketiga*, mahasiswa menjalani pendidikannya di kampus-kampus ternama yang sejatinya adalah lembaga pencetak pemikir-pemikir dan calon pemimpin bangsa. Terpaparnya mahasiswa dengan paham-paham yang negatif akan berimplikasi serius terhadap kualitas lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

Implikasi-implikasi negatif di atas bisa dikatakan sebagai bagian dari resiko yang bisa terjadi di masa datang. Oleh karena itu, bisa dipahami bahwa pola-pola yang ditempuh para rektor dengan memberikan terapi-terapi khusus, adalah bagian dari kesadaran akan resiko berbangsa dan bernegara dalam skala yang lebih luas.

Mengacu pada pandangan dalam manajemen resiko, kebijakan yang sudah diambil para rektor dalam objek penelitian ini bisa dikatakan memiliki korelasi tidak langsung dengan resiko terjadinya radikalisme di kalangan mahasiswa. Konteks manajemen resiko menegaskan bahwa implikasi tidak langsung ini bisa dihubungkan resiko spekulatif¹³⁸. Artinya kemunculan paham radikalisme adalah spekulasi yang bisa saja terjadi di masa datang, karena itu kebijakan yang dibuat tidak secara nyata berhubungan dengan radikalisme, tapi dianggap sebagai penyumbang munculnya gerakan radikal. Analisis berikut ini membahas masing-masing kebijakan para rektor, sesuai dengan konteks bahwa apa yang dilakukan adalah bagian dari manajemen untuk mengurangi resiko. Kerangka analisis menggunakan SWOT yang nantinya akan bisa memunculkan rekomendasi kebijakan, sebagai pengaya dari kebijakan yang sudah dibuat.

¹³⁸ Dedi Rosadi, Pengantar Teri Resiko dan Manajemen Resiko, https://www.academia.edu/29313258/Pengantar_Teori_Resiko_dan_Manajemen_Resiko.

Strength/Kekuatan Internal

1. Adanya keleluasaan dan dukungan kebijakan internal pada masing-masing UIN

Hal ini berdasarkan penegasan dari Direktur Diktis Kemenag RI, yang mengatakan bahwa masing-masing rektor punya kewenangan dalam menentukan apa yang harus dilakukan dalam mencegah radikalisme ini. Penegasan ini diperkuat pula oleh Renstra Kemenag RI 2015 – 2019, yang salah satunya menyebutkan bahwa aspek pendidikan keagamaan yang harus menjadi titik perhatian. Artinya secara internal para rektor memiliki kekuatan tersendiri, yaitu kewenangan mengatur PTKI yang dipimpinnya secara otoritatif.

2. Masuknya program studi umum dalam ranah UIN terutama dalam bentuk kurikulum, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kekuatan untuk memasukkan unsur-unsur Islam moderat ke ranah pemahaman mahasiswa. Pemahaman tentang keagamaan, terutama paham Islam Wasatiyah/moderat, bisa dimasukkan dengan melakukan dialektika dengan realitas sosial masyarakat saat ini. Program studi umum bisa berdialektika dengan berbagai pemahaman yang lebih moderat, sehingga bisa memberikan warna tersendiri, khususnya dalam ranah integrasi keilmuan.
3. Banyaknya pusat-pusat kajian yang dikembangkan, seiring dengan tuntutan perkembangan jaman, sangat memungkinkan munculnya gagasan-gagasan baru dan diskusi baru, yang nantinya akan mendorong gagasan Islam Moderat di kalangan kampus.
4. SDM dosen yang terus bertambah dari kalangan muda, khususnya prodi umum, ikut memberikan nuansa baru bagi perkembangan pemikiran

UIN kedepannya. SDM ini adalah sebuah kekuatan karena memiliki pengaruh besar bagi dialektika keilmuan yang dimiliki oleh UIN.

5. Visi rektor dan ketegasan sikap yang dimiliki rektor menjadi sebuah kekuatan penting. Semua rektor yang ditemui memiliki visi yang sama bahwa radikalisme adalah ancaman yang harus dicegah. Kesamaan visi ditambah pula dengan ketegasan sikap dari masing-masing rektor, yaitu keinginan untuk menerapkan aturan yang ada dan tidak akan pantang mundur soal kebijakan ini.
6. Keleluasaan untuk menyusun kurikulum dan metode pembelajaran, dapat menjadi sebuah kekuatan utama bahwa UIN bisa mengarahkan pola pembelajarannya pada hal-hal yang dibutuhkan mahasiswa dalam konteks yang positif.

Weakness/Kelemahan

1. Transformasi IAIN ke UIN di sisi lain juga menjadi sebuah kelemahan, karena memang nuansa keagamaan tidak lagi sekuat dan sebesar saat masih menjadi IAIN. Dianggap kelemahan karena kemudian ruh pembelajaran keagamaan menjadi lemah. Integrasi keilmuan yang diharapkan bisa menjadi ciri khas UIN, pada beberapa sisi justru lebih menguatkan aspek ilmu umum.
2. Input mahasiswa yang hampir 60% berasal dari kalangan sekolah umum, menjadi satu kelemahan secara internal, karena rata-rata mahasiswa sebagai input ini, masih sangat terbatas pemahaman keagamaannya. Ini jadi sisi lemah, karena disisi lain, dukungan kebijakan internal belum terlalu kuat untuk memperbesar porsi pemahaman tentang integrasi keilmuan ini.

3. Di beberapa UIN, aspek sarana prasarana, khususnya dalam memberikan pendidikan yang moderat dan pembelajaran secara intensif terhadap mahasiswa, masih terbatas. Sebagai contoh adalah kapasitas dan daya tampung Ma'had yang terbatas, sementara pola pembinaan di ma'had seharusnya bisa melingkupi semua mahasiswa.

Threats/Ancaman Eksternal

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat. Hal ini menjadi ancaman karena asupan informasi yang diterima mahasiswa bisa masuk dari kalangan mana saja. Setiap orang bisa mengakses informasinya sendiri-sendiri, dan ini harus terimbangi dengan kebijakan pendidikan di kampus.
2. Dinamika ormawa seringkali bersinggungan dengan elemen organisasi ekstra kampus. Pengaruh dari lembaga di luar kampus menjadi ancaman tersendiri, karena kecenderungannya ikatan emosional dan organisatoris mahasiswa dengan lembaga di luar kampus cukup kuat.
3. Dinamika perkembangan isu-isu politik dan kebijakan pemerintah, yang dalam beberapa hal dianggap kontroversial, mendorong pengetahuan dan pemahaman mahasiswa yang juga bervariasi. Seringkali ini dipandang negatif dan itu menimbulkan sikap kritis dari mahasiswa. Ini menjadi ancaman karena terpaan informasi mengenai ini lebih besar ketimbang pengetahuan penyeimbangannya.
4. Perkembangan politik luar negeri khususnya berkaitan dengan isu-isu pada negara Islam, kerap menjadi pemicu sikap radikalisme. Hal terkadang tidak terimbangi dengan asupan informasi yang lebih positif dari dalam kampus sendiri.

Oppurtunity/Peluang Eksternal

1. Adanya informasi penyeimbang dari organisasi-organisasi keagamaan lain, maupun dari tokoh-tokoh agama, tentang konsep Islam moderat, bisa menjadi peluang untuk terus mendorong munculnya kebijakan kampus yang mendorong kekuatan berpikir mahasiswa
2. Realitas bahwa yang cenderung terpapar radikalisme selama ini adalah dari kalangan perguruan tinggi umum, bisa menjadi peluang bahwa UIN sebagai lembaga pendidikan agama masih memiliki marwah yang bisa mendorong kepercayaan publik, maupun kepercayaan lembaga
3. Jejaring kemitraan UIN dengan berbagai lembaga lain, baik yang bersifat keagamaan maupun non keagamaan, dapat memberikan peluang bahwa integrasi keilmuan bisa dibangun dan itu akan membangun kerangka berpikir dari mahasiswa.

Masing-masing unsur di atas, menunjukkan bahwa realitas radikalisme dan upaya pencegahannya masih sangat dimungkinkan untuk dilakukan dengan berbagai variasinya. Hal di atas bisa disederhanakan dalam bentuk tabulasi sebagai berikut:

Tabel 2
Analisis SWOT

	Kekuatan	Kelemahan
	1. Keleluasaan dan dukungan kebijakan internal pada masing-masing UIN.	1. Nuansa keagamaan di kampus tidak lagi sekuat dan sebesar saat masih menjadi IAIN.
	2. Masuknya program studi umum dalam ranah UIN.	2. Input mahasiswa yang hampir 60% berasal dari kalangan sekolah
	3. Banyaknya pusat-pusat	

	<p>kajian yang dikembangkan.</p> <p>4. SDM dosen yang terus bertambah dari kalangan muda, khususnya prodi umum.</p> <p>5. Visi rektor dan ketegasan sikap yang dimiliki rektor.</p> <p>6. Keleluasaan untuk menyusun kurikulum dan metode pembelajaran</p>	<p>umum.</p> <p>3. Sarana prasarana, khususnya dalam memberikan pendidikan yang moderat dan pembelajaran secara intensif terhadap mahasiswa, masih terbatas.</p>
Ancaman	Analisis Ancaman-Kekuatan	Analisis Ancaman-Kelemahan
<p>1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat, mahasiswa bisa menerima informasi dari mana saja.</p> <p>2. Pengaruh dari lembaga di luar kampus terhadap ormawa.</p> <p>3. Dinamika perkembangan isu-isu politik dan kebijakan pemerintah, yang dalam beberapa hal dianggap kontroversial.</p> <p>4. Perkembangan politik</p>	<p>1. Penguatan kurikulum yang <i>update</i> terhadap isu-isu kontemporer</p> <p>2. Kebijakan program-program yang mengarah pada <i>outcome</i> mahasiswa</p> <p>3. Kebijakan pembatasan intervensi lembaga luar kampus ke ormawa</p> <p>4. Kebijakan pemberdayaan dosen untuk meningkatkan karyanya di aspek pluralitas dan moderat beragama</p> <p>5. Kebijakan memperbanyak kajian-kajian keagamaan dan isu</p>	<p>1. Perlunya mengembangkan program-program pembelajaran keagamaan dalam berbagai aktifitas kemahasiswaan</p> <p>2. Perlunya dibuat semacam lembaga-lembaga kajian ataupun forum-forum diskusi untuk membahas secara berimbang tentang isu-isu politik dan kebijakan pemerintah</p> <p>3. Menciptakan program kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan wawasan keagamaan dan kebangsaan mahasiswa.</p>

<p>luar negeri khususnya berkaitan dengan isu-isu pada negara Islam.</p>	<p>internasional/nasional secara seimbang</p> <p>6. Kebijakan penguatan mata kuliah Pancasila ataupun paham kebangsaan</p>	
<p>Peluang</p>	<p>Analisis Peluang-Kekuatan</p>	<p>Analisis Peluang-Kelemahan</p>
<p>1. Adanya informasi penyeimbang dari organisasi-organisasi keagamaan lain, maupun dari tokoh-tokoh agama, tentang konsep Islam moderat.</p> <p>2. Kecenderungan terpapar radikalisme selama ini adalah dari kalangan perguruan tinggi umum, bukan UIN.</p> <p>3. Jejaring kemitraan UIN dengan berbagai lembaga lain dalam</p>	<p>1. Perlunya untuk selalu menjalin hubungan antara kampus dengan ormas keagamaan yang moderat.</p> <p>2. Perlunya terus membangun opini di masyarakat bahwa UIN adalah kampus yang bebas dari radikalisme</p> <p>3. Perlu memperkuat jejaring dengan lembaga di luar, khususnya lembaga non keagamaan, yang memiliki perhatian dengan dunia pendidikan.</p>	<p>1. Perlunya kerjasama dengan pihak luar, terutama ormas yang moderat untuk memperkuat kajian keagamaan di PTKI</p> <p>2. Memperbanyak kajian keagamaan dan kebangsaan yang menekankan inklusifitas dan moderasi</p> <p>3. Memanfaatkan jejaring yang ada untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar di lingkungan</p>

<p>membangun kerangka opini berpikir mahasiswa.</p>	<p>4. Perlunya menggiatkan pendidikan karakter dan pembentukan jati diri mahasiswa</p>	<p>kampus</p>
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Beberapa analisis pada tabel di atas sebenarnya sudah masuk dalam ranah kebijakan yang selama ini dibuat dan dilakukan di UIN, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Tetapi beberapa kebijakan masih tetap bisa dilakukan dan tidak ada salahnya jika dilakukan secara bersama-sama pada semua UIN. Beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan sebagai strategi deradikalisasi, juga sebagai pengayaan dari apa yang sudah dilakukan para rektor, untuk kedepannya adalah :

1. Penguatan kurikulum yang mengarah pada isu-isu *update* dan *outcome* yang ingin dicapai mahasiswa. Kurikulum ini bukan semata-mata melakukan revisi untuk kemudian bisa diterima di pasar, tetapi kurikulum yang juga memperhitungkan nilai kebangsaan, kenegaraan, dan keagamaan. Mata kuliah Pancasila yang selama ini menjadi andalan kiranya belum bisa maksimal, untuk itu perlu revitalisasi pada mata kuliah ini.
2. Melalui ketegasan para rektor, seharusnya bisa menerapkan kebijakan yaitu pelarangan organisasi ekstra kampus dalam bentuk apapun untuk

melakukan aktifitas di dalam kampus, kecuali dijadikan sebagai narasumber pada kegiatan dialog terbuka.

3. Memfasilitasi dan mendorong dilaksanakannya dialog-dialog terbuka antar mahasiswa dan kalangan intelektual lainnya tentang isu-isu kontemporer secara rutin berkelanjutan. Ini berguna untuk semakin memasyarakatkan paham-paham moderat di kalangan mahasiswa
4. Memfasilitasi dan memberikan *reward* bagi dosen yang mampu melahirkan karya-karya ilmiah berkualitas dan berguna untuk masyarakat banyak. Hal ini nantinya akan berpengaruh besar terhadap minat dan keinginan dosen untuk berkarya lebih positif lagi.
5. Secara perlahan-lahan merubah persepsi publik di kampus dan luar mengenai simbol-simbol keagamaan yang selama ini banyak terjebak pada makna sempit. Misalnya, cadar identik dengan teroris, padahal secara substansi ini sebenarnya tidak tepat. Perubahan ini bisa dilakukan dengan membangun komunitas-komunitas anti radikalisme dalam berbagai variasinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada rumusan masalah penelitian ini dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan penting yaitu :

1. Radikalisme beragama dalam sudut pandang para rektor adalah gerakan dan paham yang harus dicegah sedini mungkin. Paham ini punya potensi meniadakan/melemahkan aspek kenegaraan, kebangsaan, dan kerukunan umat beragama. Pencegahan sedini mungkin harus dilakukan, khususnya di kalangan mahasiswa.
2. Kemunculan radikalisme beragama di kalangan mahasiswa adalah fenomena yang perlu diwaspadai dan diperhatikan bersama. Banyak hal yang bisa menjadi penyebab munculnya gerakan radikal ini yaitu, minimnya wawasan kebangsaan dan keagamaan, faktor input mahasiswa yang banyak berasal dari sekolah umum, kegalauan dari mahasiswa itu sendiri, masalah kebijakan pemerintah terkait aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi. Terkait juga disebabkan oleh dinamika politik internasional yang cenderung menyudutkan kelompok Islam, aspek kurikulum pembelajaran yang pada beberapa sisi belum memadai, pola pembinaan internal ormawa yang terkadang dilakukan tertutup. Semua hal ini tidak berdiri sendiri, tapi terkadang saling berkaitan erat.

3. Kebijakan yang selama ini diterapkan oleh para rektor dalam rangka deradikalisasi paham keagamaan dengan menekankan pada aspek preventif. Ini dengan asumsi bahwa radikalisme itu sampai sekarang belum muncul di kampus, karena itu upaya preventif harus senantiasa dilakukan. Beberapa hal yang sudah dilakukan adalah dengan efektifitas PBAK, program Ma'had, pembinaan khusus mahasiswa, pembinaan dan pengawasan ormawa, rekrutmen dan pembinaan para dosen. Di atas semua itu adalah ketegasan sikap para rektor untuk melihat masalah secara komprehensif dengan sudut pandang islam yang toleran dan moderat.
4. Munculnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para Rektor, pada dasarnya bukanlah kebijakan yang berangkat dari masalah riil radikalisme. Tujuan awal kebijakan bukanlah untuk mencegah radikalisme bergama. Tetapi para rektor meyakini bahwa kebijakan yang dibuat akan berpengaruh tidak langsung terhadap fenomena kemunculan sikap radikal nantinya. Aspek preventif sangat kentara pada model ini.

B. Rekomendasi dan Saran

Hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan bagi semua pihak, terutama kalangan rektor UIN. Rekomendasi tersebut adalah :

1. Kurikulum pendidikan tinggi sudah sebaiknya mengarah pada isu-isu *update* dan *outcome* yang ingin dicapai mahasiswa. Revisi kurikulum bukan semata-mata mencapai nilai akreditasi saja, tapi berorientasi pada pencegahan radikalisme. Oleh karena itu memasukkan nilai-nilai

keagamaan yang moderat dan paham kebangsaan, bahkan dalam porsi yang lebih banyak, direkomendasikan oleh penelitian ini.

2. Direkomendasikan ketegasan para rektor semakin diperkuat. Salah satunya adalah membuat kebijakan yang bisa membatasi ruang gerak organisasi ekstra kampus ke dalam ormawa. Ormawa tidak bisa dilepaskan dari jejaring organisasi diluarnya, tetapi aktifitas organisasi ekstra di dalam kampus harus dibatasi bahkan bisa dilarang. Ini dengan alasan karena berbagai paham keagamaan diterima mahasiswa justru dari organisasi luar yang memiliki pemahaman tersendiri pula.
3. Direkomendasikan agar pembinaan karakter dan kepribadian mahasiswa harus didahulukan dan mendapat porsi yang seimbang. Perlu ada program khusus yang fokus pada pembinaan akhlak dan kepribadian, terutama di awal-awal mereka menjadi mahasiswa. Langkah UIN Jogya dengan pesantrenisasi ataupun UIN Makassar dengan CBP Training, bisa dijadikan salah satu contoh keberhasilan.
4. Penghargaan dan dorongan bagi civitas akademika yang dianggap memiliki keberhasilan dan kesuksesan dalam membawa misi keindonesiaan dan keragaman, serta moderasi beragama perlu terus dikembangkan. Ini akan menciptakan keinginan untuk terus mengembangkan ide dan gagasan mengenai pluralitas dan moderasi.

Penelitian ini juga memberikan saran, terutama bagi peneliti yang akan datang bahwa persoalan radikalisme beragama di kalangan mahasiswa selalu aktual dan semakin lama membutuhkan penanganan yang semakin konkrit. Oleh karena itu disarankan agar ada semacam penelitian lanjutan untuk melanjutkan kajian yang sudah dilakukan. Aspek yang penting untuk dipahami lebih lanjut adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah dilakukan para rektor, dan kemudian memunculkan rekomendasi

kebijakan yang baru. Tidak salah juga jika objek riset kedepannya lebih diperluas lagi pada IAIN, STAIN, dan juga PTS keagamaan. Ini nantinya akan menunjukkan variasi dalam pemahaman keagamaan.

Daftar Pustaka

- A'la, Abd, *Genealogi Radikalisme Muslim Nusantara Akar dan Karakteristik Pemikiran dan Gerakan Kaum Padri dalam Perspektif Hubungan Agama dan Politik Kekuasaan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada IAIN Sunan Ampel, tanggal 17 Mei 2008.
- Abdullah, Anzar, *Gerakan Radikalisme dalam Islam, Perspektif Historis*, Jurnal Addin Volume 10 Nomor 1, Februari 2016.
- Azra, Azyumardi, *Akar Radikalisme Keagamaan, Peran Aparat Negara, Pemimpin Agama dan Guru untuk Kerukunan Umat Beragama*, Makalah disampaikan pada Diskusi 'Memperkuat Toleransi Melalui Sekolah' The Habibie Center, Hotel Aston, BogorBogor, 14 Mei 2011
- Azra, Azyumardi, <https://www.suara.com/news/2018/05/26/043000/saran-guru-besar-uin-untuk-pangkas-paham-radikal-di-kampus>
- Asrori, Ahmad, *Radikalisme di Indonesia, Antara Historiositas dan Antropositas*, Jurnal Kalam, Volume 9, Nomor 2, Desember 2015.
- Aseri, Akh. Fauzi, Bayani Dahlan, Mariatul Asiah, *Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Banjarmasin*, Tashwir Vol. 3 No. 6, April – Juni 2015
- Ancok, Jamaludin, *Ketidakadilan Sebagai Sumber Radikalisme Dalam Agama: Suatu Analisis Berbasis Teori Keadilan Dalam Pendekatan Psikologi*, Jurnal Psikologi Indonesia No. 1, 1-8.
- Bakri, Maskuri dan Anas Saidi, *Peta Radikalisme Agama Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Dinamika Politik Mahasiswa Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia*, makalah pada International Seminar on Islamic Civilization, tt. Diambil dari <https://vdocuments.mx/peta->

[radikalisme-agama-di-indonesia-analisis-59-peta-radikalisme-agama.html](#), tanggal 10 Oktober 2018

- Bryson, J.M. 2005. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Dwiyono, Armantoto dan Budi Kurniawan, 2009, *Politisasi Kampus : Studi Tentang Hubungan antara Partai Keadilan Sejahtera dan Lembaga Dakwah Kampus di Universitas Lampung*, Laporan Hasil Penelitian, FISIP Universitas Lampung.
- Esposito, John, 1992, *The Islamic Threat, Myth or Reality*, Oxford University Press, New York.
- Handoko, Hani T., *Manajemen*, Edisi 2, Cetakan Keduapuluh, BPFE Yogyakarta, 2009
- Hernawan, Asep Hery dan Dewi Andriani, <http://repository.ut.ac.id/4040/1/PKOP4303-M1.pdf>
- Irfan Fahmi. 2011. *Manajemen Risiko, Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung, Alfabeta
- Imam Fauzi Ghifarie, *Teologi Hakimiyah, Benih Radikalisme Islam*, Jurnal Islam Realitas Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2016
- Khozin, Wahid, *Sikap keagamaan dan potensi radikalisme agama mahasiswa perguruan tinggi agama*, Jurnal EDUKASI Volume 11, Nomor 3, September-Desember 2013
- Lynn Kime dan Minifreed Mc Gee, https://www.rma.usda.gov/pubs/2011/swot_brochure.pdf, diakses tanggal 14 Agustus 2018
- Mujiburrahman, *Dari Iain Ke UIN Pangeran Antasari: Tantangan Dan Peluang Di Tengah Arus Perubahan Sosial Dan Budaya*, Jurnal Khazanah, Volume XII, Nomor 1, 2014 Penjelasan sejarah IAIN

- Antasari banyak mengutip dari sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Antasari
- Nurudin, Basis Nilai-Nilai Perdamaian: Sebuah Antitesis Radikalisme Agama di Kalangan Mahasiswa, *Jurnal Harmoni*, September-Desember 2013.
- Reznick, Lauren B. Klopfer, Leopold E. 1989., *Toward The Thinking Curriculum: Current Cognitive Reserac*. ASCD Yearbook
- Rosadi, Dedi Rosadi, Pengantar Teri Resiko dan Manajemen Resiko, https://www.academia.edu/29313258/Pengantar_Teori_Resiko_dan_Manajemen_Resiko.
- Sahri, *Radikalisme Islam Di Perguruan Tinggi Perspektif Politik Islam*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 6, Nomor 1, April 2016
- Nur Syam, *Radikalisme Dan Masadepan Hubungan Agama-Agama: Rekonstruksi Tafsir Sosial Agama*, naskah pidato pengukuhan Guru Besar pada IAIN Sunan Ampel, disampaikan tanggal 10 Oktober 2005, <https://core.ac.uk/download/pdf/34212117.pdf>, diakses tanggal 24 Oktober 2018.
- Sya'ban, MA, 1994, *Islamic History*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Syaifuddin, 2011, *Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa, Sebuah Metamorfosa Baru*, *Jurnal Analisis*, Volume XI Nomor 1.
- Suwendi, <https://kemenag.go.id/berita/read/509062/penguatan-moderasi-islam-di-ptki>
- Tahir, Masnun, *Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB*, Asy-

Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 49, No. 2, Desember 2015

Uphoff N. 1986. *Local Institutional Development*. West Hartford. CT. Kumarian Press

West, Richard dan Lynn Turner, *Teori Komunikasi Suatu Pengantar*.

Widyaningsih, Rindha, Sumiyem, Kuntarto, *Kerentanan Radikalisme Agama Di Kalangan Anak Muda*, Prosiding Seminar Nasional "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII" 17- 18 November 2017, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Zuhdi, Muhammad Harfin Zuhdi, *Radikalisme Agama dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan*, Jurnal Akademika, Volume 22, Nomor 1, Januari-Juni 2017

<https://www.voaindonesia.com/a/temuan-bin-39-mahasiswa-terpapar-radikalisme-dinilai-harus-ditanggapi-serius-/4370366.html>

<http://citraindonesia.com/kepala-bnpt-radikalisme-sudah-masuk-kampus/?print=pdf>

<http://lipi.go.id/berita/single/Gerakan-Radikal-dan-Terrorisme-Susupi-Organisasi-Kemahasiswaan/15087>

<http://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Strategi-Menghadapi-Paham-Radikalisme-Terrorisme.pdf>

Harian Suara Pembaruan, 6 Juni 2018.

Harian Umum Seputar Indonesia, 6 Mei 2011

<http://digilib.uinsby.ac.id/4193/7/Bab%202.pdf> di akses tanggal 14 Agustus 2018

<http://digilib.uinsby.ac.id/4193/7/Bab%202.pdf>, tanggal 14 Agustus 2018

<https://news.okezone.com/read/2018/04/28/337/1892469/bin-39-persen-mahasiswa-terpapar-paham-radikal>

<https://tirto.id/survei-uin-jakarta-intoleransi-tumbuh-di-banyak-sekolah-dan-kampus-czQL>

Imam Fauzi Ghifarie, Teologi Hakimiyah, Benih Radikalisme Islam, Jurnal Islam Realitas Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Alauddin_Makassar

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/21314/8.%20BAB%20IV.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

<https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/18/06/05/p9unvf428-jk-dosen-harus-paham-cara-atasi-radikalisme>, di akses tanggal 19 Oktober 2018

INDEKS

A'la	
Abd.....	16, 30, 118, 163
A'la, Abd.....	16, 30, 118, 163
Abdullah	
Anzar	25, 32, 34, 111
Abdullah, Anzar	25, 32, 34, 111
Andriani	
Dewi	128, 182
Andriani, Dewi.....	128, 182
Zuhdi, Muhammad.....	34, 184
Aseri, Akh	
Fauzi.....	13
Asiah	
Mariatul.....	13, 181
Asiah, Mariatul.....	181
Asrori	
Ahmad	30
Asrori, Ahmad	30
Azra	
Azyumardi.....	17, 26, 28, 29, 35, 43, 48, 104, 107, 110, 118, 159
Azra, Azyumardi	17, 26, 28, 29, 35, 43, 48, 104, 107, 110, 118, 159
Dahlan	
Bayani	13, 181
Dahlan, Bayani	181
Fahmi	
Irfan.....	166, 182
Fahmi, Irfan	166, 182
Gee, Minifreed Mc	19, 182
Ghifarie, Imam	
Fauzi	40, 182, 185
Ghifarie, Imam ,Fauzi	40, 182, 185
Indonesia	
Seputar	3, 106, 184
Indonesia, Seputar	3, 106, 184
Khozin	
Wahid.....	13, 106
Khozin, Wahid	106
Kuntarto	9, 11, 184
Kurniawan	

Budi	124, 182
Kurniawan, Budi	124, 182
Mujiburrahman.....	78, 79, 80, 85, 88, 100, 104, 115, 117, 147, 182
Pembaruan	
Suara	3, 184
Pembaruan, Suara	3, 184
radikalisme.....	<i>See</i>
Rosadi	
Dedi	168, 183
Rosadi, Dedi	168, 183
Sahri	8, 10, 118, 183
Saidi	
Anas.....	166, 181
Saidi, Anas	166, 181
Sumiyem	9, 11, 184
Suwendi.....	138, 142, 143, 183
Sya'ban,MA	15
Syaifuddin	36, 46, 183
Syam, Nur.....	16, 28, 103, 183
Tahir	
Masnun.....	12, 108
Tahir, Masnun	108
Turner	
Lynn.....	16, 184
Turner, Lynn	16, 184
West	
Richard	16
West, Richard.....	16
Widyaningsih	
Rinda.....	9, 11
Widyaningsih, Rinda.....	9
Zuhdi, Muhammad, Arfin	34, 184

GLOSARIUM

Ektrimisme

Kualitas atau keadaan yang menjadi ekstrem" atau "advokasi ukuran atau pandangan ekstrem

Eklusifisme Beragama

Doktrin atau kepercayaan bahwa hanya satu agama atau sistem kepercayaan tertentu yang benar

Fundamentalisme beragama

Sebuah gerakan dalam sebuah aliran, paham atau agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas (fundamental).

Modernisme

Konsep yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya pada zaman modern.

Intoleransi Beragama

Suatu kondisi jika suatu kelompok (misalnya masyarakat, kelompok **agama**, atau kelompok non-**agama**) secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik, para penganut, atau kepercayaan yang berlandaskan **agama**.

Radikalisme

Suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ ekstrim

Radikalisme Beragama

Suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem, khususnya berkaitan dengan paham dan aplikasi keagamaan

Rektor

Pimpinan tertinggi pada sebuah universitas

Revivalisme Beragama

Sebuah gerakan yang ingin kembali pada ajaran-ajaran mendasar sesuai dengan kitab suci yang dipahami kelompok tersebut.

Sinkretisme

Proses pencampuradukkan berbagai unsur aliran atau paham, sehingga hasil yang didapat dalam bentuk abstrak yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan.

Terorisme

Serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Terorisme bukan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu

pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Tujuan teror adalah menciptakan ketakutan.

Toleransi Beragama

Suatu sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan antar kelompok atau antar-individu dalam beragama, bermasyarakat atau dalam lingkup lainnya.

Universitas Islam Negeri

Perguruan tinggi agama Islam negeri di Indonesia yang sudah mengalami perubahan dari dulunya sebagai Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri.

Daftar Narasumber Penelitian

1. Prof. Dr. Mujiburrahman (Rektor UIN Antasari Banjarmasin)
2. Prof. Dr. Dede Mariyana (Rektor UIN Syarif Hidayatullah)
3. Prof. Dr. Julian Wahyudi (Rektor UIN Sunan Kalijaga)
4. Prof. Dr. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si (Rektor UIN Alauddin Makassar)
5. Prof. Dr. Akhmad Mujahiddin (Rektor UIN Sultan Syarif Qasim, Riau)
6. Prof. Dr. Zulkifli, MA (Dekan FISIP UIN Syahid)
7. Prof. Dr. Yusran Razak, MA (Wakil Rektor III UIN Syahid)
8. Prof. Dr. Al Maqin, MA (Guru Besar pada UIN Sunan Kalijaga)
9. Dr. Ahmad Salabi, M.Pd (WD III Fak Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari)
10. Dr. Sohrah, M.Ag (Ketua Ma'had Al Jami'ah, UIN Alauddin)
11. Dr. Nurdin MA (Dekan FDK UIN Sultan Syarif Qasim)
12. Dr. Azni, M.Si. (WD III FDK UIN Sultan Syarif Qasim)
13. Dr. Hj. Nurhasanahwati (WD III Fak Psikologi UIN Sultan Syarif Qasim)
14. Dr. Waryono Abdul Gafur (WR III UIN Sunan Kalijaga)
15. Dr. Inayah Rohmaniyah (WD III Fak Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Suka)
16. Dr. Muhammad Wildan (Direktur CISForm UIN Sunan Kalijaga)
17. Romli Mualim (Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga)
18. Ahmad, S.Ag, M.Fil (Ketua Ma'had Al Jami'ah UIN Antasari)
19. Mahdalina (Ketua LDK Asy Syifa UIN Antasari)
20. M Miftah Al Farhan, Presiden Mahasiwa UIN Antasari
21. Gunawan (Ketua DCC Al Fatih, UIN Sultan Syarif Qasim)

22. Badrul (Ketua FKII Asy Syams, UIN Sulta Syarif Qasim)
23. Ahmad Nabil (Presiden Mahasiswa UIN Syahid)